



Dunia
dalam
Gelembung

Reza A.A Wattimena

Dunia dalam Gelembung

Reza A.A Wattimena

evolitera

Evolution of Literature

PT Evolitera

Jakarta, 2013

Dunia dalam Gelembung

oleh: Reza A. A. Wattimena

Editor : Tim Evolitera

Cover : Ade Ivan Nurhadian

Layout : Reza A.A. Wattimena

Evolitera is a product of PT Enervolution (ENVO)
Jalan Senopati No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

ISBN: 978-602-9097-21-4

© Reza A. A. Wattimena, 2013

Kata Pengantar

Buku ini adalah suatu upaya untuk memahami apa yang terjadi dengan Indonesia dewasa ini, terutama dilihat dari sudut filsafat dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam buku ini, saya mengajukan satu argumen, bahwa Indonesia terjebak dalam gelembung-gelembung realitas, sehingga kehilangan pijakan pada realitas yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, gelembung adalah elemen yang menghalangi pandangan kita atas kenyataan yang sebenarnya. Yang terlihat kemudian adalah versi lebih (hiperbolis) dari kenyataan itu.

Maka dari itu, kita harus berani memecah gelembung-gelembung yang menutupi realitas, dan melihat realitas itu secara langsung. Dengan kata lain, kita harus memecah berbagai gelembung realitas yang ada, mulai dari gelembung politik, gelembung pendidikan, gelembung ekonomi, gelembung budaya, dan gelembung pemikiran, sehingga bisa sampai pada realitas yang sesungguhnya, dan tak lagi terjebak pada kebohongan-kebohongan. Itulah yang saya coba lakukan dengan menulis buku ini.

Buku ini berisi berbagai tulisan saya yang pernah dimuat di berbagai media, mulai dari koran, majalah, sampai dengan *website* pribadi saya di Internet: www.rumahfilsafat.com mulai dari 2012 lalu. Saya menggunakan pendekatan filsafat dan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik,

psikologi, sosiologi, dan antropologi. Tujuan buku ini adalah mengajak bangsa Indonesia untuk berani berpikir kritis, ketika berhadapan dengan dunia sehari-hari.

Dengan sikap kritis tersebut, kita bisa mulai memahami, apa masalah sebenarnya, dan bergerak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan bersama kita. Buku ini saya tujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kebutuhan utama kita sekarang ini bukanlah uang, tetapi perubahan cara berpikir di dalam melihat realitas, dan menangani masalah-masalah yang ada. Saya yakin, belum ada buku semacam ini yang diterbitkan di Indonesia. Semoga tujuan ini bisa tercapai.

Buku ini tidak akan dapat terbit, tanpa dukungan Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya dan Keuskupan Surabaya yang telah mendukung kegiatan belajar dan penelitian saya selama empat tahun belakangan ini (2009-2013). Saya juga berterima kasih kepada KAAD (*Katolischer Akademischer Ausländer Dienst*) Jerman yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penelitian di Jerman. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Margaretha Rehulina, istri sekaligus teman diskusi saya selama ini.

4 Januari 2013

Reza A.A Wattimena

Bonn, Jerman

Daftar Isi

Dunia dalam Gelembung
Melawan Gelembung Ekonomi
Gelembung Revolusi
Negara Kesejahteraan (*Sozialstaat*) untuk Indonesia?
Gelembung Reputasi
Manusia Indonesia Abad 21
Gelembung Fanatisme
Menanti Manusia Perdamaian
Gelembung Kemunafikan
Gelembung Sertifikat
Membongkar Gelembung Realitas
Gelembung Dilema Para “Diktator”
Melawan Gelembung Politik
Membangun Kesadaran Geopolitik
Mengolah Jiwa
Gelembung Pendidikan
Gelembung Kota Jakarta
Gelembung Kesalehan
Gelembung Kesesatan Berpikir
Gelembung Krisis Makna
Membangun Keseimbangan
Filsafat Pancasila
Gelembung Politik Anas dan Anies
Melawan Gelembung Diskriminasi
Gelembung Neurosains
Gelembung Kesempitan Berpikir
Defisit Rasa
Mencintai “Yang Tak Dapat Dicintai”
Gelembung Institusi
Kisah “Kasih” Jono dan Sinta
Gelembung “Asal Luar Negeri”
Menata Hasrat

Gelembung Hukum Rimba
Filsafat, Ilmu Pengetahuan, dan Demokrasi Kita
Mengapa Kita Perlu Belajar Filsafat?
Memecah Gelembung bersama Pierre Bourdieu
Gelembung Rok Mini
Melawan Gelembung Tulisan
Gelembung Demokrasi dan Kota
Gelembung Buku Bajakan
Mengembangkan Pendidikan di Indonesia
Empat Pilar Demokrasi untuk Indonesia

Biodata Penulis

Dunia dalam Gelembung

Kita hidup di dunia dalam gelembung. Kita menggelembungkan segala yang ada, sehingga hampir semuanya kehilangan akar realitasnya, dan tampak berlebihan. Pada akhirnya, kita pun kehilangan pegangan pada realitas yang sesungguhnya, dan hidup dalam kebohongan.

Realitas yang Sesungguhnya?

Para pemikir sosial kritis tentu akan bertanya, apakah mungkin, kita mengetahui “realitas yang sebenarnya?” Bagi mereka, setiap pengamatan dan setiap pendapat selalu berbalut satu teori dan sudut pandang tertentu, sehingga tak pernah bisa sungguh mutlak, dan tak pernah bisa sungguh menangkap, apa yang “sesungguhnya terjadi”.

Jacques Derrida, filsuf asal Prancis, bahkan berpendapat, bahwa apa yang dapat kita ketahui hanyalah jejak dari realitas, dan bukan realitas itu sendiri. (Derrida, 1989) Maka dari itu, kepastian pengetahuan pun hanya ilusi. Orang yang merasa pasti, bahwa ia mengetahui sesuatu, berarti ia hidup dalam ilusi, karena ia tidak bisa membedakan antara jejak dari realitas, dan realitas itu sendiri.

Argumen ini memang masuk akal, dan memiliki kebenarannya sendiri. Akan tetapi, pada hemat saya, kita dapat mengetahui realitas yang

sebenarnya, walaupun pengetahuan itu tidaklah mutlak, karena realitas itu berubah, maka pengetahuan manusia pun juga harus berubah.

Di dalam filsafat pengetahuan, dinyatakan dengan jelas, bahwa syarat pertama kebenaran adalah kesesuaian antara kata, pikir, dan kenyataan. Syarat ini, pada hemat saya, bisa digunakan untuk menanggapi argumen di atas, bahwa pengetahuan kita itu relatif, dan kita hanya dapat mengetahui jejak dari realitas, dan bukan realitas itu sendiri.

Sampai titik tertentu, manusia mampu menciptakan kesesuaian antara kata, pikir, dan kenyataan. Pada titik ini, gelembung adalah elemen yang membuat kita tak mampu melihat realitas, tetapi hanya bentuk hiperbolis (berlebihan) dari realitas yang ada.

Tidak ada kesesuaian antara kata, pikir, dan kenyataan, karena kenyataan tertutup oleh gelembung, yang membuatnya seolah lebih, dari kenyataannya. Dalam bahasa gaul, gelembung ini bisa juga dibilang sebagai lebay.

Gelembung Informasi dan Citra

Gelembung pertama adalah gelembung informasi. Setiap hari, pikiran kita diserang oleh jutaan informasi, mulai dari iklan, berita di koran, sampai dengan dengan gossip terbaru artis ternama. Pemberitaan di TV dan koran pun seringkali berat sebelah, yakni fokus pada satu area tertentu dengan sudut pandang tertentu, tetapi tidak meliputi area lainnya, dan dari sudut pandang lainnya.

Akibatnya, yang kita peroleh adalah gelembung informasi, yakni informasi berlebihan tentang satu area, dan informasi berlebihan dengan menggunakan satu sudut pandang tertentu. Kita mengalami gelembung informasi di satu sisi, sekaligus krisis informasi di sisi lain, karena kita menjadi buta dengan apa yang terjadi di negara lain, dan rabun, karena tak mampu melihat dari sudut pandang lain.

Gelembung informasi berujung pada gelembung citra. Gelembung citra membuat sesuatu atau seseorang tampak lebih dari aslinya. Gelembung citra menghasilkan kesalahpahaman, karena orang menghormati dan menghargai gelembung, dan bukan realitas sejatinya, yang amat mungkin tidak seperti gelembung yang tampak.

Gelembung Harapan dan Kekecewaan

Dengan citra yang menggelembung, orang pun memiliki harapan yang menggelembung. Namun, karena gelembung bukanlah realitas, bahkan seringkali menipu, maka orang pun akan terjebak dalam kekecewaan. Harapan yang menggelembung pada akhirnya akan bermuara pada kekecewaan yang besar, karena harapan tersebut jauh dari kenyataan yang ada.

Di sisi lain, jika kita memperhatikan berita-berita di media massa, akan terasa sekali, adanya gelembung negativitas, yakni pemberitaan berlebihan tentang apa yang negatif. Gelembung negativitas ini, jika tidak disingkapi dengan sikap kritis, akan membuat kita melihat dunia juga dengan sikap sinis dan negatif.

Cara berpikir negatif adalah awal dari tindakan negatif. Artinya, gelembung negativitas pemberitaan dunia akan juga menghasilkan gelembung negativitas cara pandang, yang amat mungkin akan mendorong tindakan-tindakan negatif, atau ketidakpedulian. Gelembung negativitas juga akan menghasilkan gelembung kekecewaan, yang pada akhirnya membuat orang tak lagi tergerak untuk memperbaiki keadaan.

Gelembung Ekonomi dan Politik

Dunia ekonomi dan bisnis juga terjebak pada gelembung-gelembung semu yang mengaburkan keadaan. Seperti dinyatakan oleh Herry Priyono, dosen di STF Driyarkara, Jakarta, ekonomi harus kembali dijangkarkan ke realitas. (Priyono, 2010)

Artinya, ekonomi tidak lagi melulu soal jual beli uang, yakni alat tukar semata, tetapi kembali menjadi produksi barang konkret yang bermanfaat untuk banyak orang. Artinya, ekonomi harus diubah, tidak lagi sekedar gelembung finansial jual beli uang, tetapi menghasilkan barang-barang yang bisa memperbaiki kualitas hidup manusia.

Krisis finansial yang terjadi dewasa ini juga disebabkan oleh meletusnya gelembung finansial di sistem keuangan AS yang memang tak lagi bisa dikendalikan, lalu menular ke seluruh dunia. Pada hemat saya, gelembung finansial perlu, tetapi tetap harus dalam kontrol pemerintah serta masyarakat, dan tetap dalam jumlah minimal, dibandingkan dengan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang konkret.

Kita juga mengalami gelembung politik. Sudah banyak analisis tentang politik pencitraan. Ini terjadi, karena para politikus hidup dalam gelembung, yang menutupi realitas dirinya, dan menampakkan yang lain, yang sudah digelembungkan, ke masyarakat luas. Akibatnya jelas, gelembung politik melebih-lebihkan citra seorang politikus, tetapi kinerjanya jelek, sehingga tidak memperbaiki keadaan, malah mungkin merusak.

Gelembung Budaya dan Pendidikan

Dunia akademik kita juga hidup gelembung. Kampus-kampus di Indonesia berusaha menggelembungkan dirinya menjadi kampus internasional, tetapi jauh dari jangkak dunia, dan nyaris tercerabut dari persoalan-persoalan mendesak realitas. Penelitian sibuk dengan gelembung teknis dan hibah, serta lupa memahami, apa yang sesungguhnya terjadi di dalam dunia.

Beragam negara berusaha meggelembungkan budayanya, sehingga berusaha menutupi borok perilaku politiknya. Data statistik dan analisis dipelintir sedemikian rupa, sehingga menghasilkan citra gelembung yang nyaris tak ada kaitannya dengan realitas sebenarnya. Gelembung politik adalah kebohongan yang dipelintir seolah menjadi kebenaran.

Gelembung di dunia sosial juga mempengaruhi cara orang melihat dirinya sendiri. Pada akhirnya, orang juga akan mengalami gelembung diri, yakni melihat dirinya lebih dari yang sesungguhnya ada. Narsisme adalah gelembung diri, dan menurut David Brooks, penulis buku *The Social Animal*, melihat, narsisme adalah gejala manusia modern, yakni melihat dirinya lebih dari aslinya. (Brooks, 2011)

Gelembung adalah dunia semu yang menyelimuti realitas yang sebenarnya. Gelembung adalah simbol kemegahan dan kebesaran, tetapi sebenarnya di dalam kosong dan rapuh. Maka dari itu, kita tidak bisa begitu saja percaya pada gelembung-gelembung sosial di sekitar kita.

Di dalam hidup, kita harus berusaha melihat apa yang melampaui indera. Bukan supernatural, melainkan apa yang tak tampak, yang ada di balik setiap gelembung di sekitar kita. Dunia dalam gelembung adalah dunia yang penuh pencitraan, yang seringkali juga berubah menjadi dunia yang penuh kebohongan.

Melawan Gelembung Ekonomi

Sekitar sepuluh tahun yang lalu, para praktisi bisnis dan ekonomi AS dan Inggris menertawai strategi ekonomi Jerman. Bagi mereka, kebijakan ekonomi perusahaan-perusahaan Jerman, yang menolak untuk melakukan investasi finansial di bursa-bursa saham untuk meraup keuntungan secara cepat, dan masih giat memproduksi berbagai bentuk barang, amatlah kuno dan konservatif. Sepuluh tahun berlalu, dan dunia dihantam krisis yang diakibatkan para pemain pasar finansial yang bertindak semaunya. Sekarang, siapa menertawakan siapa?

Ketika Eropa diguncang oleh krisis hutang yang mengancam sebagian negaranya, ekonomi Jerman malah mengalami surplus. Ekspor meningkat, dan angka pengangguran menyentuh titik terendah selama 20 tahun terakhir. Kita bisa mengajukan pertanyaan kecil, apa kuncinya? Apa rahasia keberhasilan ekonomi Jerman di awal abad ke 21 ini?

Rahasianya adalah *Mittelstand*. Secara harafiah, kata ini bisa diterjemahkan sebagai “kelas menengah”, atau bisnis kelas menengah. Namun, maknanya lebih dalam dan lebih luas daripada itu, yakni suatu etos

kerja, dan suatu paham filosofis tentang bagaimana kita harus hidup. Secara sederhana, ada beberapa inti dari *Mittelstand*, yakni etos kerja radikal, spesialisasi, familiaritas, kejujuran, konservatisme keuangan, investasi pada manusia, dan pemerintah yang kompeten.

Etos Kerja dan Spesialisasi

Salah satu semboyan yang cukup dikenal di kalangan para pekerja di Jerman adalah “*Work hard, play hard*”, atau dalam bahasa Jerman, “*wer viel arbeitet, soll auch viel feiern.*” Artinya, orang yang bekerja banyak juga harus berpesta banyak. Tak ada kerja, atau sedikit bekerja, maka orang tak boleh berpesta. Inilah yang saya sebut sebagai “etos kerja radikal”.

Berbicara bersama beberapa teman disini, saya juga bisa menarik kesimpulan sementara, bahwa orang-orang Jerman sangat menekankan pentingnya pemisahan kehidupan profesional pekerjaan dan kehidupan pribadi bersama keluarga dan teman-teman. Seolah di kepala mereka, ada semacam partisi-partisi yang memisahkan bagian-bagian otaknya. Ketika di kantor atau di pabrik, mereka bekerja begitu cepat dan intens. Namun, ketika di rumah, mereka tidak mau diajak bicara tentang pekerjaan, apalagi diajak bekerja. Saya rasa, etos kerja semacam ini baik untuk produktivitas dan kesehatan mental seseorang, dan masyarakat.

Membaca statistik pabrik di daerah Bavaria, Jerman Selatan, kita akan menemukan gejala menarik, yakni spesialisasi yang begitu terasa di antara berbagai kotanya. Memang, Jerman bukanlah negara kesatuan yang sudah berdiri ratusan tahun, seperti Inggris dan Prancis misalnya. Jerman, dulunya, adalah negara yang terdiri dari berbagai kerajaan dan kota-kota kecil, yang kini menyatu menjadi satu negara. Kota-kota maupun kerajaan-kerajaan kecil itu saling berkompetisi dengan memproduksi barang-barang yang unik daerahnya masing-masing. Tradisi itu masih berlanjut sampai sekarang.

Dengan kata lain, spesialisasi produk dari setiap daerah adalah salah satu kunci keberhasilan ekonomi Jerman. Setiap kota, dan setiap daerah, berlomba memproduksi produk-produk terbaik, sesuai dengan kekhasan mereka masing-masing. Kebiasaan ini sudah mengental menjadi kultur dan tradisi, yang begitu bangga diteruskan ke generasi berikutnya. Inilah salah satu “roh” dari *Mittelstand*.

Familiaritas dan Konservatisme

Di pabrik sepatu Meindl di Kirschanschöring, Jerman Selatan, kita akan menemukan contoh bisnis *Mittelstand* yang menarik. Sekitar 200 orang bekerja di pabrik sepatu tersebut. Semua mengenal semua. Suasana seperti di dalam keluarga, yakni amat familiar. Namun, kekeluargaan tidak merusak produktivitas, justru sebaliknya, pabrik sepatu Meindl kini menjadi eksportir besar sepatu ke Eropa dan AS, khususnya sepatu boot.

Hal yang sama bisa kita temukan di pabrik mobil ternama dunia, yakni Audi. Walaupun sudah menjadi perusahaan besar, pola manajemen pabrik tersebut masih menggunakan pola *Mittelstand*, yakni familiaritas antar pekerja, maupun dengan pimpinan. Etos kerja radikal, spesialisasi, ditambah dengan familiaritas, akan menghasilkan sosok Audi dan ratusan pabrik Jerman lainnya yang bermutu tinggi, dan berorientasi pada pasar internasional.

Sejauh saya teliti, pabrik-pabrik tersebut menerapkan kebijakan yang jujur dan konservatif. Artinya, mereka tidak mau mendapatkan uang cepat, karena bermain saham, atau menipu bank, sehingga mendapatkan pinjaman besar dengan kredibilitas palsu. Dengan kata lain, terutama dari sudut pandangan perusahaan-perusahaan di AS dan Inggris, mereka adalah perusahaan-perusahaan tradisional, yakni perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan banyak orang, giat memproduksi barang bermutu tinggi untuk dijual, tanpa hutang, karena hanya membeli apa yang mereka mampu beli, tak punya masalah dengan bank, dan tidak bermain di bursa saham. Inilah salah satu ciri *Mittelstand*, yakni konservatisme dan kejujuran, yang terkesan kuno, tetapi berhasil.

Dr. Anton Kahtrein adalah pemilik sekaligus pemimpin Die KATHREIN-Werke KG yang menjadi produsen utama dan tertua dari Antenna dan beragam alat elektronik lainnya di dunia. Baginya, *Mittelstand* bukanlah semata suatu prinsip manajemen, melainkan suatu filsafat, suatu jiwa dari perusahaan-perusahaan Jerman, mulai dari yang kecil, sampai yang besar. Di dalam salah satu wawancaranya, ia menyatakan tak akan pernah melakukan investasi beresiko tinggi di bursa saham. Investasi tertinggi, baginya, haruslah dilakukan kepada para pekerja, yakni dengan

meningkatkan keahlian mereka, dan memperkerjakan lebih banyak orang. Konservatif? Tradisional? Tapi berhasil!

Semua ini didukung oleh kompetensi Pemerintah Jerman di dalam memimpin rakyatnya. Harus diakui, pemerintah Jerman amat birokratis. Untuk membuka rekening Bank di Deutsche Bank, orang harus menunggu setidaknya 2 minggu. Orang juga harus menunggu lama dan menjalani beragam prosedur untuk meminjam uang. Semua ini dilakukan demi alasan keamanan, dan untuk melindungi orang itu sendiri, supaya tidak terlilit hutang yang tak mampu dibayarnya nanti.

Walaupun amat birokratis dan “semi-paranoid”, tingkat korupsi di Pemerintahan Jerman amatlah kecil, dan tidak menjadi masalah besar yang patut menjadi perdebatan publik. Di satu sisi, kita akan bilang, bahwa pola semacam ini amatlah kuno dan konservatif. Di sisi lain, kita juga bisa bilang, bahwa konservatisme *Mittelstand* maupun pemerintah Jerman yang terdengar kuno di mata teori-teori bisnis modern adalah “Filsafat” utama yang mendorong kinerja perusahaan-perusahaan Jerman.

Etos kerja radikal, spesialisasi kerja dan produksi, familiaritas, kejujuran, konservatisme keuangan, investasi pada manusia, dan pemerintah yang kompeten adalah roh dari *Mittelstand* Jerman yang membuat negara relatif kecil ini bertahan di tengah berbagai krisis finansial yang mengguncang seluruh dunia. Mayoritas orang Jerman amat bangga dengan tradisi yang terdengar kuno ini, dan tak ragu untuk mewariskannya ke generasi berikutnya. Inilah yang nilai-nilai penting yang bisa kita pelajari dari Jerman saat ini. Pertanyaan kecil kemudian, kapan giliran Indonesia menunjukkan taringnya?

Gelembung Revolusi

Dunia tersentak oleh revolusi yang nyaris tanpa darah di Mesir 2011 lalu. Sosok pimpinan yang telah memimpin begitu lama dengan teror dan senjata rontok oleh desakan ratusan ribu orang yang menggedor pintu politisnya. Setahun setelah peristiwa itu, suasana berubah.

Revolusi belum selesai, karena presiden terpilih (dengan dukungan kelompok *Muslim Brotherhood*) membuat kebijakan yang seolah mengangkat dirinya sendiri sebagai diktator baru, mengancam keberadaan kelompok minoritas, maupun cita-cita revolusi sebelumnya. Revolusi harus dilanjutkan, mungkin kali ini dengan pertumpahan darah. Musim Semi di Arab seolah berganti muka menjadi Musim Dingin di Arab (*Der Spiegel*, Desember 2012)

Hampir dua tahun, Suriah dicabik oleh perang saudara. Kelompok pemberontak berperang melawan pemerintah untuk menguasai negeri itu. Berbagai skenario bertebaran, siapa yang mendukung siapa, atau siapa menolak siapa. Namun, satu pertanyaan menggantung, apa yang terjadi, setelah perang usai? Apakah keadaan akan lebih baik, atau sebaliknya, bagaikan keluar dari mulut singa masuk ke mulut harimau, justru terperosok lebih dalam ke dalam penderitaan? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini.

Revolusi dan Perang Saudara

Revolusi adalah suatu perubahan politis yang relatif cepat, yang biasanya diikuti dengan gerakan massa yang besar, serta gencetan senjata yang memakan korban jiwa. Indonesia, dan ratusan negara lainnya, telah mengalaminya. Dua tahun belakangan ini, badai revolusi bergerak dari Afrika Utara, dan kini sedang menyerang Timur Tengah. Apa yang terjadi setelah revolusi? Tak ada yang tahu.

Jarang sekali, kita menemukan revolusi yang berjalan damai. Seperti situasi Mesir, revolusi yang berjalan damai, mungkin saja, berarti, bahwa revolusi belum selesai, dan harus terus dilanjutkan. Bagaimana saudara kembar yang senantiasa bergandengan tangan, revolusi dan perang saudara yang mencabik banyak korban jiwa selalu ada berbarengan. Apakah ini hukum sejarah? Mungkin.

Dengan adanya revolusi, orang mengharapkan perubahan politis ke arah yang lebih baik, yakni terciptanya tata politik yang memungkinkan orang untuk hidup secara damai, adil, dan sejahtera. Namun, harapan luhur ini bisa tak terwujud, ketika orang tak mempersiapkan, apa yang mesti dilakukan, setelah revolusi usai. Pertanyaan apa yang harus segera dilakukan setelah revolusi, pada hemat saya, tak kalah pentingnya dengan pertanyaan, bagaimana melakukan revolusi secepat mungkin, dan tanpa darah.

Sesudah Revolusi

Apa yang harus dipersiapkan sebelum revolusi? Pertanyaan ini menarik, karena di dalam perjalanan sejarah, seringkali kita lihat, bahwa revolusi terjadi secara mendadak, tanpa perencanaan. Jika ini halnya, bagaimana kita merencanakan, apa yang akan segera dilakukan setelah revolusi?

Mari kita pertimbangkan alternatif sebaliknya. Revolusi berjalan tanpa rencana pasti, apa yang akan dilakukan setelahnya. Yang kemudian terjadi adalah muncul para pengkhianat revolusi yang justru merebut kekuasaan, dan menjalankan kebijakan-kebijakan politis yang berseberangan dengan cita-cita revolusi di awal, misalnya kebijakan diktatorial yang mengancam kebebasan, keadilan, serta kesejahteraan rakyatnya.

Berpijak pada argumen ini, revolusi tanpa rencana yang mantap justru akan sia-sia. Visi masyarakat berikutnya serta siapa pemimpin yang layak, dan mampu menciptakan visi tersebut, haruslah dipersiapkan sedapat mungkin, sebelum revolusi bergulir. Harga yang harus dibayar, ketika kita gagal mempersiapkan ini, amatlah mahal, yakni perang saudara yang sia-sia, dan cita-cita revolusi yang lenyap ditelan udara.

Para pengkhianat revolusi biasanya berkedok fundamentalisme agama dan fundamentalisme ekonomi. Atas nama agama, mereka memelintir agenda revolusi, dan mengangkat kelompoknya sendiri sebagai pemimpin yang, seringkali, bergaya diktatorial. Di sisi lain, kekuatan modal ekonomi, yang dimiliki oleh negara-negara maju maupun perusahaan-perusahaan multinasional, siap menyokong dengan uang dan senjata, supaya pemerintahan yang baru dapat memberikan kontrak bisnis yang menguntungkan kepada mereka, walaupun pemimpin yang baru menyiksa rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan yang korup.

Kita harus berhati-hati pada dua kekuatan yang siap mendikte dunia dengan ketidakadilan tersebut. Sesudah revolusi tak kalah penting dengan proses revolusi itu sendiri. Bahkan, dalam beberapa hal, apa yang terjadi sesudah revolusi jauh harus lebih diperhatikan, dari proses revolusi itu sendiri. Revolusi yang sebenarnya, menurut saya, adalah Sesudah Revolusi.

Negara Kesejahteraan (*Sozialstaat*) untuk Indonesia?

Peter Sloterdijk, salah seorang filsuf Jerman yang sampai sekarang masih hidup dan aktif berkarya sebagai Professor *für Philosophie und Ästhetik* di Hochschule für Gestaltung di Karlsruhe, Jerman, menulis sebuah artikel yang menggemparkan publik Jerman pada 31 Juni 2009 lalu. Artikel itu berjudul *Die Revolution der gebenden Hand*, atau dapat diterjemahkan sebagai Revolusi dari tangan yang memberi, dan diterbitkan di Frankfurter Allgemeine, salah satu koran nasional di Jerman yang paling banyak dibaca.

Di dalam artikel itu, ia mengkritik keras kebijakan negara kesejahteraan (*Sozialstaat*) yang sampai sekarang masih dipegang erat oleh negara-negara Eropa Barat, termasuk Jerman dan negara-negara Skandinavia, seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Denmark. Dalam arti ini, kita dapat memahami Negara Kesejahteraan sebagai suatu tata kelola pemerintahan, dimana pemerintah memainkan peranan yang amat besar

untuk melindungi dan mengembangkan kehidupan sosial maupun ekonomi warganya.

Sloterdijk dan Negara Kesejahteraan

Beberapa konsep kunci di dalam wacana negara kesejahteraan adalah kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan sekaligus kesempatan untuk memperoleh hidup yang layak (1), penyebaran kekayaan bagi seluruh warga negara (tidak terfokus pada sekelompok orang tertentu) (2), serta tanggung jawab setiap orang untuk membantu orang-orang yang tak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya yang layak sebagai manusia (3). Peran pemerintah amat besar untuk menjalankan tiga prinsip ini.

Konkretnya, Negara Kesejahteraan menerapkan empat kebijakan dasar berikut: orang-orang yang mendapatkan penghasilan lebih tinggi harus (diwajibkan oleh hukum) untuk membayar pajak lebih tinggi kepada negara (1), pengaturan yang ketat oleh pemerintah terhadap sepak terjang para pengusaha besar maupun kecil yang ada di masyarakat (2), asuransi kesehatan untuk setiap warga negara, tanpa kecuali (3), dan pendidikan untuk semua warga, tanpa kecuali (4). Untuk poin tiga dan empat, uangnya diperoleh dari pajak yang ditarik langsung dari masyarakat setiap bulannya, dan dari pemasukan-pemasukan negara lainnya, seperti ekspor misalnya.

Di dalam tulisannya, Sloterdijk menolak mentah-mentah seluruh ide Negara Kesejahteraan. Ia bahkan menyebut ide Negara Kesejahteraan sebagai kebijakan yang membawa ketidakbahagiaan bagi seluruh rakyat, dan membuat warga negara semata-mata sebagai sapi perah pajak pemerintah. Dengan kata lain, negara dapat disebut sebagai perampok (Diebstahl) utama harta warganya.

Tidak hanya itu, di dalam artikelnya, Sloterdijk menggambarkan negara kesejahteraan sebagai “kleptomania yang terinstitusionalisasi” (*Kleptokratie*), dan bukan negara demokrasi kapitalistik, melainkan negara “semi sosialistik” (*Semi-Sozialismus*). Oleh karena itu, ia menyarankan, supaya semua orang-orang kaya, yang membayar pajak amat tinggi, melakukan “revolusi kelas dari atas”, yakni mogok pajak. (Sloterdijk, 2009) Artikel ini menggemparkan publik Jerman, karena secara langsung menghina prinsip-prinsip dasar dari Republik Federal Jerman itu sendiri,

dimana Sloterdijk sendiri, secara pribadi, memperoleh keuntungan dengan sistem Negara Kesejahteraannya.

Tanggapan Kritis Axel Honneth

Axel Honneth, filsuf Jerman lainnya yang masih hidup dan berkarya sebagai Professor Filsafat di Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main di Frankfurt, dan dianggap sebagai penerus Jürgen Habermas di dalam tradisi Teori Kritis (*kritische Theorie*), menulis tanggapan yang cukup tajam, yang dimuat di Die Zeit, juga media ternama Jerman, pada 25 September 2009 lalu.

Di mata Honneth, posisi teoritis Sloterdijk tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara modern yang telah diperjuangkan selama sekitar 200 tahun di Eropa yang kini menghasilkan perdamaian, kesejahteraan ekonomi, dan kemerdekaan politik di Eropa. (Honneth, 2009) Demokrasi sosial (*Sozialdemokratie*), yang kini dijalankan di Jerman, didirikan di atas fondasi nilai-nilai moral Pencerahan (*Aufklärung*), yakni keadilan sosial, kebebasan, dan kesetaraan antar manusia.

Tulisan-tulisan Sloterdijk, tidak hanya yang dimuat di Frankfurter Allgemeine, tetapi juga buku-bukunya, termasuk *Kritik der zynischen Vernunft* dan *Zorn und Zeit*, menurut Honneth, merusak fondasi moral filsafat Pencerahan, dan tidak sesuai dengan komitmen moral Republik Federal Jerman. Sloterdijk, di mata Honneth, bagaikan filsuf-seniman yang tak paham konteks dan tak paham sejarah, sehingga merendahkan begitu saja apa yang telah dicapai dengan susah payah oleh kelas pekerja dan rakyat Jerman selama ini.

Di sisi lain, bagi Honneth, Sloterdijk adalah filsuf yang pandai melakukan kritik, tetapi tidak menawarkan model apapun bagi tata kelola politik jamannya. Tulisan-tulisannya memang puitis dan kreatif, namun tak menawarkan solusi apapun bagi masalah-masalah sosial yang ada, dan hanya membombardir apa yang ada dengan kritik-kritik tajam yang, seringkali, tanpa dasar. (Honneth, 2009) Sloterdijk ingin bermain menjadi “Nietzsche abad 21” yang merumuskan konsep-konsep kontroversial, amat mencintai semangat jaman Yunani Kuno, dan seringkali melakukan lompatan-lompatan kesimpulan yang tak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Argumen utama Sloterdijk di dalam banyak tulisannya, bahwa dasar dari negara kesejahteraan adalah kerinduan untuk menguasai, mencengkram, dan menaklukkan, menurut Honneth, amat tak masuk akal. Yang sesungguhnya terjadi adalah kelas pekerja berjuang keras untuk mendirikan sebuah negara yang tidak lagi hanya berpihak pada yang kaya dan kuat, tetapi juga mampu memberikan keadilan serta kesejahteraan untuk semua warganya, tanpa kecuali. Dengan kata lain, bagi Honneth, argumen-argumen Sloterdijk memang bombastik dan provokatif, tetapi seringkali tak memiliki konteks sejarah.

Apa yang Bisa Dipelajari?

Perdebatan ini, menurut saya, amat berharga untuk dicermati. Apa yang dilakukan Sloterdijk, menurut saya, tidak merusak nilai-nilai moral demokrasi sosial (*Sozialdemokratie*) dan ekonomi pasar sosial (*Sozialwirtschaft*), sebagaimana digambarkan oleh Honneth. Sebaliknya, argumen-argumen Sloterdijk menyadarkan kita, betapa pentingnya nilai-nilai moral dan politik Negara Kesejahteraan itu untuk terus dipikirkan, dikaji kelemahan serta kekuatannya, dan disadari arti pentingnya, terutama bagi masyarakat Jerman.

Di sisi lain, saya juga sependapat dengan Honneth, bahwa kelemahan sistem negara kesejahteraan bukan berarti sistem itu harus diabaikan sepenuhnya, melainkan justru harus dipertegas dan diperbaiki terus menerus. Komitmen ini sama dengan cita-cita Pencerahan, yakni tidak harus ditinggalkan sepenuhnya, melainkan diperbaiki terus menerus, sesuai dengan perkembangan jaman. Inilah yang, pada hemat saya, harus diperhatikan, ketika orang melakukan kritik terhadap suatu pandangan, bahwa kelemahan bukan berarti suatu teori gagal, melainkan bahwa pandangan itu harus terus menerus diperbaiki. Bukankah kita tidak akan membuang bayi, hanya karena ia terus menerus buang kotoran di sembarang tempat, atau di waktu yang tak tepat?

Sistem politik Negara Kesejahteraan, pada hemat saya, juga amat sejalan dengan Pancasila, yang merupakan dasar negara kita. Kesejahteraan adalah milik seluruh rakyat, dan bukan segelintir pemilik modal besar yang mendapatkan uang semata dari warisan mereka saja. Honneth sendiri sudah menegaskan, bahwa banyak orang memperoleh kekayaan bukan dari kerja kerasnya semata, tetapi dari warisan orang tuanya. Maka, sudah

selayaknya, orang-orang ini juga menyumbangkan lebih besar untuk masyarakat, daripada orang-orang yang harus berjuang keras, sekedar untuk hidup layak sebagai manusia. (Honneth, 2009)

Negara demokrasi sosial yang sekular (pemisahan antara agama dan negara) dan berpijak pada sistem politik Negara Kesejahteraan, pada hemat saya, harus menjadi arah bersama kita sebagai bangsa. Dua paham ini, yakni sekularisme dan Negara Kesejahteraan, jika dipahami dan diterapkan sesuai dengan kaidahnya, akan membawa bangsa kita menuju keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat. Orang tak lagi perlu khawatir akan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, serta mampu mengembangkan diri mereka untuk lebih kreatif mencipta, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dua paham ini harus menjadi bagian dari debat publik secara rasional dan seimbang di Indonesia.

Gelembung Reputasi

Tiba di Jerman, saya berjumpa dengan orang-orang yang berasal dari seluruh penjuru dunia, mulai dari Afrika, Asia, Eropa, sampai dengan Amerika Latin. Ketika memperkenalkan diri sebagai orang Indonesia, dengan nada bercanda, mayoritas mereka akan menanggapi saya dengan satu dari tiga hal berikut, entah negara teroris, negara tsunami, dan, tentu saja, Bali, yang memiliki pantai indah. Dalam hati, saya bertanya, mengapa?

Di lain kesempatan, saya berkumpul dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Rasa kangen akan masakan Indonesia pun terpuaskan, karena mereka, orang-orang Indonesia di perantauan, senang sekali berkumpul, dan memasak makanan Indonesia. Ketika ditanya sedang belajar apa, mereka kaget, bahwa saya belajar filsafat. Di kepala mayoritas orang di Indonesia, orang belajar di Jerman berarti belajar teknik. Kembali saya bertanya, mengapa?

Saya rasa, ini yang disebut sebagai reputasi, yakni konsep atau simbol yang dianggap mewakili wujud realitas aslinya. Reputasi seseorang, atau suatu negara, adalah sekumpulan konsep yang dianggap mampu mewakili realitas aslinya, yakni orang, atau negara, itu sendiri. Pertanyaan

saya adalah, sejauh mana reputasi itu mencerminkan realitas sesungguhnya? Apakah reputasi itu suatu konsep yang netral dan obyektif, atau justru berisi sesuatu yang lain, yang mempengaruhi apa isi dari reputasi itu sendiri, dan bagaimana reputasi tersebut terkait dengan kenyataan?

Di dalam salah satu diskusi publik, Slavoj Žižek, filsuf asal Slovenia, diperkenalkan oleh moderator diskusi. Beragam gelar kehormatan dan karya-karyanya dipamerkan di hadapan peserta diskusi. Banyak orang terkagum-kagum. Begitu diskusi mulai, Žižek bilang begini, “Saya merasa tak kenal dengan orang yang baru saja diperkenalkan. Siapa dia? Saya tak merasa, bahwa moderator memperkenalkan saya.” Ia merasa, ada jarak antara citra dan reputasinya sebagai filsuf dunia, dan kenyataan hidup yang ia jalani sehari-hari.

Salah seorang teman telah selesai mengerjakan Magisterarbeit (tesis S2) di salah satu universitas terkemuka di Jerman. Namun, ia merasa tak pernah mendapat bimbingan yang memadai sebagai mahasiswa. Jumlah mahasiswa terlalu banyak, sementara jumlah professor untuk membimbing mahasiswa terlalu sedikit. Bahkan, ia bercerita, bahwa ia hanya berjumpa dua kali dengan professornya, sewaktu sedang mengerjakan Magisterarbeit tersebut, yakni pada awal dan akhir saja. Nama boleh besar, tetapi seringkali kualitas tak sesuai dengan nama besar tersebut.

Banyak contoh lainnya yang bisa dideret disini, mulai contoh dari dunia internasional, atau dari situasi di Indonesia sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa reputasi seringkali, tidak semua, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada? Dan mengapa orang tetap percaya pada reputasi, walaupun seringkali, reputasi itu menipu?

Di dalam salah satu karyanya yang berjudul *Gesundheit und Gerechtigkeit*, Michael Reder, professor filsafat asal München, Jerman, berpendapat, bahwa ada semacam proses-proses sosial (*soziale Prozesse*) yang terjadi di belakang setiap pemahaman kita tentang reputasi dari sesuatu. Proses-proses sosial ini dibentuk, diatur, dan dipilih sesuai dengan prosedur-prosedur tertentu dari kekuasaan yang ada. (Reder, 2010) Proses-proses sosial yang dibentuk oleh kekuasaan inilah yang menjadi isi dari reputasi, yang seringkali menipu kita.

Proses-proses sosial ini jugalah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau apa yang tabu dan apa yang mulia, yang ada

di dalam masyarakat. Dengan kata lain, menurut Reder, reputasi adalah suatu penciptaan suatu konsep atas sesuatu yang dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, Reder, sejalan dengan Michel Foucault, berpendapat, bahwa kekuasaan itu berfungsi kreatif, yakni menciptakan pemahaman (yang tak selalu tepat) atas berbagai hal di dunia. Kekuasaan menciptakan pengetahuan, namun pengetahuan itu tidak pernah netral dan obyektif, karena hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang terus berubah, dan seringkali membingungkan.

Saya sepakat dengan Reder. Hegel, filsuf Jerman abad 17, pernah berpendapat, bahwa manusia bisa memahami dunia melalui konsep (*Begriff*), dan konsep, jelas, membentuk reputasi. Manusia tidak pernah bisa langsung memahami realitas. Ia selalu membutuhkan perantara, yakni bahasa (*Sprache*) dan konsep itu sendiri. Dan, seperti sudah dijelaskan oleh Reder, di belakang setiap konsep, ada kekuasaan (*Macht*) yang mengendalikannya. Inilah sebabnya, mengapa reputasi tak pernah sama persis dengan kenyataan (*Wirklichkeit*). Ini pula sebabnya, mengapa orang sulit sekali bersikap kritis pada reputasi.

Jelas, Indonesia tak pernah sama persis dengan negara teroris, negara tsunami, apalagi Bali. Jelas, orang belajar di Jerman tidak selalu belajar teknik. Jelas, bahwa nama besar tak pernah sungguh sesuai dengan kenyataan yang ada. Jelas pula, bahwa Žižek tak pernah sama dengan sosok orang yang dijabarkan oleh moderator pada awal diskusi, walau namanya sama.

Orang yang sadar akan hal ini tidak akan mudah tertipu oleh silau reputasi. Sebaliknya, orang yang mengabaikan ini akan terus tertipu di dalam hidupnya, walaupun seringkali, ia tak merasa tertipu, karena pengaruh kekuasaan yang seolah mengaburkan daya pikirnya. Seluruh roda politik dan ekonomi dunia berputar di antara berbagai reputasi dan persepsi (*Wahrnehmung*), entah reputasi suatu negara, pemerintah, atau masyarakat tertentu. Sudah saatnya, kita melihat reputasi sebagai reputasi, dan bukan otomatis sebagai kenyataan.

Manusia Indonesia Abad 21

Kita hidup di era yang amat menarik. Apa yang kita pilih dan lakukan sebagai manusia Indonesia akan menentukan jati diri kita, tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan kita sebagai bangsa. Pertanyaan kecil yang menggantung di sekujur wacana ini adalah, bagaimana bentuk konkret dari manusia Indonesia abad 21? Bagaimana ia berpikir, memahami, serta mengatasi pelbagai hal yang terjadi di abad 21 ini?

Situasi Kita

Melalui pelbagai peristiwa yang terjadi, kita bisa membuat semacam profil untuk memahami tipe manusia Indonesia yang ada sekarang ini, yakni manusia Indonesia di awal abad 21. Di satu sisi, ia amat religius, dalam arti segala peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya selalu dilihat dalam kaitan dengan kehendak Tuhan, atau takdir yang sebelumnya telah ada. Di sisi lain, ia amat sulit untuk mematuhi apa yang telah menjadi kesepakatan bersama, misalnya aturan, sehingga membuat hidup bersama, yang didasarkan atas aturan dan hukum, menjadi amat sulit.

Dari dua pendapat ini, kita bisa menurunkan berbagai sikap hidup yang tampak begitu nyata di dalam situasi sehari-hari Indonesia, yakni kemunafikan (religius tetapi korup dalam pikiran dan tindakan), serta ketidakpastian hukum (hukum dan aturan dibuat, tetapi tidak ada yang

menjalankan, dan tidak ada yang menjamin pelaksanaan hukum dan aturan tersebut). Dua hal ini jelas, menurut saya, menjadi penyebab utama, mengapa kita sulit sekali menciptakan masyarakat yang adil dan makmur untuk semua orang, walaupun memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah.

Di sisi lain, manusia Indonesia di awal abad 21 ini memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Komunitas dan keluarga menjadi sesuatu yang penting, walaupun keterlibatan sosial di komunitas seringkali tidak didasari oleh motif-motif yang luhur, melainkan lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi semata. Dampak positifnya jelas, bahwa dukungan sosial menjadi terasa, terutama dalam saat-saat sulit, seperti kematian anggota keluarga, atau sakit. Dampak negatifnya juga ada, yakni suburnya rumor dan gosip di dalam kehidupan sehari-hari yang mengaburkan pandangan kita dari apa yang sesungguhnya terjadi.

Pada titik ini, kita patut bertanya, kemana kita mengarah? Yang pasti, tipe manusia Indonesia abad 21 awal yang saya jabarkan di atas masih bisa berubah. Bibit-bibit perubahan sudah tampak di berbagai tempat, tinggal kita yang kini harus memilih dengan tegas, kemana kita, sebagai manusia Indonesia mengarah.

Pilihan yang kita buat akan membawa setidaknya pada dua tempat. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa kita. Yang kedua adalah pecahnya Indonesia ke dalam kelompok-kelompok radikal, yang pada akhirnya menciptakan perang saudara dan penderitaan untuk semua orang. Tentu saja, saya sarankan, kita memilih yang pertama.

Manusia Indonesia: Manusia Sekular

Sebagai pola pikir, saya rasa, kita perlu untuk mempelajari satu paham yang sekarang ini begitu sinis dipahami di Indonesia, yakni sekularisme (*Säkularismus*). Apa itu sekularisme sebenarnya? Pada hemat saya, sekularisme adalah paham yang menyatakan, bahwa dunia (bukan surga atau neraka) adalah tempat hidup manusia yang utama, maka dunia haruslah ditata dengan cara-cara yang paling baik, yang mampu memberikan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi manusia yang hidup di dalamnya. Dapat juga dikatakan, bahwa sekularisme berkuat soal

tata kelola dunia manusia sehari-hari, dan sedapat mungkin memutuskan hubungan dengan paham soal dunia setelah manusia mati.

Mengapa sekularisme itu baik? Sekularisme mengajarkan dua prinsip dasar yang amat penting untuk kehidupan bersama. Yang pertama, sekularisme mengajak kita untuk sungguh memisahkan urusan negara dan pemerintah dan institusi agama, sehingga negara dan pemerintah yang resmi bisa memimpin masyarakat tanpa jatuh pada diskriminasi atau malah terlalu berpihak terhadap kelompok agama tertentu. Yang kedua, sekularisme mengajak kita untuk berpikir, bahwa setiap orang yang berasal dari beragam agama maupun latar belakang memiliki kesetaraan di hadapan hukum dan aturan yang berlaku.

Di dalam sejarah perkembangannya, sekularisme amat menekankan pemisahan antara agama dan negara. Dalam arti ini, sekularisme hendak memastikan, bahwa agama tidak ikut campur di dalam tata kelola negara, dan sebaliknya, bahwa negara tidak ikut campur dalam soal-soal agama. Tentu saja, pemisahan total tidaklah mungkin terjadi, karena kita hidup dalam dunia yang saling terhubung satu sama lain. Hubungan yang terjadi adalah hubungan dialogis (bukan hubungan yang “menentukan secara mutlak”) antara peran praktis negara di dalam menata masyarakat di satu sisi, dan nilai-nilai agama yang ada di sisi lain. (Habermas, 2008)

Dalam hal ini, sekularisme hendak memastikan, bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama (serta berpindah agama) sesuai hati nuraninya, dan mempraktekkan ajaran agama itu di dalam hidupnya. Kebebasan berpikir dan mendengarkan hati nurani dilindungi oleh pemerintah, dan ini berlaku untuk semua orang, termasuk mereka yang tidak beragama. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan hati nurani, dan mempraktekkannya di dalam kehidupan, dilindungi, sejauh itu semua tidak mengganggu proses tata kelola negara, maupun hak-hak orang lainnya yang hidup di masyarakat. Dirumuskan secara singkat, sekularisme melindungi hak setiap orang untuk beragama, dan ini selalu diimbangi dengan hak orang juga untuk bebas, atau tidak, beragama.

Manusia Indonesia: Sekular dan Demokratis

Dalam konteks masyarakat demokratis, seperti Indonesia, setiap warga memiliki hak yang sama dan setara di hadapan hukum, lepas dari apa agamanya, latar belakangnya, ataupun pilihan hidupnya. Dalam hal ini, saya

ingin menegaskan, bahwa sekularisme sejalan dengan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang melindungi hak hidup dan membuat keputusan bagi setiap orang, termasuk kaum perempuan, homoseksual, waria, difabel, dan kelompok minoritas. Setiap orang dilindungi dari sikap menindas dan diskriminatif yang seringkali ditemukan di dalam ajaran-ajaran agama yang masih berpola tradisional.

Sekularisme juga hendak memastikan, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, polisi, dan pelayanan publik lainnya. Tidak ada orang, yang karena agama ataupun pilihan hidupnya, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, ataupun perlindungan hukum yang layak. Semua institusi milik pemerintah memberikan pelayanan dan pendidikan kepada semua orang yang membutuhkan, tanpa peduli agama ataupun latar belakang orangnya. Sekolah-sekolah negeri mengajarkan nilai-nilai yang netral dari agama tertentu, dan mendidik setiap anak dengan standar yang cukup universal, lepas dari apa agama orang tua dari anak itu.

Bukan Ateisme!

Yang perlu dipahami adalah, bahwa sekularisme bukanlah ateisme. Sekularisme adalah paham yang hendak memastikan, bahwa setiap orang, termasuk para ateis, mendapatkan hak-hak yang sama sebagai manusia atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum. Dalam hal ini, menurut saya, sekularisme adalah suatu pandangan yang amat cocok untuk memberikan kerangka berpikir bagi masyarakat demokratis, seperti Indonesia, yang terdiri dari beragam agama, suku bangsa, pandangan filosofis, serta gaya hidup.

Di sisi lain, sekularisme juga melindungi kebebasan setiap orang, sekali lagi **SETIAP ORANG**, untuk berbicara dan mengekspresikan dirinya. Pandangan dan kritik dibiarkan terbuka bertarung di dalam ruang publik. Tidak ada satu pun kelompok agama yang mendapatkan fasilitas lebih ataupun perlindungan lebih dari negara ataupun pemerintah yang resmi. Setiap ide harus terbuka untuk diskusi dan kritik dari orang ataupun kelompok lainnya. Pada hemat saya, sekularisme adalah paham yang amat cocok untuk menciptakan masyarakat, di mana semua orang yang berbeda cara hidup maupun pola pikirnya bisa hidup bersama secara damai.

Jürgen Habermas, filsuf Jerman, dan Presiden AS, Barrack Obama, memiliki pandangan yang, menurut saya, cocok untuk kehidupan kita di Indonesia. Masyarakat demokratis, menurut mereka, menuntut agar setiap agama, SETIAP agama, menerjemahkan nilai-nilai dan tuntutan mereka dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti secara universal oleh kelompok-kelompok agama lainnya, maupun oleh mereka yang tidak beragama. Nilai-nilai dan tuntutan itu haruslah terbuka untuk diskusi dan kritik, serta tidak otomatis harus dihormati, apalagi diterapkan.

Jantung hati dari sekularisme, menurut saya, adalah kebebasan manusia untuk menentukan apa yang baik bagi hidupnya, dan kebebasan itu secara legal dan institusional dilindungi oleh tata politik yang ada. Tidak hanya itu, kebebasan pun menjadi nilai utama, atau esensi, dari tata politik yang ada. Segala bentuk pembatasan atas kebebasan manusia harus memiliki dasar yang kuat, baik secara rasional maupun secara kultural, serta terbuka untuk kritik, diskusi, dan perubahan, jika dirasa sudah tidak lagi memadai. Otoritas politis, yang berhak untuk membatasi kebebasan manusia, pun harus didasarkan pada nalar dan perjanjian yang terbuka untuk kritik, diskusi, dan perubahan.

Yang menarik adalah, bibit-bibit untuk sekularisme dan demokrasi sudah tertanam begitu dalam di dalam sanubari bangsa Indonesia. Di pelbagai penjuru tanah air, kita sudah langsung bisa melihat, bagaimana perbedaan agama dan latar belakang dijumpai dengan cara-cara yang sekular dan pro perdamaian, sehingga hidup bersama bisa berjalan secara lancar. Tentu saja, ini belum menjadi pandangan umum, namun cukup jelas, bahwa bibit-bibit itu sudah ada, tinggal kita merawatnya, sehingga bisa tumbuh dengan indah, dan mengarahkan kita menjadi bangsa yang adil dan makmur di DUNIA ini (bukan di surga, apalagi neraka).

Gelembung Fanatisme

Seorang pemuda Indonesia belajar di Jerman. Di lingkungannya, ia dianggap berbakat, karena masih muda, cerdas, dan memiliki karakter baik. Ia pun mendapatkan beasiswa penuh untuk belajar lagi. Harapan banyak orang bertumpu pada pundaknya.

Sesampainya di Jerman, ia kaget. Iklim individualisme dan otonomi individu yang begitu tinggi membuatnya sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain. Beberapa kali, ia mencoba menjalin relasi, namun gagal. Ia pun berhenti mencoba.

Di Jerman, ia berjumpa dengan satu kelompok yang memiliki latar belakang agama sama dengannya. Daripada membangun relasi yang lebih luas, ia merasa lebih nyaman bergaul dengan mereka. Maka, aktivitasnya pun hanya dilakukan dalam konteks hubungan dengan kelompok agama tersebut. Semakin hari, ia semakin menutup diri, dan membenci orang-orang yang berasal dari latar belakang lain.

Ini kisah nyata, dan banyak terjadi pada orang-orang yang sedang merantau ke negeri asing, entah untuk bekerja, atau belajar. Justru karena merantau ke negeri asing, orang malah semakin menjadi tertutup dan

fanatik dengan identitas kelompoknya sendiri. Di tengah masyarakat asing yang terdiri dari beragam kultur, orang justru membentuk kelompok-kelompok kecil yang serupa dengannya, dan menutup diri dari hubungan yang lebih luas dengan kelompok lain. Apa yang sebenarnya terjadi?

Era Fanatisme?

Saya rasa, awal abad 21 ini bisa dibilang sebagai era fanatisme. Setelah dua pesawat menghantam *World Trade Center* di New York pada 2001 lalu, dunia seolah dikejutkan oleh fanatisme agama dan politik yang berakar begitu dalam pada kelompok-kelompok radikal di berbagai belahan dunia. Fanatisme itu berujung pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan orang lain, terutama orang-orang yang memiliki identitas berbeda dengan kelompok tersebut.

Di daerah-daerah berbahasa Arab, atau yang lebih kita kenal sebagai Timur Tengah, perang dan ketegangan antara beragam kelompok fanatik terus berlangsung. Dalam konteks ini, kita bisa menemukan dua tipe fanatisme, yakni fanatisme agama dan fanatisme politik. Di Mesir, misalnya, ada kekhawatiran besar, bahwa negara tersebut akan tersungkur ke dalam fanatisme religius yang bisa membangkitkan konflik raksasa dengan negara sekitarnya.

Di Indonesia, beragam gerakan yang amat bertengangan dengan UUD 1945 justru tumbuh menjamur di berbagai pelosok negeri. Pemerintah seolah membiarkan, dan masyarakat pun akhirnya hidup dalam suasana resah terus menerus. Diskriminasi dan rasisme mengental begitu dalam di dalam ingatan kolektif sekaligus aktivitas sehari-hari orang Indonesia. Orang merasa takut, hanya karena ia memiliki identitas yang berbeda. Fanatisme bagaikan api yang siap disulut oleh bensin untuk menjadi api raksasa yang menghancurkan sekitarnya.

Pilar Sosiologis

Apa itu fanatisme, dan mengapa orang bisa menjadi fanatik? Fanatisme, pada hemat saya, adalah suatu sikap ekstrem di dalam memeluk pandangan tertentu, serta bersedia mati dan membunuh orang lain atas nama pandangan yang dianut secara ekstrem dan keras tersebut. Akar-akar fanatisme terletak pada tiga pilar, yakni pilar sosiologis, pilar epistemologis, dan pilar psikologis manusia yang ketiganya, secara bersamaan, mendorong

orang untuk menjadi fanatik. Pada level sosiologis, kita bisa memetakan faktor-faktor internal di dalam proses globalisasi dan pengaruh sosial yang membuat orang menjadi fanatik.

Di era globalisasi sekarang ini, ada satu paradoks yang tertancap begitu dalam di dalam rahim bangsa-bangsa dunia, yakni paradoks mengglobal dan melokal. Disebut paradoks, karena ada dua kejadian yang kontras berbeda, namun terjadi berbarengan. Justru di tengah dunia yang semakin terhubung oleh kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, orang semakin takut untuk bersikap terbuka, dan malah menutup dirinya di hadapan perbedaan.

Orang takut akan keluasan dan keterbukaan, karena dua hal itu mengancam kepastian identitas yang telah ia pegang era-erat selama ini. Akibatnya, ketika dunia semakin rumit dan canggih, ia justru semakin sempit dan takut dengan keterbukaan dunia itu. Semakin dunia ini terbuka, semakin banyak orang yang memilih untuk hidup tertutup, dan memeluk erat-erat identitas lokalnya. Inilah salah satu pilar sosiologis yang mendorong orang untuk menjadi fanatik.

Dalam arti ini, kita bisa mengatakan, bahwa pengaruh sosial amat kuat mendorong orang untuk menjadi fanatik. Keberagaman itu mengancam kepastian identitas, sehingga orang, karena pengaruh lingkungan sosialnya, justru menolak keberagaman, dan semakin keras dan ekstrem dengan identitas tradisionalnya. Fanatisme tidak ada begitu saja, melainkan dipelajari dari proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat, seperti melalui pola asuh orang tua, dan kebencian kelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Margaretha, 2012)

Pilar Epistemologis

Pada pilar sosiologis, kita melihat bagaimana pengaruh globalisasi dan lingkungan sosial turut mendorong orang untuk menjadi fanatik. Namun, pilar itu saja tidak cukup untuk menjelaskan akar-akar fanatisme. Orang bisa hidup di lingkungan sosial yang fanatik, dan mengalami dengan kencang proses globalisasi, tetapi tidak menjadi fanatik, dan justru malah menjadi terbuka. Pada titik ini, pilar epistemologis bisa menjelaskan proses-proses yang lebih dalam, yang mendorong orang menjadi fanatik.

Seorang fanatik melihat manusia lain tidak sebagai manusia, melainkan sebagai sesuatu yang lain, yang bukan manusia. Cara pandang

yang negatif ini dibentuk oleh prasangka yang lahir dari dendam dan trauma atas kejadian negatif yang pernah terjadi sebelumnya. Orang tidak lagi melihat dunia secara jernih, melainkan secara gelap, karena trauma dan dendam, baik itu dendam pribadi maupun dendam kelompok, yang dimilikinya.

Darimana trauma dan dendam itu lahir? Kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik membuahakan begitu banyak kepahitan di dunia. Negara-negara yang lemah ditindas secara ekonomi dan politik oleh negara-negara yang kuat. Jejak-jejak penjajahan masih begitu terasa di situasi politik dunia sehari-hari, maupun di dalam cara berpikir manusia-manusia di dunia. Karena kesenjangan dan kesewenang-wenangan politik yang terjadi, banyak ketidakadilan yang kemudian menciptakan dendam dan trauma begitu dalam bagi korban-korbannya.

Dipicu oleh ketidakadilan global, dendam, dan trauma yang terjadi, orang lalu membangun kelompok-kelompok untuk melawan. Di dalam proses membangun kelompok tersebut, mereka menggunakan kesamaan identitas untuk mengikat serta mengumpulkan orang. Dalam arti ini, fanatisme menjadi simbol untuk melakukan perlawanan politik terhadap ketidakadilan global yang terjadi. Pengaburan cara pandang, sehingga kini diwarnai dendam, prasangka, dan trauma, adalah pilar epistemologis yang mendorong orang untuk menjadi fanatik.

Pilar Psikologis

Menurut saya, pilar psikologis ini berperan lebih besar dan mendalam daripada pilar-pilar lainnya. Pilar ini tertanam di dalam jiwa manusia, yakni di dalam kodratnya sebagai manusia, atau insting-insting alamiahnya. Pada titik ini, kita bisa menengok insting mempertahankan diri yang secara alamiah memang menjadi bagian dari diri manusia.

Fanatisme, dalam arti ini, adalah suatu cara untuk mempertahankan diri dan keterasingan dan kesepian jiwa. Orang belajar, bahwa mengikat erat dirinya secara ekstrem terhadap satu pandangan atau kelompok tertentu bisa membawa keselamatan dan ketenangan bagi jiwanya. Insting dasar manusiawinya lalu bekerja, dan menggunakan pola ini, yakni sikap fanatik, sebagai sesuatu yang normal, dan bahkan harus dilakukan demi mempertahankan diri.

Insting ini lalu dibarengi dengan ketakutan akan yang lain, yang memang sudah selalu ada di dalam diri manusia. Ketika berhadapan dengan yang berbeda, atau yang lain, ada dua kecenderungan manusia, yakni penasaran, lalu menjangkaunya, atau justru menjauh, dan menjaga jarak. (Margaretha, 2012) Di dalam jiwa orang fanatik, terutama setelah mengalami dendam, trauma, dan pengaruh-pengaruh sosial, orang otomatis akan mengambil sikap kedua, yakni menjauh dan menjaga jarak.

Persentuhan dengan yang lain, yakni orang-orang yang berbeda, menjadi tabu. Peleburan identitas dan hubungan dengan orang-orang yang berbeda menjadi sesuatu yang mustahil. Ketakutan akan yang berbeda menjadi cara berhubungan yang normal di dalam hidup sehari-hari. Fanatisme pun bertumbuh di dalam jiwa orang, dan siap melancarkan efek-efek menghancurkan yang ada di dalamnya.

Pada dasarnya, orang menginginkan kebebasan, dan bersedia mati untuk mencapainya. Ini bisa terlihat dari upaya revolusi politik dari berbagai bangsa dunia dari penjajahan, terutama pada awal dan pertengahan abad 20 lalu. Namun, ada sisi gelap dari kebebasan, dan orang takut untuk menghadapinya, yakni pertanggungjawaban, keberanian untuk berpikir sendiri, dan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan secara seimbang. Orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran besar, ketika kebebasan melingkupinya.

Ketakutan tersebut mendorongnya untuk menyerahkan kembali kebebasan tersebut, dan memilih untuk tunduk pada ajaran kelompok maupun pandangan-pandangan yang lain yang “lebih pasti” di dalam melihat dunia. Pada titik ini, kita bisa bilang, bahwa akar dari fanatisme, yakni sikap ekstrem di dalam menghayati suatu pandangan, adalah kerinduan manusia untuk ditaklukkan oleh kelompok, dan ketakutannya akan kebebasan hidup.

Kebebasan itu mengerikan. Berpikir itu sulit dan melelahkan. Tanggung jawab atas pilihan yang telah diambil itu membebani jiwa. Maka, orang lebih memilih untuk takluk ke dalam ajaran kelompok yang bersifat mutlak dan pasti, serta mengingkari kebebasannya sendiri. Di alam kebebasan dan keterbukaan, orang malah rindu untuk ditaklukkan oleh kepastian dan kemutlakan, yang merupakan jalan tol menuju fanatisme.

Fanatisme adalah gejala manusiawi. Segala upaya untuk memahami dan membongkarnya pun perlu menyadari aspek-aspek manusiawi, seperti

lingkungan sosial, cara pandang, serta insting-insting dasariah manusia. Di dunia yang semakin terhubung dan terbuka ini, jalan tol untuk menjadi fanatik justru semakin mudah dan murah. Kita harus berjaga dan waspada selalu.

Menanti Manusia Perdamaian

Perang mencabik Syria. Ratusan ribu orang mati, karena letupan bom. Jutaan peluru berterbangan menerkam jiwa manusia. Sisak tangis sanak saudara mewarnai hari-hari keluarga yang ditinggalkan.

Media internasional meliput berita yang seringkali berat sebelah. Negara-negara kuat di dunia saling berwacana, apa yang akan terjadi dengan Syria, dan apa yang akan mereka lakukan dengan negara yang sedang tercabik perang tersebut. Sampai sekarang, belum muncul sosok-sosok manusia perdamaian, yakni manusia yang siap menjembatani konflik, dan mengakhiri kekerasan. Padahal, itulah yang kita butuhkan sekarang ini, tidak hanya di Suriah, tetapi juga di seluruh dunia.

Konflik

Konflik dan perang memang tak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Seluruh tata dunia sekarang ini juga lahir dari perang dan konflik berdarah antar manusia. Karena perang, negara lahir. Karena perang, perjanjian dibuat, dan tata dunia pun terbentuk.

Pada level yang lebih kecil, hubungan antar manusia pun juga selalu diwarnai pertengkaran. Sahabat yang dekat juga seringkali terbentuk,

karena mereka pernah bertengkar sebelumnya. Sepasang kekasih menjadi kekasih, karena mereka juga ditempa oleh konflik dan pertengkaran. Perang dan konflik memang merusak, tetapi juga mampu mencipta.

Di dalam setiap perang dan konflik kecil, selalu ada kepentingan tersembunyi yang tidak sepenuhnya dinyatakan. Kata yang keluar seringkali bukan kepentingan asli dari konflik atau perang yang terjadi, melainkan hanya permukaan yang menutupi kepentingan lainnya yang tak kelihatan. Hal ini, pada hemat saya, benar tidak hanya untuk perang yang sekarang mencabik Suriah, tetapi juga di dalam setiap konflik antar manusia.

Manusia Perdamaian

Di tengah situasi perang dan konflik, kehadiran manusia perdamaian amatlah dibutuhkan. Saya melihatnya setidaknya lima ciri dari manusia perdamaian. Yang pertama adalah kemampuan mengambil jarak. Manusia perdamaian tidak tenggelam dalam situasi yang negatif.

Mereka terlibat, tetapi tidak hanyut dalam emosi negatif yang lahir dari perang dan konflik. Mereka tahu, bahwa konflik harus segera berakhir, apapun taruhannya. Dendam dan marah memang ada, namun itu tidak menutup kejernihan mereka di dalam memahami situasi. Kekerasan berdarah, apapun taruhan dan dampak yang telah diciptakan, haruslah dihentikan.

Di dalam kehidupan, keadilan memang selalu lolos dari kenyataan. Namun, di mata manusia perdamaian, keadilan, walaupun tidak seratus persen, bisa tetap terwujud di kenyataan. Mereka berusaha menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak yang berseteru. Peran mereka sebagai penengah amatlah penting untuk menciptakan perdamaian.

Di dalam proses menjaga jarak dari suasana negatif dan berupaya menciptakan keadilan, sosok manusia perdamaian menggunakan satu senjata andalan manusia, yakni kemampuan berempati. Empati adalah kemampuan orang untuk mengambil posisi orang lain, dan berusaha melihat dunia dari sudut pandangnya. Dengan empati, sosok manusia perdamaian mampu merasakan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan setiap orang, terutama orang-orang yang berada dalam situasi konflik dan perang.

Kemampuan empati tidak mengaburkan kemampuan manusia perdamaian untuk memahami persoalan secara rasional. Mereka tetap bisa

melakukan analisis, yakni memecah masalah ke dalam bagian-bagian, memahami akar masalah, dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Ketajaman analisis dan kepekaan nurani, yang lahir dari sikap empati, adalah kunci untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan.

Berbekal sikap analitik dan empati, manusia perdamaian mampu mengungkap apa yang tak terungkap secara langsung. Dengan kata lain, mereka mampu bersikap kritis terhadap situasi, terutama melihat kepentingan yang tersembunyi di balik kata dan perbuatan. Ketika kepentingan yang sesungguhnya terungkap, proses perdamaian bisa segera dimulai, tidak lagi dengan kepura-puraan, tetapi dengan kesungguhan hati.

Kehadiran manusia perdamaian amat didambakan sekarang ini. Beribu konflik dan perang telah menyiksa manusia sepanjang sejarah. Keluarga berpisah, karena konflik di dalamnya. Jutaan orang mati, karena perang yang seringkali tanpa alasan yang masuk akal. Kita patut mengajukan pertanyaan kecil ini, jika bukan diri kita sendiri yang menjadi manusia perdamaian, siapa lagi yang bisa kita harapkan?

Gelembung Kemunafikan

Tak bisa disangkal lagi, kita hidup di dunia yang penuh dengan kemunafikan. Bagaikan udara, kemunafikan terasa di setiap nafas yang kita hirup. Kemunafikan juga tampak di setiap sudut yang dilihat oleh mata. Mungkin, konsep ini benar: kita munafik, maka kita ada. Mungkin?

Namun, seringkali, kemunafikan tidak disadari. Keberadaannya ditolak. Menyangkal bahwa kita adalah makhluk munafik sebenarnya adalah suatu kemunafikan tersendiri. Yang kita perlukan adalah menyadari semua kemunafikan yang kita punya, dan mulai “menelanjangi bentuk-bentuk kemunafikan” yang bercokol di dalam diri kita.

Kemunafikan Pendidikan

Kemunafikan bagaikan kanker yang menjalar ke seluruh tubuh bangsa kita. Di dalam pendidikan, kemunafikan menjadi paradigma yang ditolak, namun diterapkan secara sistematis. Guru mengajar tentang kejujuran, sementara ia sendiri menyebarkan contekan untuk Ujian Nasional. Pemerintah bicara soal sekolah gratis di berbagai media, sementara pungutan liar di sekolah-sekolah tetap berlangsung.

Para professor menerima tunjangan raksasa, sementara mereka tak memiliki karya berharga. Guru mendapat uang lebih, namun paradigma mengajar tetap sama, yakni memaksa untuk menghafal, dan memuntahkan

kembali melalui ujian. Tujuan pendidikan yang luhur dipampang di muka umum, namun prakteknya justru menyiksa peserta didik, dan memperbodoh bangsa.

Ujian dibuat, namun tidak menguji apa yang sungguh penting. Kompetisi digalakkan, tetapi hanya berperan sebagai simbol tak berarti yang tak menandakan apapun. Gelar diberikan dan dipampang panjang-panjang, tetapi hanya simbol yang sia-sia belaka. Pendidikan karakter dikumandangkan dengan gencar, tetapi sebenarnya hanya merupakan proyek pemerintah untuk mengucurkan uang lebih, dan kesempatan untuk korupsi.

Kemunafikan Politik

Politik juga adalah bidang yang digerogeti oleh penyakit kemunafikan. Senyum di media disebarakan secara luas, sementara korupsi dan penipuan terus dilakukan. Janji-janji indah digemakan, sementara praktek nyata untuk perbaikan kehidupan bersama tak kunjung tiba. Baju necis dan bau harum menjadi ciri para politikus untuk menutupi kekotoran tindakan mereka yang telah membunuh banyak orang.

Pidato dibuat seindah mungkin, didukung dengan data-data yang telah dipalsukan, untuk menutupi kenyataan sosial yang menyakitkan. Retorika, yakni kemampuan mempermainkan kata dan menjungkirbalikkan kebenaran, menjadi senjata para politikus untuk menyembunyikan borok politik yang ada. Konvoi-konvoi di jalan raya seolah membuka jalan untuk orang penting, yang sebenarnya hanyalah parasit korup yang menyiksa rakyat.

Perjalanan dinas menjadi dalih untuk wisata pribadi dengan uang rakyat. Rapat dengan “uang rapat” menjadi dalih untuk mengeluarkan anggaran, guna mempergendut rekening pribadi. Pemilu dan pilkada, yang merupakan salah satu proses terpenting di dalam demokrasi, menjadi kesempatan untuk menjual diri ke rakyat, guna memperoleh kesempatan untuk korupsi di kemudian hari. Tak heran, politik kita kini semrawut.

Kemunafikan Agama

Agama, bidang kehidupan yang penuh dengan nilai luhur kehidupan, pun tak lolos dari cengkraman kemunafikan. Ajaran moral agama dipelintir untuk menindas kaum perempuan dan orang-orang yang berbeda

pandangan. Ajaran moral agama digunakan untuk membenarkan ketidakadilan dan pembodohan masyarakat. Bahkan, ajaran moral agama seringkali digunakan untuk memuaskan hasrat seks liar yang tak dapat lagi ditahan.

Para pemuka agama berkhotbah tentang kejujuran, sementara mereka menipu banyak orang dengan ucapan manis, namun tindakan penuh kekejaman. Para pemuka agama berkhotbah tentang pentingnya cinta, namun bertindak menindas kaum perempuan dan kelompok lain yang ada di masyarakat. Para pemuka agama berkhotbah soal moral dan kebaikan, namun luntur prinsipnya di hadapan kuasa uang dan seks.

Orang beragama berkhotbah soal nilai-nilai kehidupan, namun bisa saling bunuh, hanya karena beda pandangan tentang satu ayat yang tertulis di dalam buku tua. Orang beragama berkhotbah soal amal dan sifat luhur memberi, namun amal hanya untuk orang-orang yang sealiran, dan tidak untuk orang-orang yang berbeda pandangan, apalagi berbeda agama. Orang beragama berdoa sering dan lama, namun malas bekerja, dan hidup dengan mentalitas korup.

Kemunafikan Bisnis

Ekonomi dan bisnis, sebagai bidang tempat orang bekerja dan mengekspresikan bakat serta kemampuannya, juga tak bebas dari kemunafikan. Senyum manis pelayanan diberikan untuk menutupi hasrat untuk menumpuk modal tanpa batas. Pembukuan keuangan perusahaan dijungkirbalikkan untuk menghindari pajak, dan menumpuk keuntungan untuk pemilik modal. Retorika tentang krisis ekonomi diberikan untuk menekan upah buruh, padahal keuntungan yang ada melulu menancap di kantong pribadi pemilik modal.

Rayuan maut dalam bentuk suap dilakukan untuk melancarkan birokrasi. Suap ditawarkan untuk mengeruk keuntungan yang lebih tinggi, walaupun nyatanya membuat orang menderita, dan menghancurkan keseimbangan alam. Barang dagangan dipelintir kualitasnya, sehingga menjadi lebih rendah, dan merugikan pengguna, serta memberi keuntungan besar dalam jangka pendek.

Proyek besar dijalankan untuk tujuan-tujuan yang tampak baik, namun sebenarnya merusak alam, dan merugikan orang-orang yang telah hidup sebelumnya, baik secara material maupun psikologis. Monopoli pasar

dilakukan, sehingga pengguna tidak memiliki pilihan, selain membeli dari satu orang dengan harga mahal, namun mendapat mutu rendah. Slogan-slogan sumber daya manusia tentang efektivitas dan efisiensi digunakan untuk memerah buruh, supaya bisa semakin bekerja cepat, mutu tinggi, dengan upah serendah mungkin.

Akar Kemunafikan?

Darimana akar kemunafikan ini? Salah satu analisis yang paling masuk akal adalah kemunafikan yang lahir dari proses pendidikan di keluarga, sebelum sistem-sistem lainnya menyentuh diri manusia. Orang tua mengeluarkan ajaran yang berbeda, dengan apa yang sesungguhnya mereka lakukan. Jurang antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan ini ditiru oleh anak, dan setelah sekian lama akhirnya menjadi bagian dari karakter dirinya.

Ayah berbicara tentang kesetiaan, sementara alat kelaminnya menjangkau banyak perempuan. Ibu berbicara soal kejujuran, sementara setiap bulannya, ia mencuri uang rumah tangga untuk kepentingan yang tak jelas. Orang tua berbicara tentang kerajinan, sementara seringkali, mereka sendiri malas bekerja. Orang tua berkhotbah tentang pentingnya menaati aturan, sementara mereka sendiri sering melanggar aturan dan hukum, serta merugikan orang lain.

Akar dari kemunafikan adalah jurang yang terlalu besar antara kata dan perbuatan, antara ajaran dan tindakan di lapangan, serta antara apa yang “secara teoritis” menjadi tujuan bersama dan apa yang “secara nyata” terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Jurang ini memang selalu ada. Namun, dalam dan luasnya menentukan besarnya kemunafikan yang terjadi. Bagaimana dengan anda? Seberapa jauh jarak yang anda punyai antara apa yang ada katakan tentang diri anda, dan apa yang sesungguhnya terjadi secara nyata?

Gelembung Sertifikat

Kita hidup dalam sebuah mesin raksasa yang bernama birokrasi. Di dalamnya, setiap orang adalah bagian dari roda sistem yang bergerak secara otomatis dan gigantis. Setiap orang tak hanya tubuh, darah, dan pikiran, melainkan juga nomor. Di dalam hirupan nafas dan detak jantung kita, kertas dan angka selalu siap melukiskan apa yang terjadi.

Ketika pertama kali melihat dunia, kita dicatat di dalam selembar kertas, yang bernama akte kelahiran. Hembusan nafas kita ditandai dengan nomor urut. Tangisan pertama kita ditandai dengan guratan kata di atas kertas bernama sertifikat. Tatapan perdana kita atas dunia juga berbarengan dengan terjunnya kita ke dalam sistem birokrasi raksasa yang bernama; masyarakat.

Tak lama, waktu berselang. Ketika mendapatkan suntikan pertama dalam hidup kita, kita diberi nomor, dan sertifikat. Hal yang sama berlangsung selama beberapa tahun, sampai kita mendapat sertifikat berikutnya, yang menandakan, bahwa kita sehat. Masuk taman kanak-kanak selama kurang lebih dua tahun, selesai, dan kita mendapat sertifikat.

Lulus ujian yang dilalui seringkali dengan tangis air mata juga ditandai dengan sertifikat. Menempuh pendidikan di luar sekolah diakhiri

juga dengan sertifikat. Menikah, punya anak, bekerja, laporan setiap tahun, semuanya selalu dikepong oleh benda yang bernama sertifikat. Hembusan nafas terakhir kita di dunia pun, selain diikuti oleh tangis keluarga dan sahabat, juga ditandai dengan satu simbol yang terus menghantui kita sepanjang hidup; sertifikat.

Ada apa dengan sertifikat? Apa arti sertifikat? Mengapa kita hidup dalam bayangannya terus menerus? Apakah sertifikat harus terus menghantui hidup kita?

Sertifikat dan Asumsi Kita

Sertifikat adalah suatu simbol yang menandakan, bahwa kita telah melewati satu tahap tertentu dalam hidup kita, dan berhak untuk melakukan serta mendapatkan sesuatu dengan berpijak pada tahap yang telah kita lewati tersebut. Ada satu asumsi yang bersembunyi di balik selembar kertas yang bernama sertifikat, yakni kemampuan. Orang yang telah memiliki sertifikat dianggap memiliki kemampuan tertentu, sesuai dengan sertifikat yang ia pegang. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah asumsi ini benar?

Sebuah sertifikat dikeluarkan oleh sebuah sistem tertentu. Rumah sakit (sistem kesehatan masyarakat) mengeluarkan sertifikat sehat. Sekolah (sistem pendidikan) mengeluarkan sertifikat pendidikan, yang menandakan kemampuan seseorang. Sistem-sistem lainnya mengeluarkan bukti serupa, yakni sertifikat, untuk menandakan, bahwa seseorang berhak untuk melakukan atau mendapatkan hak-hak tertentu.

Kekuatan sertifikat terletak pada kekuatan dari sistem yang mengeluarkannya. Artinya, jika sistem kesehatan sebuah masyarakat bobrok, maka sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh sistem kesehatan tersebut tak ada artinya. Jika sistem pendidikan sebuah masyarakat bobrok, maka sertifikat pendidikan yang dikeluarkan pun tak ada artinya lagi. Logika sederhana ini bisa kita tarik lebih jauh ke dalam sistem-sistem lainnya.

Sistem Kita

Pertanyaan kritis disini adalah, apa artinya, jika kita mengatakan, bahwa sebuah sistem itu bobrok? Sistem yang bobrok, pada hemat saya, adalah sistem yang memiliki jurang yang menganga antara kata dan

kenyataan. Jurang tersebut adalah simbol kebohongan. Apa yang tertulis di dalam sertifikat sama sekali berbeda dari apa yang ada di dalam kenyataan.

Jika jurang ini menganga besar, maka asumsi yang mendasari seluruh konsep sertifikat pun juga gagal. Sebaliknya, sistem yang sehat selalu berusaha menjembatani kata dan kenyataan. Kedua konsep itu, yakni kata dan kenyataan, tak pernah sungguh sama, namun jaraknya bisa diperkecil. Di dalam sistem yang sehat, jurang yang ada amat sempit, nyaris tak terlihat, sehingga apa yang tertulis di sertifikat bisa sungguh dipertanggungjawabkan.

Roda dekonstruksi, yakni kemampuan untuk menunda dan memecah kepastian hidup, harus bergulir untuk memecah asumsi sertifikat di masyarakat kita. Asumsi harus digoyang dan dipertanyakan. Namun, asumsi harus disadari terlebih dahulu, sebelum diolah. Kesadaran akan asumsi yang bergerak di balik kesadaran masyarakat kita inilah yang, menurut saya, amat kurang di Indonesia.

Membangun Kesadaran

Jurang menganga yang tertulis di dalam sertifikat antara kata dan kenyataan sebenarnya berakar pada masalah filosofis yang lebih mendalam, yakni masalah bahasa. Bahasa tak pernah sungguh dapat mewakili realitas, baik realitas di dalam diri maupun di luar diri kita. Bahasa adalah rumusan, dan selalu ada jarak yang cukup jauh dan mendalam antara rumusan dengan kenyataan.

Ini terlihat sederhana, namun dampaknya amat luas di dalam hidup sehari-hari kita, mulai dari salah paham di antara teman yang melahirkan konflik, ataupun salah paham antara para pemimpin negara yang membawa perang dan penderitaan. Kesadaran akan “apa yang tak dapat ditangkap dalam bahasa” ini tidak boleh menjadi alasan untuk kebohongan, tetapi perlu digunakan secara bijak untuk memahami kelemahan manusia di dalam memahami dunianya.

Di dalam masyarakat modern yang amat rumit, kehadiran sertifikat tak bisa dihilangkan. Sertifikat adalah simbol hak dan kemampuan seseorang. Yang perlu terus disadari adalah kekuatan dan kredibilitas dari sistem yang melahirkan sertifikat tersebut, dan kelemahan bahasa manusia yang tak mampu melukiskan kenyataan dan perasaan secara sempurna dalam kata-kata yang tertulis di atas sertifikat. Hanya dengan begitu,

sertifikat tidak lagi menjadi simbol kebohongan, melainkan simbol kepercayaan.

Membongkar Gelembung Realitas

Sekitar dua ratus tahun yang lalu, dunia berada di bawah telapak kaki Eropa Barat. Hampir semua bangsa masuk ke dalam genggaman kolonialisme, atau penjajahan, bangsa-bangsa Eropa Barat. Kekayaan alam dikeruk habis, dibeli dengan harga murah, bahkan dirampas, lalu di bawa ke negara-negara Eropa Barat. Di dalam proses itu, bangsa yang menjadi korban kolonialisme tenggelam dalam kemiskinan, perang saudara, dan penderitaan yang panjang serta dalam.

Kerajaan Inggris pada masa itu memiliki jajahan di lima benua. Di belakangnya menyusul Prancis, Spanyol, Portugal, Belanda, dan Jerman. Apa yang baik dan beradab dibuat berdasarkan nilai-nilai mereka. Segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka dianggap barbar, tidak beradab, maka perlu untuk ditaklukkan. Semboyan yang berkibar kencang pada masa itu adalah *gold* (emas), *gospel* (Injil Kristiani), dan *glory* (kejayaan).

Kolonialisme, yakni proses untuk menjadikan bangsa lain sebagai “budak” ekonomi, politik, dan kultural dari bangsa lain yang merasa diri lebih perkasa, rontok pada awal abad 20. Dua perang dunia menghantam Eropa, melenyapkan ratusan juta nyawa, dan memberi kesempatan bagi

bangsa-bangsa terjajah untuk bangkit merdeka. Indonesia adalah salah satunya.

Abad 20

Banyak bangsa yang menemukan kemerdekaan politiknya pada pertengahan abad 20. Secara politik institusional, mereka lepas dari Eropa Barat. Namun, ada yang tersisa di situ, yakni mentalitas bangsa terjajah yang masih mengendap di dalam cara berpikir dan pola perilaku bangsa-bangsa eks koloni tersebut. Hal ini paling tampak dalam soal pendidikan.

Kurikulum pendidikan, terutama di Indonesia, masih mengikuti pola pendidikan kolonial yang mengedepankan pendidikan “tukang”, yakni pendidikan teknis, yang hampa dalam soal kemampuan berpikir kritis (mempertanyakan secara logis dan rasional apa yang sedang terjadi) dan analitis (memecah masalah ke dalam bagian-bagian kecilnya, lalu menyelesaikannya satu per satu). Sastra, filsafat, dan humaniora, yang justru mengembangkan pola berpikir kritis, kreatif, dan analitis, dianggap sampingan dari kurikulum pendidikan bangsa-bangsa eks koloni, termasuk Indonesia. Penyakit pendidikan ini masih ada, sampai sekarang.

Setelah nyaris hancur total pada akhir perang dunia kedua, Eropa berusaha berbenah diri. Namun, mereka kecolongan. Amerika Serikat bangkit sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan militer dunia yang baru. Hal ini terjadi pada pertengahan abad 20, sampai sekarang. Saya tergelitik untuk menyebut fenomena bangkitnya Amerika Serikat ini sebagai “Eropa yang Baru” (*The New Europe*).

Di negara-negara eks koloni, pada pertengahan abad 20, termasuk Indonesia, ada kesan, bahwa kemerdekaan sudah ada di tangan mereka. Namun, kesan itu salah, karena dalam banyak hal, seperti ekonomi, pendidikan, bahkan politik, campur tangan negara-negara Eropa Barat, kali ini ditambah dengan Amerika Serikat, masih amat kuat mencengkram. Dalam konteks ini, kemerdekaan hanya keseolah-olahan.

Kolonialisme Baru?

Dalam soal tata nilai kehidupan, hal yang sama pun terjadi. Apa yang baik, ilmiah, dan benar selalu tetap mengacu pada Eropa Barat dan AS. Apa yang indah dan apa yang beradab juga tak luput dari kriteria yang seringkali dibuat secara sewenang-wenang oleh Eropa Barat dan AS. Ini terjadi di

berbagai bidang, mulai dari pendidikan, seni, arsitektur, bahkan cara berpakaian sehari-hari. Pengaruh ini tertanam begitu dalam, sampai tak lagi menjadi bagian dari kesadaran masyarakat umum.

Sebenarnya, cukup banyak orang menyadari hal ini. Namun, mereka tak berdaya, karena segala perlawanan berarti menentang kultur dominan, dan dengan mudah dicap sebagai “tak beradab”, atau bahkan lebih parah, yakni “diktator”. Para penguasa politis yang mencoba untuk mendapatkan pembagian kapital yang adil dari kerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing asal Eropa dan AS, sebagai pengelola sumber daya alam mereka, seringkali dicap sebagai “anti-investasi”. Jika sebuah negara sudah dicap diktator dan anti investasi, maka yang berikutnya adalah kebijakan embargo ekonomi, isolasi politik, dan akhirnya keruntuhan negara tersebut. Ini pola penaklukan politik yang banyak terjadi dari pertengahan abad 20, sampai sekarang.

Di dalam teori-teori neo-Marxisme, pola semacam ini disebut sebagai hegemoni, yakni penguasaan tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan jalan-jalan penaklukan kultural. AS dan Eropa Barat tidak hanya bangga mempertontonkan keunggulan militer mereka, tetapi juga keunggulan kultur mereka melalui pendidikan, film, seni, dan musik, misalnya melalui Hollywood sebagai sarana penyebaran nilai-nilai AS. Ini semua terjadi untuk memberikan pembenaran kultural sekaligus militer atas apa yang terjadi, yakni kolonialisme dalam bentuknya yang baru, atau kolonialisme global abad 21.

Polanya tetap sama, yakni kesejahteraan negara-negara maju di abad 21 dibayar dengan kemiskinan, pembodohan, serta penderitaan negara-negara lainnya di dunia. Memang, kolonialisme yang dulu tak lagi tampak, karena negara-negara eks koloni terlihat sudah merdeka. Namun, kolonialisme global abad 21 ini bermain dengan hegemoni, sehingga tak terlihat mata, namun terasa sekali dampak-dampak merusaknya. Di tengah situasi ini, masih adakah jalan untuk melakukan perubahan, untuk memperbaiki keadaan?

Kontra Hegemoni

Tentu saja, hegemoni haruslah dilawan dengan kontra hegemoni. Langkah pertama adalah dengan menyadari, bahwa pola pikir dan perilaku kita masuk dalam hegemoni dari negara-negara dengan kekuatan politik

dominan di dunia. Setelah itu, kita perlu membangun ideologi yang utuh untuk menyatukan negara-negara eks koloni. Dalam arti ini, ideologi bukanlah kesadaran palsu, sebagaimana dinyatakan oleh para pemikir Marxisme, melainkan sebagai suatu sistem berpikir dan cara pandang yang utuh tentang dunia, yang membebaskan bangsa-bangsa eks koloni dari kolonialisme global abad 21.

Ideologi tersebut perlu untuk disuarakan oleh seluruh pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Tujuan dasar dari ideologi tersebut adalah untuk membangun kekuatan serta kesadaran bersama, guna menciptakan **tata dunia global yang lebih adil**, yang tidak semata hanya menguntungkan sebagian kelompok, sambil merugikan kelompok lainnya, tetapi mampu sedapat mungkin memberikan **kesejahteraan yang merata untuk seluruh dunia**. Ideologi tersebut diikuti dengan pendekatan politis yang bersahabat, dan tidak dengan kampanye politik agresif.

Saya pikir, sudah waktunya kita membangun ideologi alternatif semacam itu.

Gelembung Dilema Para “Diktator”

Masyarakat Eropa Barat sudah biasa memisahkan dua ruang dalam hidupnya, yakni ruang publik dan ruang privat. Gaya berpikir semacam ini akhirnya menyebar ke Amerika dan Australia, serta juga menjadi bagian dari kultur mereka. Berkat proses globalisasi, gaya berpikir ini juga menyebar ke seluruh dunia, walaupun tidak seratus persen diterima begitu saja.

Di Jerman, ada ungkapan sehari-hari yang menarik untuk menjelaskan obsesi mereka pada ruang privat. Bunyinya begini, *das geht Sie nichts an!* Yang artinya, itu bukan urusanmu, atau itu tidak ada kaitannya denganmu! Ungkapan ini menegaskan sikap diktator orang-orang Jerman terhadap ruang privatnya. Dalam arti ini, diktator berarti orang yang memiliki kehendak kuat untuk mengatur segalanya sesuai dengan keinginannya, dan, dalam konteks ini, ruang privatnya.

Sementara, untuk konteks ruang publik, ada ungkapan lainnya yang sudah begitu merasuk ke dalam kultur orang-orang Jerman, yakni *Ordnung muss sein*, yang artinya, segalanya harus ditata, segalanya harus memiliki aturan. Ini memang bukan ungkapan sehari-hari. Walaupun begitu, menurut saya, ungkapan ini telah menjadi bagian dari perilaku sehari-hari

maupun cara berpikir orang-orang Jerman, yang ingin mengatur segalanya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dua sikap ini menggambarkan sikap diktator orang-orang Jerman terhadap ruang publik dan ruang privat dalam hidupnya. Segalanya harus diatur sesuai dengan pikiran dan rencana, baik ruang publik, yakni masyarakat, lalu lintas, dan segalanya yang terkait dengannya, maupun ruang privat, yakni urusan-urusan pribadi yang tak perlu dicampuri, seperti soal agama, selera, dan soal cinta. Di balik mentalitas ini, ada satu pengandaian yang amat kuat, yakni kesadaran diri manusia sebagai individu yang memiliki hak dan kekuatan untuk mengatur dunianya.

Kekuatan Sikap Diktator

Para filsuf idealisme Jerman, dari mulai Immanuel Kant sampai dengan Hegel, sudah menekankan pentingnya kesadaran diri ini. Bahkan, para filsuf Idealisme Jerman lainnya, seperti Fichte dan Schelling, banyak berbicara tentang aku, Ich, yang murni dan tak terkondisikan. Pikiran semacam inilah yang mendorong lahir dan berkembangnya sains di peradaban Eropa Barat, yakni manusia sebagai “aku” (*Ich*) yang bebas dan punya otoritas atas seluruh alam. Pikiran inilah juga, menurut saya, yang melahirkan mentalitas diktator atas ruang publik dan ruang privat.

Dari sikap diktator ini, masyarakat Eropa Barat, terutama Jerman, melahirkan peradaban yang amat menekankan akurasi di dalam segala hal. Transportasi umum, seperti bis, kereta, dan pesawat berjalan seakurat mungkin dengan jadwal yang telah dibuat. Urusan pribadi dan urusan publik benar-benar dipisahkan, dan sama sekali tak boleh dicampur baurkan. Rapat dan janji dibuat setepat mungkin dengan apa yang telah disepakati.

Tak heran, Jerman adalah surga bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, yang memang amat menekankan akurasi di dalam berpikir. Mahasiswa dan peneliti dari seluruh dunia datang untuk belajar dan meneliti bersama. Para professor dari seluruh dunia datang untuk belajar, atau melakukan seminar bersama. Teknologi terbaru dibidang energi alternatif dan rekayasa genetika di Jerman pun kini menjadi acuan seluruh dunia.

Di sisi lain, sikap diktator terhadap ruang publik dan ruang privat ini juga melahirkan integritas pribadi maupun integritas sosial. Integritas

pribadi berarti orang hidup dengan prinsip yang kokoh, dan tak dapat diganggu gugat, walaupun banyak tantangan di depannya. Sekilas, ia memang terkesan amat diktatorial dengan ketegasan prinsip dan tindakannya. Namun, orang yang memiliki integritas pribadi, yang sekilas mirip diktator, adalah orang yang jauh dari korupsi, dan seorang pemimpin yang pas di tengah situasi krisis dan penuh ketidakpastian.

Sikap diktator di dalam ruang publik juga bisa mendorong terciptanya integritas sosial masyarakat, yakni masyarakat yang kokoh identitas komunalnya, dan tak takut menghadapi perjumpaan dengan kultur yang berbeda. Dengan kata lain, diktator tidak hanya menghasilkan masyarakat yang tertutup dan terbelakang, tetapi juga masyarakat yang teratur dan tertata dengan baik di segala dimensinya. Ada sisi positif dari mentalitas diktator yang bisa kita pelajari, lepas dari beragam sisi jeleknya yang sudah kita ketahui.

Mungkinkah?

Pertanyaan kritis pada titik ini adalah, sejauh mana kita mampu menjadi diktator atas ruang publik dan ruang privat kita? Bagaimana pun, alam adalah sesuatu yang lain, dan jauh lebih besar, dari manusia itu sendiri. Kekuatan kehendak dan akal budi manusia tidak akan pernah sungguh menjadi tuan atas alam, melainkan hanya “seolah tuan” atas alam itu sendiri. Seketatnya pemerintah menata masyarakatnya, tetap saja, tidak akan pernah masyarakat itu, yang merupakan alam sosial, bisa diatur sepenuhnya.

Sikap diktator atas alam sosial juga bisa menjadi bumerang baru, yakni terciptanya masyarakat totaliter. Indonesia dan Jerman punya pengalaman yang serupa dalam hal ini, dengan NAZI di Jerman dan Orde Baru di Indonesia. Keduanya hendak secara total menata alam sosial sesuai dengan versi yang diinginkan. Keduanya gagal dan runtuh di tengah jalan.

Bagaimana dengan sikap diktator di dalam ruang privat? Orang bisa menciptakan jarak dengan orang lain, bahkan jarak yang sangat jauh. Namun, tetap harus diakui, kita amat membutuhkan orang lain, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Sikap berjarak, yang konon merupakan tanda kedaulatan ruang privat, juga bisa menjadi bumerang, yakni terciptanya kesepian, rasa curiga berlebihan terhadap orang asing, dan keterasingan diri di tengah kota yang justru amat padat penduduknya.

Sikap diktator juga ada batasnya. Realitas alamiah tak dapat sepenuhnya dipahami dan diatur oleh manusia. Realitas sosial juga selalu lolos dari genggamannya kebijakan pemerintah yang hendak menatanya. Kehidupan pribadi juga selalu penuh kejutan, serta membutuhkan sentuhan orang lain, termasuk sentuhan dari orang-orang yang asing bagi kita. Gagal memahami fakta ini akan membuat kita gampang kecewa dan frustrasi, ketika kehidupan memberontak dari rencana kita.

Sikap diktator memang perlu, tetapi harus tahu batas. Para diktator, yakni orang-orang yang punya kehendak serta kekuatan untuk menata hidupnya sesuai rencananya, selalu hidup dalam dilema, yakni menata hal-hal yang tak pernah sungguh bisa tertata, yakni kehidupan ini. Artinya, kita perlu mengatur segala hal yang tak pernah sungguh bisa diatur, namun tetap perlu untuk diatur. Inilah dilema para diktator.

Untuk situasi Indonesia, tentu saja, kita perlu lebih banyak diktator, terutama dari pihak negara. Polisi perlu menjadi diktator atas kelompok-kelompok masyarakat yang merusak hidup bersama. Polisi lalu lintas perlu menjadi diktator pada para pelanggar lalu lintas yang membahayakan hidup orang lain. SBY dan seluruh jajaran pemerintah Republik Indonesia perlu menjadi diktator yang tegas pada para koruptor yang menggerogoti sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk itu, saya rasa, kita tidak perlu merasa dilematis. Setuju?

Melawan Gelembung Politik

Ada ungkapan unik untuk menggambarkan hasil kerja orang-orang Jerman. Mereka memang bukan produsen utama Apple Computer yang desainnya indah dan mesinnya kuat. Mereka juga tidak ikut pada perlombaan produksi Smartphone, bersama Korea, Taiwan, dan Amerika Serikat, yang saat ini sedang gencar terjadi di dunia. Mereka jauh dari glamor dunia.

Memang, mereka punya BMW, VW, dan Mercedes. Namun, jika dibanding General Motors milik Amerika, yang memproduksi Chevrolet, Buick, Cadillac, dan beberapa merk lainnya, perusahaan-perusahaan mobil Jerman termasuk relatif kecil. Namun, ada satu kelebihan mereka, yakni mereka memproduksi komponen-komponen utama setiap mesin yang membuat mobil-mobil tersebut.

Dengan kata lain, mereka tidak memproduksi tampilan luar dari suatu produk, melainkan jeroannya, yakni komponen-komponen dalam dan amat penting, yang membuat semua mesin itu bisa memproduksi barang-

barang canggih. “Orang-orang Jerman membuat benda-benda yang ada di dalam mesin yang menghasilkan benda-benda lainnya, dan juga benda-benda yang ada di dalam benda-benda itu.” Apa yang bisa kita pelajari dari cara berpikir semacam ini?

Situasi Kita

Saat ini, di Indonesia, kita amat memperhatikan reputasi. Yang penting adalah apa yang tampak, apa yang dicitrakan ke masyarakat. Yang penting adalah kesannya, bukan isinya. Isi soal belakangan, bahkan seringkali tak jadi soal sama sekali.

Banyak orang sudah melakukan kritik pada pola semacam ini. Namun, pola ini tetap ada, tetap bersikukuh, seolah membandel, tak mau lepas. “Penyakit” pencitraan ini melanda berbagai segi kehidupan di Indonesia, terutama politik, budaya, dan bahkan juga pendidikan.

Yang kemudian terjadi adalah pencitraan tanpa isi. Gelar akademik berderet tanpa kemampuan nyata. Jas necis dan rapih tanpa kekuatan karakter. Tampilan klimis dan rambut licin, tanpa jati diri yang kokoh.

Yang terjadi kemudian adalah sebaliknya. Gelar akademik yang justru menandakan ketidakmampuan, yakni sikap patuh, tak kreatif, dan suka menipu. Jas necis dan rapih yang justru menandakan sikap licik dan korup. Mana ada koruptor yang bajunya berantakan? Mana ada koruptor kakap yang tidak mengenyam pendidikan tinggi? Semakin rapih bajunya, semakin wangi baunya, semakin berderet gelarnya, biasanya justru menandakan kesempatan korup yang juga semakin tinggi. Ironis.

Di dalam dunia pendidikan, penyakit pencitraan ini juga semakin kronis. Orang hanya mengejar ijazah, seringkali tanpa kemampuan yang nyata. Orang sekedar mengejar belajar di universitas atau sekolah beken, walaupun tempat itu korup, tak mutu, dan hanya tinggal nama besar saja.

Politik Jeroan

Sudah saatnya, kita mulai berpikir tentang “jeroan” di dalam hidup bersama kita. Saya menyebutnya sebagai politik jeroan. Seperti sudah kita tahu, jeroan adalah isi perut dari binatang yang sudah dijagal. Isi perut itu amat penting, supaya sistem-sistem biologis binatang tersebut bisa berfungsi normal. Tanpa isi perut itu, binatang tidak bisa melakukan apa-apa.

Politik Jeroan mengajak kita berpikir tentang apa yang ada di dalam, dan tidak sekedar memperhatikan pencitraan, atau sekedar apa yang tampak. Jeroan di dalam politik adalah kepemimpinan yang berpijak pada pengembangan martabat semua manusia dari semua latar belakang. Ketika jeroan ini rusak, maka pencitraan pun hanyalah sekedar penipuan.

Di dalam pendidikan, politik jeroan juga perlu untuk diciptakan. Dalam konteks ini, jeroan, atau isi perut, dari pendidikan adalah keutamaan dan ketrampilan diri manusia. Keutamaan berurusan dengan karakter dan jati diri. Sementara, ketrampilan terkait dengan sumbangan teknis manusia itu kepada masyarakatnya. Ketika politik jeroan di dalam pendidikan ini terlupakan, yang tercipta kemudian adalah orang-orang bergelar dan berijazah, namun korup, licik, penipu, oportunistis, dan tak bisa memberikan sumbangan yang baik untuk masyarakatnya.

Saya yakin, politik jeroan akan menghasilkan paradoks yang baik. Ketika orang berfokus pada apa yang ada di dalam, yakni jeroannya, atau politik jeroan, maka apa yang tampak pun akan koheren dengan apa yang ada di dalam. Artinya, fokuslah pada “jeroan-jeroan” di dalam hidupmu, maka pencitraan dan penampilan yang baik pun akan tercipta dengan sendirinya. Inilah paradoks politik jeroan.

Para penganut politik jeroan mungkin tidak wangi, tidak necis, tidak parlente. Akan tetapi, orang-orang sekitarnya tahu, bahwa ia orang yang trampil dan berkarakter kuat, lepas dari penampilannya yang sederhana. Orang-orang semacam inilah yang menghasilkan “komponen-komponen” utama yang membuat suatu masyarakat menjadi besar. Saya harap, suatu saat nanti, kita bisa menjadi bangsa yang “membuat orang-orang yang mampu mendorong orang-orang lainnya untuk menjadi orang-orang besar.” Inilah politik jeroan.***

Membangun Kesadaran Geopolitik

Banyak orang tidak suka berbicara soal politik. Bagi mereka, politik itu kotor. Banyak instrik, tipu menipu, dan permainan busuk lainnya. Orang berubah, jika mereka masuk ke dalam dunia politik. Pribadi yang jujur dan sederhana, ketika masuk dunia politik, berubah menjadi rakus dan suka menjilat penguasa.

Ini terjadi, karena di Indonesia, makna politik sudah bergeser, akibat tindakan-tindakan dari para politikus busuk yang biadab. Mereka mengubah kejujuran semata menjadi kata-kata manis tanpa aksi. Mereka mengubah konsep luhur perwakilan rakyat menjadi kesempatan untuk mengeruk keuntungan ekonomis. Tanggung jawab politis pun diubah menjadi sekedar kesempatan untuk menikmati “fasilitas” sebagai penguasa yang berhak untuk menindas rakyatnya.

Padahal, politik adalah panggilan luhur. Politikus dipanggil sebagai pemimpin masyarakat untuk menciptakan hidup yang lebih baik, tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi rakyat yang dipimpinnya. Dalam arti ini,

politik adalah tata kelola manusia-manusia yang berpijak pada seperangkat nilai tertentu yang dianggap luhur di dalam suatu masyarakat. Tanda keberhasilan politik adalah rapinya pengelolaan masyarakat, dan orang-orang yang ada di dalamnya semakin merasa manusiawi dan bermartabat.

Sebagai tata kelola yang berpijak pada seperangkat nilai yang dianggap berharga oleh masyarakat tertentu, politik jelas harus memperhatikan aspek geografis dan geologis yang ada. Tata kelola yang dilakukan harus memperhatikan letak tempat tinggal suatu masyarakat, iklim, serta situasi tanah maupun lingkungan yang ada secara keseluruhan. Di dalam kajian politik kontemporer, analisis semacam ini disebut juga sebagai geopolitik. Secara singkat, geopolitik adalah kajian atas kebijakan politik suatu negara dengan melihat pengaruh dari situasi geografis maupun geologis dari negara tersebut.

Kajian Geopolitik

Salah satu negara yang cukup maju di dalam kajian geopolitik adalah Jerman. Dalam kajian geopolitik mereka, negara disamakan seperti manusia dan hewan, yang cara hidupnya amat ditentukan oleh keadaan geografis maupun geologis sekitarnya. Secara normatif, dalam konteks ini, tata kelola politik haruslah terkait erat dengan situasi geografis maupun geologis alamiah yang ada. Hanya dengan begitu, kehidupan suatu negara bisa berkembang.

Friedrich Ratzel, pemikir Jerman, mencoba untuk memberi rumusan yang lebih jelas tentang geopolitik. Belajar dari Darwin dan Ernst Heinrich Haeckel, seorang zoolog (ilmu yang mempelajari perilaku binatang) asal Jerman, ia berpendapat, bahwa negara adalah suatu entitas organik yang bertumbuh, sama seperti makhluk hidup. Sehat atau tidaknya suatu negara amat ditentukan dari sejauh mana ia memiliki hubungan yang baik dengan ekosistem sekitarnya, yakni dengan keadaan geografis dan geologis sekitarnya.

Ada hubungan yang bersifat mendalam dan spiritual antara negara dengan tanah tempatnya berpijak. Negara yang berkembang melampaui batas-batas teritorinya adalah negara yang sehat, yakni negara yang mampu menciptakan hubungan yang erat, bahkan spiritual, dengan tanah tempatnya berpijak. Sementara, negara yang statis dan anarkis, yakni yang

gagal membangun hubungan yang mendalam dan spiritual dengan ekosistemnya, adalah negara gagal.

Pada 1869, Karl Haushofer, ilmuwan geopolitik Jerman, mendirikan jurnal khusus ilmu geopolitik, yakni *Zeitschrift für Geopolitik*, atau Jurnal untuk Geopolitik. Geopolitik pun berkembang sebagai kajian ilmiah. Sayangnya, pada perang dunia kedua, geopolitik kerap dijadikan dasar ideologis bagi kebijakan-kebijakan politik NAZI Jerman. Argumennya begini, setelah sebuah negara bertaut erat dengan ekosistem sekitarnya, maka ia juga berhak untuk mengembangkan ekosistemnya. Ekspansi militer untuk mendirikan imperium dunia pun, dengan demikian, juga bisa dibenarkan. Hubungan antara NAZI Jerman dan geopolitik pun sampai sekarang masih menjadi pertanyaan banyak ilmuwan.

Kesadaran Geopolitik

Ilmu geopolitik mengajarkan pada kita, bahwa sebuah masyarakat dan negara harus memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan ekosistem tempat ia hidup. Inilah yang saya sebut sebagai kesadaran geopolitik (*Geopolitiksbewußtsein*). Dengan kesadaran geopolitik semacam ini, sebuah masyarakat dan negara akan hidup dalam harmoni erat dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sosial (budaya, tradisi), maupun lingkungan alam natural (geografis dan geologis). Inilah yang, menurut saya, menjadi kunci kemajuan sebuah negara.

Dari kesadaran geopolitik yang ada, sistem pun dibangun, mulai dari sistem pendidikan, sistem tata kota, sistem ekonomi, sistem agama, sampai dengan sistem politik. Karena berjalan sesuai dengan ekosistem yang ada, maka sistem-sistem tersebut akan cocok dengan masyarakat, sehingga semuanya berjalan lancar dan nyaman. Kehidupan bersama pun akan berjalan lancar, tanpa konflik yang mengguncang. Salah satu pendorong utama kemajuan sebuah negara adalah cocoknya sistem-sistem yang dibangun dengan ekosistem masyarakat tersebut.

Saya ambil contoh di Jerman. Sebagai negara subtropis, dengan iklim yang dingin, terutama pada musim dingin, orang tidak banyak bisa beraktivitas di luar ruangan, kecuali pada saat musim panas. Sistem yang ada pun dibuat dengan menyesuaikan iklim tersebut, misalnya pendidikan di dalam ruangan, perpustakaan raksasa dengan jutaan buku yang berada dalam ruang dengan penghangat raksasa, serta gedung-gedung pelayanan

publik yang besar dan hangat untuk menunjang berbagai aktivitas politik. Dengan kata lain, semua sistem yang ada dibuat efektif, mekanis, otomatis, dan efisien dengan memaksimalkan aktivitas di dalam ruangan, sesuai (kompatibel) dengan situasi ekosistem dingin yang ada.

Kesadaran geopolitik pun juga melahirkan kultur dan perilaku yang khas. Di Jerman, misalnya, situasi ekosistem yang dingin melahirkan beberapa kebiasaan yang khas, seperti berjalan cepat (karena menghindari dingin), tepat waktu (tidak mau membuang-buang waktu di luar ruangan), suka membaca buku di rumah atau di kamar (juga karena cuaca yang amat mendukung untuk itu, daripada ngerumpi di luar), dan sebagainya. Ekosistem yang khas melahirkan cara yang khas untuk menanggapi ekosistem tersebut, terbentuklah kultur, lalu menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang menjadi gerak badan, seperti jalan cepat, bekerja cepat, disebut oleh Pierre Bourdieu, seorang pemikir Prancis, sebagai *Hexis*.

Situasi Indonesia

Lalu bagaimana dengan situasi Indonesia? Indonesia jelas memiliki ekosistem yang khas, yakni iklim tropis, dengan mayoritas wilayahnya adalah laut. Sudahkah bangsa kita memiliki kesadaran geopolitik? Sudahkah kebijakan-kebijakan yang kita buat sebagai bangsa sudah bertaut erat dengan ekosistem tropis dan wilayah laut kita? Saya rasa tidak.

Alih-alih memahami keadaan ekosistem bangsa sendiri, Indonesia justru meniru negara Barat, misalnya dengan membangun gedung-gedung yang minim jendela (sehingga harus menggunakan AC dan listrik yang berlebih), kelas-kelas pendidikan yang tertutup, serta sistem transportasi laut yang amat tak layak dan mahal (kita adalah negara kelautan; sebagian besar wilayah kita adalah laut). Padahal, jelas sekali, bahwa ekosistem Indonesia berbeda jauh dengan negara-negara Barat yang mayoritas adalah negara subtropis. Seluruh paradigma pembangunan di Indonesia tidak berpijak pada kesadaran geopolitik yang kokoh, sehingga semuanya tidak cocok dengan situasi masyarakat dan alam yang nyata.

Kultur pun juga demikian. Kita tidak memperhatikan ekosistem kita sendiri, tidak memiliki kesadaran geopolitik, akhirnya, kita pun meniru negara lain yang notabene memiliki ekosistem (geopolitik) yang berbeda. Misalnya, pada saat acara-acara penting, kita diharuskan menggunakan jas resmi. Bayangkan, kita harus memakai jas setebal itu di negara dengan iklim

tropis yang panas? Jas cocok untuk negara-negara dingin, dan sama sekali tidak cocok untuk negara tropis.

Sistem pendidikan di kelas tertutup pun juga sebenarnya tidak cocok dengan ekosistem kita yang hangat. Angkutan umum kita juga mobil-mobil tertutup dengan sedikit jendela, padahal cuaca panas sekali. Di negara-negara tropis, menurut saya, dengan memperhatikan kesadaran geopolitik, kelas-kelas pendidikan harus dibuat semi terbuka, dengan udara terbuka yang segar. Mobil-mobil pun juga harus dibuat dengan jendela besar yang memungkinkan gerak udara secara leluasa.

Sebagai bangsa, kita tak memiliki kesadaran geopolitik. Akibatnya, kita pun latah ingin menjadi seperti negara lain. Identitas kita sebagai bangsa rapuh dan terbelah, karena kita tak memiliki kesadaran geopolitik yang kokoh. Akibatnya, hidup menjadi tak nyaman. Hidup bersama pun dipenuhi dengan gesekan konflik sosial yang tak perlu ada. Orang menderita hidup di tanah kelahirannya sendiri.

Langkah Ke Depan

Yang perlu dilakukan sekarang adalah memahami ekosistem tempat kita hidup dan berkembang. Kita perlu membangun dan mengembangkan kesadaran geopolitis yang kokoh di seluruh bidang kehidupan. Dengan kesadaran geopolitik tersebut, kita bisa mulai menata ulang sistem-sistem yang ada, supaya sesuai dengan keadaan ekosistem yang kita miliki. Kita pun bisa menata ulang kultur kita sebagai bangsa, supaya juga sejalan dengan keadaan geopolitik yang kita punya.

Orang bilang, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat ekonominya. Menurut saya, itu pendapat yang amat salah. Kemajuan suatu bangsa diukur dari sejauh mana bangsa kita memiliki identitas yang jelas dan tegas terkait dengan ekosistemnya (alam maupun sosial), lalu membangun seluruh sistem tata kelola hidup bersama dan kultur yang sesuai (kompatibel) dengan keadaan ekosistem tersebut. Kemajuan ekonomi hanyalah konsekuensi logis dari kejelasan dan ketegasan identitas nasional suatu bangsa. Bagaimana menurut anda?

Mengolah Jiwa

Biasanya, ketika berbicara tentang jiwa, orang berbicara tentang sesuatu yang abstrak. Jiwa itu tak kelihatan, maka orang menganggapnya terlalu rumit. Bahkan, beberapa ilmuwan menyatakan, bahwa jiwa adalah konsep tua yang tak lagi layak dipakai. Mereka lebih suka menggunakan konsep pikiran, daripada jiwa.

Pada hemat saya, untuk kepentingan praktis, kita tak perlu membuat pembedaan yang berlebihan. Kita bisa memikirkan jiwa sebagai suatu bentuk “pikiran”. Memang, jiwa memiliki kesan metafisis yang tinggi. Sementara, konsep pikiran lebih terkait dengan aspek biologis manusia, yakni organ tubuhnya. Namun, kedua sama dalam hal yang mendasar, yakni keduanya berbeda dengan tubuh, dan dianggap sebagai penggerak utama dari hidup manusia, termasuk dari tubuh itu sendiri.

Kecemasan Hidup

Di dalam hidupnya, jiwa manusia seringkali mengalami kecemasan. Ketakutan dan kekhawatiran menjadi makanan sehari-hari dari jiwa. Tuntutan pekerjaan, ketakutan akan pemecatan, kekhawatiran akan masa depan, semuanya siap untuk merusak ketenangan jiwa. Ketika jiwa tersiksa,

maka orang tidak akan dapat hidup maksimal. Ia tidak akan bisa menjadi pelayan sejati, yakni manusia untuk manusia lainnya (*men for others*).

Apa sumber dari siksaan jiwa manusia? Orang Jerman punya istilah menarik tentang ini, yakni *das Sein* dan *das Sollen*. *Das Sein* adalah apa yang secara nyata terjadi. Sementara, *das Sollen* adalah apa yang seharusnya terjadi, atau apa yang kita harapkan terjadi. Celah antara dua hal ini, yakni antara apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang kita harapkan terjadi, inilah yang membuat jiwa kita tersiksa.

Kita berharap, setelah selesai sekolah, kita mendapatkan pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Inilah *das Sollen* yang kita bangun. Namun, nyatanya, saya harus menunggu cukup lama untuk mendapat pekerjaan. Ketika mendapatkannya pun, pendapatannya terlalu kecil, sehingga tak cukup untuk hidup saya. Inilah *das Sein*. Dijepit oleh situasi semacam ini, jiwa kita pun tersiksa.

Ketika jiwa tersiksa, maka lahirlah berbagai rasa negatif di dalam diri kita. Kecemasan mewarnai hari-hari. Ketakutan akan hal-hal yang tidak pasti membuat kita tak bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Hidup terasa sebagai keterpaksaan. Kematian melalui bunuh diri pun menjadi sebuah kemungkinan yang nyata.

Ironisnya, itulah situasi hidup banyak orang di masyarakat modern. Hidup mereka terombang ambing antara ketakutan satu dan ketakutan lainnya. Kecemasan dan ketakutan bagai iklan yang mengisi hari-hari mereka. Di dalam tempaan suasana menyiksa semacam itu, kegembiraan bagaikan titik sesaat yang akan segera berlalu. Kesejatian diri dan kebahagiaan yang sesungguhnya bagaikan belut yang selalu lolos dari genggaman tangan.

Pengolahan Jiwa

Pada titik ini, filsafat, sebagai ilmu yang berusaha merefleksikan seluruh kenyataan hidup manusia secara mendalam, bisa berperan. Sebagian orang berpendapat, bahwa filsafat itu rumit. Namun, seperti berulang kali dinyatakan oleh Bambang Sugiharto, filsuf asal Bandung, hidup yang tak tertata, yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan, jauh lebih rumit dan menyusahkan, daripada belajar filsafat itu sendiri. Filsafat sebagai ilmu berpikir dan reflektif tentang seluruh kenyataan hidup

manusia adalah awal dari kejernihan, dan kejernihan adalah awal dari kebahagiaan.

Langkah awal mengolah jiwa adalah dengan melihat ke dalam diri kita sebagai manusia. Di dalamnya, kita akan melihat setidaknya dua hal. Yang pertama adalah jati diri kita yang dibentuk oleh lingkungan sosial kita. Di dalamnya terdapat kebiasaan-kebiasaan kita, baik dalam konteks kebiasaan yang tampak dalam perilaku sehari-hari, maupun kebiasaan-kebiasaan yang terlihat di dalam cara berpikir kita, ketika menanggapi sesuatu. Saya menyebut ini sebagai jati diri sosial (*social self*).

Jati diri sosial adalah bagian dari diri kita yang bekerja sehari-hari. Ia adalah sumber dari semua perilaku dan kebiasaan kita, baik yang baik, maupun kebiasaan yang buruk. Ia juga adalah sumber dari cara berpikir kita, ketika kita menanggapi setiap peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa yang jelek, maupun yang menyenangkan. Semua ini lahir dari lingkungan sosial yang telah membentuk kita, semenjak kita kecil.

Namun, manusia tak hanya dibentuk secara sosial. Para filsuf sepanjang sejarah sudah menyatakan, ada sesuatu yang lebih mendasar dan lebih sejati daripada jati diri sosial setiap manusia. Mereka menyebutnya dengan macam-macam konsep, seperti *transcendental unity of apperception*, *ego posits*, dan sebagainya. Jati diri ini melampaui semua bentukan sosial, dan bersifat sejati, permanen, serta menjadi “esensi” dari manusia. Tidak ada bahasa yang cukup kaya untuk menggambarkan kerumitan sekaligus kekayaan dari jati diri sejati manusia ini.

Peristiwa sehari-hari yang terjadi pada kita, terutama yang membuat jiwa kita merasa tersiksa dan kecewa, sebenarnya terjadi pada jati diri sosial kita, yakni jati diri yang dibentuk oleh lingkungan sosial kita. Segala hinaan, kekecewaan, dan kebahagiaan dialami secara bergantian oleh jati diri sosial kita. Cara kita bersikap pada pelbagai peristiwa, baik itu dengan rasa kecewa ataupun senang, juga dialami oleh jati diri sosial kita.

Pada titik ini, yang perlu diingat adalah, bahwa jati diri sosial itu bersifat semu dan relatif. Keberadaannya amat rapuh, dan bisa diubah sesuai dengan keinginan dan kepentingan kita, selama kita menyadarinya. Untuk menjadi bahagia, kita perlu untuk menyadari keberadaan jati diri sosial ini, dan mengambil jarak darinya. Ketika kita sedih ataupun senang, kita harus sadar, bahwa yang sesungguhnya merasa sedih dan senang adalah bentuk sosial dalam diri kita, yakni jati diri sosial itu sendiri.

Misalnya, anda mendapat bonus dari kantor anda. Apa perasaan anda? Senang bukan? Perasaan senang anda adalah bentuk sosial yang berasal dari rumusan berikut; jika menerima uang atau penghargaan, jadilah senang. Itu sesuatu yang diajarkan oleh kita oleh lingkungan sosial kita, dan akhirnya menjadi kebiasaan di dalam diri kita. Dengan kata lain, kita hidup sehari-hari dengan kebiasaan dan cara berpikir maupun bersikap yang dibentuk oleh masyarakat kita.

Contoh lainnya. Di Surabaya, tempat saya bekerja, orang terbiasa berbicara dengan suara keras. Tidak ada orang yang tersinggung, karena lawan bicaranya berbicara dengan suara keras. Namun, jika orang yang berasal dari luar Surabaya berbicara dengan orang Surabaya, dan kebetulan menggunakan suara keras, maka kemungkinan besar, mereka akan tersinggung, karena di tempat lain, berbicara keras adalah tanda kurang ajar. Tanggapan terhadap suara keras pun dibentuk oleh lingkungan sosial kita.

Keberadaan jati diri sosial ini, yang bisa merasa senang sekaligus takut, haruslah disadari terlebih dahulu. Inilah langkah awal pengolahan jiwa. Setelah disadari, orang harus mengambil jarak dari jati diri sosial ini. Ia harus sadar, bahwa ketika ia merasa senang, yang sesungguhnya senang adalah jati diri bentukan lingkungan sosialnya. Sebaliknya, ketika ia merasa sedih, yang sesungguhnya sedih adalah jati diri sosial yang juga adalah bentukan sosialnya.

Setelah orang memahami gerak jati diri sosial di dalam dirinya, perlahan namun pasti, ia akan menyentuh jati diri sejatinya, yang bersifat esensial, dan melampaui bentukan sosial. Sekali lagi, tidak ada bahasa yang cukup rumit untuk mendefinisikan jati diri sejati ini. Para mistik di berbagai tradisi religius maupun filosofis berupaya menggambarannya dengan cerita, karena tidak ada satu kata yang bisa menggambarannya secara tepat.

Ketika kita menyentuh diri sejati kita, dan mengambil jarak dari semua gejolak emosional yang diciptakan oleh jati diri sosial kita, maka kita akan hidup dalam kebebasan yang sejati. Kita tidak lagi merasa sedih ataupun senang, karena hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Yang dirasakan bukan lagi gejolak emosi sesaat, entah itu senang ataupun sedih, melainkan ketenangan yang sesungguhnya, yang bisa juga disebut sebagai kebahagiaan. Hinaan maupun pujian tidak lagi membuat emosi kita

bergejolak, karena kita sadar, bahwa itu semua ditujukan untuk jati diri sosial kita yang rapuh dan semu.

Pelayanan yang Sejati

Mekanisme pengolahan jiwa inilah yang membawa orang pada kesadaran sejati, dan tidak lagi dibuat susah oleh gejolak kehidupan yang terus berubah. Dengan cara ini, orang bisa jadi pribadi yang lebih reflektif, karena ia terus sadar apa yang terjadi di dalam jiwanya. Tindak melayani yang sejati terletak pada kebebasan diri, bukan emosi. Ketika orang sudah menyentuh jati diri sejatinya, dan menjaga jarak dari jati diri sosialnya, ia akan bisa melayani dengan bebas dan efektif.

Ia tidak melayani untuk mencari nama baik. Ia tidak melayani untuk bisa diterima di lingkungan sosialnya. Terlebih, ia tidak melayani untuk menjilat Tuhan, supaya diberikan hadiah oleh Tuhan. Ia melayani, karena tindakan itu sendiri sesuai dengan dorongan diri sejati yang ada di dalam jiwanya. Ia tidak membutuhkan pamrih, karena ia sadar, itu semua hanya kebutuhan dari jati diri sosial yang semu dan mudah berubah.

Ketika melayani, ia tidak merasa terhina, ketika gagal, atau ditolak dengan kasar. Ketika melayani, ia tidak merasa lelah, karena tidak ada orang yang menghargainya, karena ia memang tidak mencari penghargaan. Ketika bekerja dan melayani, ia tidak takut oleh ancaman, karena ia tahu, semua ancaman itu ditujukan pada jati diri sosialnya yang bersifat rapuh dan semu. Ia akan menjadi pelayan yang sejati, yang melayani dengan spiritualitas yang sejati, bukan dengan kepentingan sesaat, mencari nama baik, apalagi untuk menjilat Tuhan.

Gelembung Pendidikan

Di tengah berbagai krisis bangsa, kita selalu menaruh harapan pada dunia pendidikan. Harapannya, dengan pendidikan yang bermutu, anak-anak kita akan menjadi pemimpin bangsa yang lebih baik untuk Indonesia di masa depan. Harapan itu, pada hemat saya, amat masuk akal. Percuma kita membenahi segala bidang kehidupan bersama, tetapi mengabaikan pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah kunci utama untuk menjadi bangsa yang berkarakter, yakni bangsa yang maju budaya serta peradabannya.

Namun, apa metode yang tepat untuk mendidik anak-anak kita? Jawaban atas pertanyaan ini mengajak kita untuk kembali ke lebih dari dua ribu tahun yang lalu, yakni ke dalam perdebatan antara Aristoteles dan Plato, gurunya, tentang pendidikan. Secara sederhana, Plato, dengan menggunakan mulut Sokrates di dalam tulisan-tulisannya, berpendapat, bahwa pendidikan adalah soal intelektualitas. Untuk menjadi baik berarti memahami sungguh apa artinya baik. Jika orang belum menjadi baik, maka ia tidak paham arti sesungguhnya dari baik itu sendiri.

Sementara itu, bagi muridnya, Aristoteles, intelektualitas semata tidaklah cukup. Memahami arti kata jujur tidak otomatis membuat orang jujur. Bahkan, pengertian sejati tentang kata jujur pun juga belum cukup

untuk membuat orang menjadi jujur di dalam tindakannya sehari-hari. Kunci pendidikan adalah membentuk kebiasaan (*habituation*), sehingga akhirnya menjadi karakter. Untuk menjadi jujur, orang perlu dikondisikan dan dibiasakan untuk menjadi jujur, sehingga akhirnya kejujuran sungguh menjadi bagian utuh dari dirinya.

Situasi Indonesia

Pada hemat saya, dua pandangan ini juga menjadi inti perdebatan dunia pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, ada pandangan yang melihat pendidikan sebagai proses untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan pengetahuan serta informasi. Dalam konteks ini, penelitian amatlah penting untuk dilakukan. Pendidikan adalah proses membagi hasil penelitian kepada siswa, dan kepada masyarakat luas.

Di dalam pandangan ini, proses analisis adalah bagian utama dari pendidikan. Pendidikan berarti melihat dunia, dan membaginya ke dalam bagian-bagian kecil (analisis) dengan tujuan untuk memahaminya. Kunci utama pendidikan adalah pemahaman yang benar yang didasarkan pada informasi, penelitian, dan pengetahuan yang juga benar. Namun, sayangnya, pandangan ini, walaupun terkesan ilmiah dan masuk akal, punya kelemahan yang amat fundamental.

Yang pertama, informasi ilmiah hasil dari analisis sering hanya berhenti semata menjadi pengetahuan, hanya olah intelektual, tanpa mampu mengubah pandangan hidup seseorang. Orang bisa amat cerdas menyerap beragam informasi ke dalam dirinya, tanpa mengalami perubahan cara berpikir atas dirinya sendiri dan hidup yang dijalaninya. Ini pula yang menjelaskan, mengapa banyak teroris adalah orang-orang yang amat cerdas secara intelektual, namun mampu melakukan perbuatan kejam dengan membantai orang-orang yang tak bersalah.

Tumpukan informasi dan pengetahuan juga tidak mengubah perilaku seseorang. Orang bisa menyebutkan makna kejujuran dari beragam agama dan pemikiran para filsuf, sambil terus melakukan korupsi. Informasi pada akhirnya menjadi tumpukan sampah di kepala yang tidak mendorong perubahan cara berpikir, apalagi perubahan perilaku sehari-hari. Pada titik ini, kita perlu mempertimbangkan pandangan kedua.

Pandangan kedua menyatakan, bahwa informasi dan pengetahuan tidak cukup, tetapi juga harus sampai pada pengkondisian nilai-nilai hidup,

sehingga akhirnya pengetahuan dan informasi menjadi nilai-nilai keutamaan yang membawa perubahan cara berpikir, dan juga membawa perubahan perilaku sehari-hari. Inilah yang menurut saya menjadi inti dari pendidikan karakter. Akan tetapi, apakah pendidikan semacam ini sudah ideal? Saya melihat setidaknya satu kelemahan mendasar di dalam pendidikan semacam ini.

Dasar dari pendidikan adalah kebebasan. Informasi dan pengetahuan digunakan untuk memperbesar kebebasan manusia di hadapan alam, sehingga ia tidak lagi tunduk patuh pada hukum-hukum alam semata, tetapi bisa bersikap kritis, dan turut serta di dalam menciptakan masyarakat, maupun alam. Konsep pengkondisian dan pembiasaan berusaha membentuk manusia seturut dengan hukum-hukum sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan cara ini, eksistensi manusia disempitkan semata menjadi alat-alat masyarakat, dan kehilangan martabat yang dicirikan melalui kebebasannya.

Penyadaran

Di tengah perdebatan antara paradigma pendidikan Aristotelian (pembiasaan dan pengkondisian) dan Platonian (pengetahuan), saya ingin menawarkan satu pandangan, yakni pendidikan sebagai penyadaran (*to be aware*). Untuk menjalani proses penyadaran ini, orang harus belajar melupakan semua informasi maupun pengetahuan yang telah ia peroleh. Ia juga perlu berhenti menganalisis segala peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Orang harus belajar untuk *unlearn*.

Setelah semua informasi dan pengetahuan ditunda, dan pola berpikir analisis dihentikan, pendidikan harus mengajak orang untuk merasa, yakni merasa dengan keseluruhan eksistensi diri. Kejujuran tidak lagi sekedar konsep ataupun informasi, melainkan menjadi “rasa kejujuran” yang menempel di dalam seluruh diri. Kemurahan hati tidak lagi sekedar kebiasaan, yang sebelumnya dilatih dalam proses pengkondisian, melainkan menjadi gerak keseluruhan diri yang muncul dari perasaan yang mendalam tentang realitas itu sendiri.

Pada titik ini, pendidikan tidak lagi soal menghafal fakta, atau membangun kebiasaan, melainkan soal membangkitkan kesadaran diri manusia terhadap diri dan lingkungannya. Untuk melahirkan kesadaran semacam ini, orang perlu belajar untuk berhenti belajar (*unlearn*), dan

melepaskan diri dari segala pola kebiasaan yang mencekik diri. Kesadaran mengubah cara orang di dalam melihat dunianya. Dan dengan itu, kesadaran mengubah seluruh diri manusia. Ia menjadi manusia yang bebas, bermartabat, sekaligus aktif membangun dunia dengan kebebasannya.

Ia tidak lagi menjadi bank informasi, yang hanya pandai menyerap dan memuntahkan informasi belaka. Ia tidak lagi menjadi robot-robot hasil bentukan lingkungan sosialnya melalui proses pembiasaan yang dilakukan secara rutin dan sistematis, sehingga menjadi pribadi yang tak mampu berpikir kritis, apalagi mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Membangun kesadaran berarti menolak untuk tunduk pada satu atau dua pola pendidikan yang seringkali memenjara jiwa, melainkan melihat realitas apa adanya dengan segala rasa yang ada di dalam eksistensi diri manusia, lalu bertindak atas dasar rasa serta kebebasan itu.

Kualitas sebuah bangsa tidak dilihat dari tingkat ekonominya semata, tetapi dari kualitas pribadi orang-orang yang ada di dalamnya. Pribadi yang mirip bank informasi dan robot-robot patuh tidak akan membawa peradaban ke arah keagungannya, melainkan justru merusaknya. Pendidikan di Indonesia perlu menjadikan kesadaran sebagai jantung hati paradigma maupun kebijakan-kebijakannya. Hanya dengan begitu, kita bisa membangun harapan yang konkret akan masa depan yang lebih baik dan bermartabat untuk anak-anak kita.

Gelembung Kota Jakarta

Saat ini, saya sedang menetap di Jakarta. Hampir setiap hari, saya berkeliling kota untuk melihat keadaannya sekarang. Sambil jalan, mengamati, menganalisis, membuat alternatif solusi, saya juga sekalian nostalgia. Saya tumbuh dan besar di kota yang besar sekaligus kacau ini.

Setelah beberapa kali berkeliling, muncul beberapa ide dalam kepala saya untuk membenahi Jakarta. Kebetulan, Jakarta sedang melaksanakan pemilihan Gubernur, dan salah satu kandidatnya amat potensial untuk memperbaiki Jakarta. Siapa itu? Tebak sendiri, yang pasti bukan orang lama. Ada tujuh langkah praktis yang, pada hemat saya, bisa dengan segera dilakukan oleh gubernur terpilih selanjutnya.

Membenahi Pasar

Yang pertama adalah membenahi pasar. Banyak pasar di Jakarta, mulai dari Pasar Klender, Pasar Minggu, Pasar Senen, sampai dengan Pasar Pramuka. Mayoritas tempatnya jorok, dan tidak punya tempat parkir resmi. Pelayanannya juga tidak profesional.

Ini yang, pada hemat saya, harus segera dibenahi. Untuk mengurangi kemacetan, pasar-pasar tersebut harus segera dibuatkan tempat parkir yang layak. Hampir semua pasar yang saya kunjungi menggunakan jalan raya sebagai tempat parkirnya, karena mereka tidak memiliki tempat parkir yang layak. Akibatnya, jalanan makin sempit, dan kita semua terjebak dalam kemacetan.

Tempat parkir yang layak itu harus aman, bersih, dan, yang pasti, tidak memakan jalan raya, atau trotoar. Tempat parkir itu bisa berupa gedung bertingkat, atau basement pasar. Saya amat yakin, jika semua pasar di Jakarta diberikan tempat parkir yang resmi dan aman, maka kemacetan akan jauh berkurang. Saya juga yakin, Pemda DKI, bersama dengan jajaran swasta dan masyarakat sipil, punya cukup uang untuk melakukan ini semua.

Pasar-pasar yang banyak sekali jumlahnya itu juga harus diperbaiki. Gedungnya harus bersih. Para pedagangnya harus mengenakan seragam yang profesional. Mereka juga harus diberikan pelatihan soal melayani konsumen secara baik, serta pelatihan pembukuan dasar untuk bisnis mereka. Sejalan dengan ini semua, keberadaan mall haruslah dibatasi, karena di Jakarta sudah terlalu banyak mall. Katakan cukup pada mall!!!

Membenahi Angkutan Kota

Langkah kedua adalah membenahi angkutan kota. Pemda harus mewajibkan secara keras, bahwa semua angkutan kota hanya boleh berhenti di halte dan terminal saja, kecuali taksi dan bajaj. Jika ini tidak dipatuhi, maka ijin trayeknya harus segera dicabut. Pemerintah perlu untuk amat tegas dalam soal ini. Konsekuensi logisnya, halte dan terminal harus diperbaiki, sehingga layak sebagai tempat tunggu penumpang yang akan menggunakan angkutan kota.

Langkah ketiga adalah peremajaan angkutan kota. Semua angkutan kota, termasuk taksi dan bajaj, harus diganti yang baru, yang bersih dan layak beroperasi di jalan raya. Semua alat transportasi publik yang sudah rusak harus diperbaiki, atau diganti dengan yang baru. Supir angkutan kota harus mengenakan seragam dan kartu tanda pengenalan resmi sebagai bagian dari profesionalitas pelayanan mereka.

Jika layanan transportasi umum sudah baik, supirnya profesional, angkutan kotanya bersih dan tepat waktu, serta tidak menimbulkan kemacetan-kemacetan yang tidak perlu, karena ngetem di sembarang

tempat, maka orang pasti akan tertarik menggunakan transportasi publik. Mereka tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, apalagi jika pemerintah daerah, setelah membuat angkutan kota dan transportasi publik alternatif yang nyaman (MRT, trem, atau kereta bawah tanah), memutuskan untuk menaikkan pajak kendaraan pribadi.

Lalu Lintas dan Kebersihan

Langkah keempat adalah dengan memperbaiki kinerja para penegak hukum lalu lintas. Para polisi lalu lintas harus dibuat berwibawa dengan membentuk citra anti suap, dan konsisten dalam menegakkan aturan lalu lintas di jalan raya, tanpa ragu. Pengendara motor tanpa helm dan kebut-kebutan tidak lagi dibiarkan begitu saja, seperti sekarang ini.

Pengendara mobil yang suka ngebut, dan dengan demikian membahayakan nyawa pengguna jalan lainnya, juga harus ditindak tegas, ditilang, didenda, atau disita kendaraannya. Ini semua harus dilakukan 24 jam non stop, 7 hari seminggu, oleh polisi lalu lintas yang memiliki otoritas, dan militan dalam menegakkan aturan. Gubernur bersama seluruh jajaran polisi lalu lintas harus memastikan semua proses ini terlaksana.

Salah satu masalah terbesar Jakarta sekarang ini adalah banjir. Hampir setiap tahun selalu terjadi banjir. Penyebab utama terjadinya banjir adalah sampah, yakni banyaknya sampah yang tertimbun di saluran-saluran air kota, sehingga menghalangi gerak air, dan akhirnya airnya menguap. Dalam konteks ini, langkah kelima yang perlu diambil adalah membuat tempat sampah yang layak dan bersih di seluruh penjuru kota Jakarta.

Ini juga terhubung dengan langkah keenam, yakni menerapkan secara pasti aturan denda untuk orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Sekali lagi, aturan ini harus dipastikan berjalan oleh para penegak hukum, karena merekalah yang paling memiliki otoritas untuk melakukannya. Sanksi lain bagi orang yang buang sampah sembarangan juga perlu dipikirkan, seperti kerja sosial, dan sebagainya.

Kerja Bakti dan Solidaritas

Langkah ketujuh adalah dengan mengadakan kerja bakti bersama seluruh warga kota Jakarta, minimal dua minggu sekali. Gubernur, walikota, dan camat harus menjadi figur utama yang mendorong kegiatan ini. Mereka harus secara konsisten turun ke lapangan untuk ikut kerja bakti bersama

rakyat. Di satu sisi, kegiatan ini meningkatkan solidaritas antar warga kota. Di sisi lain, kegiatan ini bisa membersihkan kota, sehingga kota terlihat lebih indah, bersih, dan tidak lagi banjir.

Tujuh langkah praktis ini, jika diterapkan, akan membawa perubahan yang lebih baik untuk kota Jakarta. Tentu saja, masih ada langkah-langkah lainnya. Namun, jika gubernur terpilih langsung bekerja mewujudkan tujuh hal ini, maka rakyat pasti akan sangat puas. Saya tidak hanya menganjurkan, tetapi bersedia langsung turun ke lapangan untuk membantu gubernur terpilih melaksanakan program-program ini.

Pada hemat saya, tujuh langkah ini tidak hanya berlaku untuk Jakarta, tetapi juga untuk kota-kota lainnya. Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Malang, dan berbagai kota lainnya bisa mengikuti tujuh langkah ini dengan menyesuaikan konteks masing-masing tempat. Jika gubernur di Jakarta, dan semua pemimpin pemerintahan kota-kota lainnya, menjalankan minimal tujuh langkah ini, saya yakin, kita semua akan lebih betah tinggal di Indonesia. Kita tidak lagi berlomba menjadi TKI di negara lain, atau mencari kesempatan untuk hidup nikmat di negara lain dengan menelantarkan negara sendiri.

Gelembung Kesalehan

Pembantaian dan pembakaran di Sampang, Madura baru-baru ini sebenarnya bukan masalah baru. Untuk kesekian kalinya, masyarakat kita terjebak pada satu penyakit sosial yang akut, yakni tidak mampu hidup bersama di dalam keberagaman. Namun, sikap biadab itu tidaklah melulu berakar pada kejahatan manusia, melainkan pada niatnya untuk menjadi saleh. Orang-orang yang menyiksa, membunuh, dan membakar atas nama agama justru adalah orang-orang yang bercita-cita untuk menjadi orang saleh.

Paradoks Kesalehan

Dari kecil, kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang saleh. Kata saleh sendiri, di Indonesia, disamakan dengan kesalehan agama-agama. Setiap agama memiliki versi kesalehannya sendiri, yang seringkali tidak cocok dengan agama lainnya. Pada titik inilah masalahnya muncul; orang-orang saleh religius dikutuk untuk tidak bisa hidup bersama, karena mereka terperangkap dalam versi kesalehannya masing-masing.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saleh diartikan sebagai beriman dan rajin beribadah. Kata beriman dan rajin beribadah

mengandaikan ikatan pada tradisi religius tertentu. Dan setiap tradisi religius, agama, memiliki sikap tertutupnya masing-masing, terutama untuk mempertahankan keunikan ciri identitasnya. Pada titik ini, kita juga menemukan paradoks; semakin orang saleh dalam satu agama, semakin ia sulit untuk hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda, maka semakin ia tidak saleh.

Saya menyebutnya sebagai paradoks kesalehan, yakni semakin orang saleh, maka ia semakin kehilangan kesalehannya. Masalah ini semakin terasa, ketika kita hidup di dalam masyarakat multikultur. Dalam arti ini, kultur adalah bentuk-bentuk cara hidup, dan multikultur berarti ada banyak bentuk-bentuk cara hidup yang tersebar di dalam suatu masyarakat. Di dalam suatu masyarakat dengan beragam bentuk-bentuk cara hidup, orang-orang saleh akan sulit untuk menjadi “saleh”.

Keberagaman

Nyatanya, Indonesia adalah suatu bentuk masyarakat multikultur. Ada begitu banyak ragam cara hidup tersebar di Indonesia. Beragam cara hidup itu melingkupi beragam cara beragama, pilihan ideologi, selera, orientasi seksual, ras, suku, etnis, dan sebagainya. Ketidakmampuan untuk mentransendensi sikap saleh, yang seringkali khas dan eksklusif agama tertentu, justru akan bermuara pada penindasan atas orang-orang dengan bentuk-bentuk cara hidup yang berbeda. Sikap saleh yang naif dan tidak berpikir akan bermuara tidak pada kebaikan, melainkan sebaliknya, yakni pada kebengisan itu sendiri.

Satu-satunya cara untuk menciptakan hidup yang bermutu di masyarakat multikultur adalah dengan menjadi pribadi rileks dan moderat. Menjadi rileks berarti siap untuk tidak ngotot memperjuangkan apa yang benar menurut diri sendiri. Menjadi moderat berarti siap untuk menertawakan sikap-sikap ngotot yang tersebar di masyarakat, tanpa jatuh dalam sikap penghinaan. Sikap rileks dan moderat inilah yang, pada hemat saya, kurang tertanam di benak orang-orang Indonesia.

Kutukan dari orang-orang saleh adalah mereka justru akan menjadi bengis dan kejam, ketika sedang berusaha menjadi orang yang saleh. Satu-satunya cara untuk menghindari pola gelap semacam itu adalah dengan menjadi rileks dan moderat. Menjadi rileks dan moderat, dalam konteks ini, berarti siap melihat ironi dan komedi yang tersembunyi di balik sikap

ngotot, yang seringkali ditunjukkan oleh orang-orang saleh. Namun, bagaimana caranya untuk menjadi orang yang rileks dan moderat di tengah masyarakat multikultur, seperti Indonesia, sekarang ini?

Menjadi Rileks dan Moderat

Untuk bisa menjadi pribadi yang rileks dan moderat, kita perlu setitik relativisme dalam hidup. Berbeda dengan banyak orang di Indonesia, yang begitu terpesona akan kepastian, relativisme mengajarkan, bahwa hal-hal yang kita anggap mutlak di dalam dunia ini sebenarnya relatif, dalam arti tergantung pada konteks tempat, waktu, budaya, dan orangnya. Setitik relativisme baik untuk kesehatan jiwa, dan, tentu saja, kesehatan masyarakat itu sendiri.

Di tengah masyarakat yang begitu kaku dan terpesona pada kesalehan moral agama-agama, kesadaran akan perspektivisme baik untuk diperkenalkan. Dalam arti ini, perspektivisme adalah paham yang menyatakan, bahwa kebenaran di dunia manusia yang sementara dan cacat ini amat bergantung pada perspektif orang yang melihat. Perspektif adalah sudut pandang, dan sudut pandang setiap orang berbeda-beda satu sama lain, walaupun tetap bisa ditemukan irisan di antaranya.

Kesalehan tradisional religius, di dalam masyarakat multikultur, haruslah ditinggalkan. Yang kita perlukan kemudian adalah kesalehan 2.0, yakni kesalehan moral yang disertai dengan ciri rileks, moderat, dan relativisme. Kesalehan 2.0 ini, pada hemat saya, adalah salah satu keutamaan yang harus dipunyai setiap orang, supaya bisa hidup harmonis di dalam masyarakat multikultur, seperti Indonesia. Bagaimana menjelaskan kesalehan 2.0 ini?

Kesalehan 2.0

Kesalehan 2.0 bersikap rileks di hadapan segala kemutlakan dunia. Ia tidak menjadi pasrah dan menyerah, melainkan berjuang tanpa sikap ngotot yang seringkali bermuara pada kebengisan. Saleh 2.0 bukanlah fatalisme, yakni paham yang menyatakan, bahwa kita harus menyerah dan pasrah pada takdir serta gerak dunia, melainkan sebaliknya, yakni tetap berjuang untuk sebuah nilai, namun dengan sikap terbuka, dan dengan sedikit humor.

Dalam arti ini, orang-orang saleh 2.0 berhasil melampaui kesempatan berpikir orang-orang saleh tradisional-religius sebelumnya. Mereka mencari dan menemukan tujuan yang lebih tinggi, yang berhasil melampaui tata nilai eksklusif agama-agama kuno. Mereka bukanlah orang-orang dangkal, melainkan sebaliknya, mereka menjalankan hidup yang bermakna, dengan tujuan yang jelas dan layak untuk diperjuangkan, serta sehat jiwanya.

Orang-orang saleh 2.0 terhindari dari kutukan orang-orang saleh, karena mereka bersikap rileks dan moderat. Orang-orang Indonesia harus mulai melampaui niat kesalehan tradisionalnya, dan memeluk kesalehan 2.0 ini, karena ini adalah keutamaan yang membuat kita di Indonesia, sebagai masyarakat multikultur, bisa hidup bersama dalam perdamaian. Hanya dengan begitu, kita bisa sedikit menjamin, bahwa hal-hal traumatik dan negatif, seperti di Sampang kemarin, tidak terjadi lagi di masa depan.

Gelembung Kesesatan Berpikir

Mengapa bangsa kita sulit sekali untuk bergerak menjadi bangsa maju? Dalam arti ini, bangsa maju memiliki tiga ciri berikut, yakni kemakmuran ekonomis yang merata di seluruh warganya (kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin tipis), keadilan hukum dan jaminan atas hak-hak asasi bagi semua rakyat (lepas dari ras, suku, agama, ideologi, dan orientasi seksual), dan munculnya produk-produk dari bangsa tersebut, baik dalam bentuk barang ataupun jasa, yang berguna bagi banyak orang. Jika dilihat dari tiga indikator ini, maka jelas, bahwa bangsa Indonesia sama sekali belum bisa disebut sebagai bangsa maju.

Mengapa ini terjadi? Pada hemat saya, ini terjadi, karena kita mengalami kesesatan berpikir yang melanda berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Saya setidaknya menemukan enam kesesatan berpikir yang bisa dengan mudah ditemukan di dalam diri orang Indonesia pada umumnya, yakni cara berpikir teologis-mistik, kemalasan berproses/kultur instan,

logika jongkok, konformisme kelompok, tidak taat perjanjian, dan bekerja setengah hati.

Kesesatan Berpikir

Orang Indonesia pada umumnya senang sekali melompat ke ranah teologis-mistik, ketika berusaha menjelaskan hidupnya. Ketika ada masalah, ia tidak mencari akar masalahnya terlebih dahulu, melainkan melompat untuk melihatnya sebagai bagian dari Kehendak Tuhan atas dirinya. Ini terjadi, menurut saya, karena kemalasan berpikir mandiri dan rasional sebagai manusia, sehingga melemparkan segalanya ke Tuhan. Ini adalah sikap kekanak-kanakan. Selama kita masih melihat segala sesuatu dengan kaca mata teologis-mistik semacam ini, kita tidak akan pernah berhasil melampaui masalah-masalah konkret kehidupan yang kita hadapi sehari-hari.

Orang Indonesia juga malas sekali menempuh proses. Mereka cenderung mencari cara yang cepat dan praktis untuk sampai pada tujuan-tujuannya, walaupun cara-cara itu seringkali bersifat koruptif. Kita juga suka langsung berbicara penerapan, sebelum kita sungguh-sungguh menguasai suatu ilmu ataupun teknologi yang ada. Yang kemudian terjadi adalah, dalam jangka pendek, kelihatannya semua baik-baik saja. Namun, haruslah juga diingat, bahwa segala hal yang dibangun dengan cepat dan instan selalu rapuh, dan mudah hancur, ketika diterpa badai masalah kehidupan.

Di sisi lain, logika orang Indonesia adalah logika jongkok. Dalam arti ini, logika dapat dipahami sebagai segala upaya untuk menjelaskan mengapa suatu hal terjadi. Logika jongkok berarti ketidakmampuan untuk membedakan mana sebab dan mana akibat, sulit berpikir runtut, tidak mampu membangun argumentasi yang memadai, dan akhirnya salah mengambil keputusan. Penyakit logika jongkok ini dengan mudah ditemukan, mulai dari keputusan-keputusan politis tingkat tinggi, sampai kehidupan sehari-hari yang terkait dengan keputusan-keputusan kecil dalam hidup.

Setengah Hati

Orang Indonesia juga amat peduli pada tekanan kelompok. Banyak tindakan dilakukan bukan atas dasar kesadaran diri, melainkan atas dasar

“apa kata orang”, dan paksaan kelompok. Ketika diminta berpikir sendiri, dan membentuk pendapat pribadi, kita cenderung bingung. Tindakan yang lahir dari keterpaksaan hanya akan menghasilkan kekacauan di kemudian hari. Tak heran, banyak tindakan yang kita lakukan sehari-hari, karena didasarkan pada keterpaksaan, tidak memberikan dampak yang diinginkan. Yang terjadi kemudian adalah ketidakbahagiaan hidup.

Di sisi lain, orang Indonesia juga sulit sekali patuh pada peraturan dan perjanjian. Padahal, peraturan seringkali dibuat untuk keselamatan mereka sendiri, seperti misalnya peraturan lalu lintas, dan peraturan terkait kelestarian lingkungan. Namun, karena abai, mereka justru melanggarnya atas dasar alasan-alasan yang tidak masuk akal. Perjanjian yang telah dibuat pun seringkali dilanggar, juga karena alasan-alasan yang bodoh. Ketika banyak peraturan dan perjanjian dilanggar, ketika itu pula kehidupan bersama jadi kacau, karena banyak hal meleset dari tujuan.

Puncak dari semua ini, menurut saya, adalah tidak adanya kesungguhan hati di dalam menjalankan hidup. Banyak orang Indonesia tidak hidup sesuai dengan cinta dan passion-nya sebagai manusia, sehingga segalanya dilakukan dengan setengah hati. Bekerja tidak sungguh-sungguh. Bekerja tidak untuk mengembangkan diri dan dunia, melainkan semata untuk mengeruk keuntungan finansial belaka. Apapun yang dilakukan setengah hati hanya akan menyiksa diri, dan akhirnya akan menghasilkan hal-hal yang kualitasnya setengah pula.

“Enam kesesatan berpikir” ini saya peroleh dari pengalaman dan pengamatan saya, selama hidup dan bekerja dengan orang-orang Indonesia selama lebih dari 29 tahun ini. Kesesatan berpikir adalah sumber utama dari kesesatan tindakan, dan kesalahan dalam pembuatan kebijakan yang melanda berbagai bidang kehidupan di Indonesia dewasa ini. Langkah pertama adalah dengan menyadari adanya kesesatan-kesesatan berpikir ini di dalam pelbagai perilaku orang Indonesia. Baru dengan begitu, kita bisa mulai mengubahnya.

Gelembung Krisis Makna

Mengapa anda pergi kantor setiap pagi? Atau mengapa anda buka toko anda setiap pagi? Mengapa anda rela terjebak macet, dan tetap pergi bekerja? Mengapa anda pergi ke sekolah, atau ke kampus?

Mayoritas orang bekerja untuk mendapat uang, sehingga bisa hidup, dan menghidupi keluarganya. Kerja tidak memiliki makna pada dirinya sendiri, melainkan di luarnya, yakni uang, dan keluarga. Ada juga yang pergi ke kantor, karena sistemnya mengatakan begitu. Orang harus bekerja, dan itulah sistemnya. Itulah aturan yang tengah berlaku di masyarakat.

Orang-orang modern melakukan aktivitasnya bukan karena aktivitas itu bermakna, tetapi karena dipaksa oleh sistem yang ada di luarnya, karena kewajiban, atau karena “terpaksa” bertahan hidup. Kata “makna” sendiri pun semakin asing di pikiran orang-orang modern yang sudah terpesona dengan yang praktis, aplikatif, dan teknis.

Ketika orang tidak menemukan makna di dalam hidupnya, ia akan mengalami kekeringan hidup. Kebosanan dan kejenuhan menjadi gejala

sehari-hari manusia modern. Jika sudah begitu, stress, depresi, dan berbagai bentuk “ketidakbahagiaan” lainnya sudah menunggu di depan mata. Manusia modern terjebak di dalam sistem dan birokrasi yang ia ciptakan sendiri, dan kehilangan makna yang menjadi tujuan hidupnya.

Pada level politik, gejala yang sama bisa langsung terlihat. Dunia politik Indonesia tidak lagi berbicara soal makna politik, melainkan terjebak pada manuver-manuver politik yang penuh dengan tipu daya, dan korup. Berbicara makna berarti berbicara soal “alasan dari adanya sesuatu”. Apa alasan dari adanya dunia politik? Pertanyaan itulah yang kini seolah lolos dari pikiran maupun perilaku para politikus di Indonesia.

Orang membayar pajak, karena takut dihukum. Orang patuh peraturan, karena takut dihukum. Orang ikut pemilu dan pilkada, karena takut “apa kata orang”. Dunia politik di Indonesia tidak lagi memiliki makna yang mendorong orang untuk bertindak secara aktif. Yang tersisa adalah rasa takut dan keterpaksaan.

Banyak organisasi pun berjalan tanpa makna. Semua aktivitas mereka, mulai dari rapat sampai tindakan lapangan, dijalankan bukan karena aktivitas itu bermakna, tetapi karena “aturannya sudah begitu”, atau karena terpaksa. Organisasi-organisasi di Indonesia, baik yang kecil maupun yang besar, kehilangan makna dan “alasan adanya” mereka, serta terjebak menjalankan “*business as usual*”, yakni aktivitas rutin yang didasarkan pada rasa takut dan keterpaksaan.

Dalam konteks hukum, makna pun hilang. Apa makna dari hukum? Apa roh dari hukum? Makna dan roh dari hukum adalah keadilan. Sayangnya, roh dan makna hukum ini sudah terlupakan di Indonesia. Yang tersisa adalah perdebatan kencang tentang pasal-pasal kering yang sebenarnya tak bermakna, jika tak ada roh keadilan di dalamnya.

Dunia bisnis di Indonesia, dan di seluruh dunia, pun mengalami hal serupa, yakni krisis makna. Apa sebenarnya makna dari bisnis, yang membuat bisnis itu “ada” pada awalnya? Makna dari bisnis adalah pelayanan, dan dari pelayanan yang kita berikan, kita mendapatkan uang, serta keuntungan. Pemahaman ini sudah hilang, dan digantikan semata dengan sistem dan birokrasi yang mengabdikan pada pengejaran keuntungan, serta penumpukan modal tanpa batas.

Penyakit krisis makna ini menjangkiti banyak organisasi. Sebagai suatu organisasi, agama-agama di dunia pun mengalaminya. Esensi, atau

makna, terdalam dari agama adalah pengalaman mistik, yakni pengalaman yang menggetarkan sekaligus mengagumkan, ketika manusia bersentuhan langsung dengan “yang Ilahi”. Makna inilah yang hilang dari agama, dan digantikan dengan sekumpulan aturan, larangan, dan ritual yang seringkali mencekik jiwa, serta justru memusnahkan pengalaman mistik yang menggetarkan sekaligus mengagumkan akan “yang Ilahi”, yang sebenarnya merupakan makna dari agama.

Tak heran, kini agama menjadi beringas. Atas nama tuhan, mereka menyingkirkan yang berbeda. Atas nama tuhan, mereka melakukan diskriminasi yang menyakiti hati, dan merusak martabat manusia. Agama menjadi sumber arogansi, keterpaksaan, serta kebodohan, karena lupa akan maknanya sendiri.

Dunia pendidikan pun tak luput dari penyakit ini. Makna dari pendidikan sebagai penyadaran dan pembebasan kini sudah hilang. Yang tersisa hanyalah sistem pendidikan dengan aturan, seragam, ujian, serta pelajaran-pelajaran yang membuat peserta didik menderita. Maka janganlah heran, kalau kita melihat peserta didik tak suka belajar, dan lulusan-lulusan institusi pendidikan di Indonesia tak bermutu.

Penyakit krisis makna, yang menjangkiti berbagai bidang kehidupan di Indonesia, terjadi, karena kita lupa akan makna dari hal-hal yang kita lakukan. Yang kita ingat hanyalah sistem yang menopang makna tersebut. Ketika makna hilang, dan yang tersisa tinggal sistem, kita tak lagi mengerti, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kita bagaikan mayat-mayat hidup yang melakukan aktivitas dengan rutin, mekanis, serta tanpa kesadaran.

Dalam arti ini, ketika kita kehilangan makna, kita pun hidup dijajah oleh sistem. Kita bekerja, karena kita terpaksa bekerja. Kita mengikuti aturan, karena kita terpaksa mengikuti aturan. Kita dijajah oleh sistem yang sebenarnya kita bangun sendiri. Jika sudah begitu, hidup akan terasa kering, dan mengerikan.

Padaahal, sistem adalah buatan kita. Artinya, kita punya kekuatan untuk mengubahnya, asal kita sungguh mau melakukannya. Kemauan itu hanya bisa ada, ketika kita sadar, bahwa kita dijajah oleh sistem-sistem kehidupan yang sebenarnya kita buat sendiri. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun.

Analoginya begini. Sistem adalah kerangka tubuh, yakni tulang. Sementara, makna adalah organ-organ tubuh, seperti paru-paru, jantung, dan hati, yang ditopang oleh kerangka. Idealnya, keduanya berjalan seimbang, sehingga orang bisa merasa sehat, dan bisa beraktivitas. Namun, yang terjadi sekarang ini adalah organ-organ tubuh sudah hilang, yang tersisa adalah kerangka, yakni sekedar tulang.

Ketika tubuh hanya sekedar tulang, maka tubuh itu akan rapuh. Ketika masyarakat hanya tinggal sekedar sistem dan birokrasi, tanpa makna dan kesadaran, maka masyarakat itu pun rapuh, dalam arti gampang pecah, oleh karena perang, maupun sebab-sebab sosial lainnya. Perang saudara, kejatuhan sistem politis, revolusi, pembantaian massal, dan hal-hal mengerikan lainnya bisa terjadi, karena suatu masyarakat tidak memiliki makna politis di dalamnya.

Membangun Keseimbangan

Setiap orang selalu teraspirasi pada kesempurnaan. Mereka menghargai karya yang sempurna, dan tergerak hatinya oleh kesempurnaan yang tampak di dalam keindahan, di manapun ia berada, mulai dari karya seni, atau sekedar tanaman yang berwarna-warni nan menggoda hati. Berbicara soal kehidupan, orang juga selalu mencari kesempurnaan. Dan berbicara tentang kesempurnaan, ada satu ide terselip di dalamnya, yakni keseimbangan.

Yang sempurna itu seimbang. Ia seimbang dalam kesederhanaannya, sekaligus kerumitannya. Ia sempurna dalam kelembutan, sekaligus kekuatannya. Kesempurnaan hidup manusia pun identik dengan keseimbangannya untuk mengatur berbagai ekstrem, tanpa pernah jatuh ke salah satunya. Kesempurnaan puas untuk ada dalam tegangan, dan justru merayakan tegangan ketidakpastian di antara berbagai pilihan hidup yang senantiasa menuntut kepastian.

Namun, keseimbangan hidup bukanlah keseimbangan matematis. Ia bukanlah suatu titik yang diam, seperti angka yang tak bernyawa, melainkan

suatu gerak yang terus berubah, menari di dalam beragam ekstrem-ekstrem pilihan kehidupan. Keseimbangan di dalam hidup adalah keseimbangan yang terus berubah, mengikuti alur kehidupan yang juga senantiasa berubah. Ia mengalir gemulai di antara kepastian dan ketidakpastian, tanpa kehilangan sumbunya yang membuat ia teguh, sekaligus lentur.

Saya menyebutnya sebagai keseimbangan yang hidup, yang jelas berbeda dengan keseimbangan tak bernyawa yang dengan mudah ditemukan di dalam rumus matematika dalam bentuk ekuilibrium, ataupun hitung-hitungan ekonomi belaka. Keseimbangan yang hidup ini perlu untuk menyerap ke dalam sendi-sendi kehidupan kita sebagai manusia. Ia perlu untuk menjadi prinsip yang mengikat, sekaligus penggerak yang mengubah.

Pendidikan dan Politik

Pendidikan adalah suatu ruang yang juga harus dipenuhi oleh keseimbangan yang hidup. Pendidikan harus menjadi proses yang sekaligus mencerahkan dan menyenangkan dalam waktu yang sama. Ia tidak boleh membunuh roh, apalagi menciptakan tekanan batin. Ia merupakan keseimbangan yang hidup antara aturan yang menekankan disiplin diri di satu sisi, sekaligus proses yang melegakan hati, mencerahkan jiwa, dan membahagiakan di sisi lain.

Politik, sebagai tata kelola manusia-manusia, pun juga harus diresapi oleh keseimbangan yang hidup. Ia merupakan tegangan sekaligus kombinasi dari aturan yang menjamin stabilitas hidup bersama di satu sisi, dan kebebasan yang mendorong kreativitas serta kebahagiaan hati di sisi lain. Kegagalan meresapi keseimbangan yang hidup semacam ini akan membuat politik menjadi neraka kehidupan, yang diisi oleh para petarung kekuasaan yang rakus, serta penjilat yang tak punya nurani.

Ekonomi sebagai transaksi antar manusia yang melibatkan jumlah besar pun juga harus bergerak dengan pola keseimbangan yang hidup. Bahkan, sejatinya, ekonomi adalah pola interaksi antar manusia dalam jumlah besar yang selalu terarah untuk mencari keseimbangan. Beberapa orang berpendapat, bahwa ekonomi haruslah dibiarkan bebas, supaya bisa mencari keseimbangannya sendiri, dan, dengan itu, memberikan kemakmuran untuk semua.

Ekonomi dan Bisnis

Namun, prinsip kebebasan mutlak di dalam ekonomi semacam ini tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan yang hidup, karena jatuh pada salah satu ekstrem di dalam perdebatan, yakni ekstrem pasar bebas. Maka dari itu, dalam terang pemikiran tentang keseimbangan yang hidup, negara juga harus ikut mengatur ekonomi, namun dengan kepekaan pada pentingnya ruang bagi ekonomi untuk menari dan berkembang dengan geraknya sendiri. Ekonomi adalah titik tengah yang dinamis antara tata kelola yang memelihara kestabilan dan keamanan di satu sisi, serta ruang kebebasan yang mendorong kreativitas yang mendobrak di sisi lain.

Bisnis pun juga perlu untuk memeluk keseimbangan yang hidup. Setiap pebisnis besar akan sadar, bahwa bisnis adalah semacam kombinasi ganjil antara keberuntungan di satu sisi, dan usaha keras di sisi lain. Bisnis adalah keseimbangan yang hidup antara dorongan mengumpulkan keuntungan finansial di satu sisi, dan upaya untuk menghasilkan keindahan di sisi lain. Bisnis juga adalah keseimbangan antara niat mencari untung di satu sisi, dan upaya membantu orang lain di sisi lain.

Sains

Di dalam masyarakat manusia yang semakin rumit, pencarian kebenaran adalah sesuatu yang amat diperlukan. Kebenaran adalah dasar untuk pelbagai kebijakan publik, maupun untuk membuat keputusan pribadi. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan menempati peranan terhormat. Ia menjadi pegangan bagi banyak orang untuk membuat keputusan, karena sifatnya yang berusaha sedekat mungkin mendekati kebenaran yang ada di dalam kehidupan.

Oleh karena itu, ilmu pengetahuan pun juga harus diresapi oleh keseimbangan yang hidup. Ia adalah bentuk nyata dari keseimbangan antara pencarian kebenaran yang tak berpihak di satu sisi, dan kelembutan hati yang berpijak pada nilai-nilai luhur kehidupan di sisi lain. Ia adalah perpaduan yang terus berubah antara ketidakberpihakan yang menghasilkan kebenaran “obyektif” di satu sisi, dan kepekaan hidup atas nilai-nilai kebaikan di sisi lain.

Agama

Tidak seperti yang diramalkan oleh Karl Marx lebih dari 200 tahun

yang lalu, agama tetap hidup, dan bahkan berkembang, di dalam peradaban manusia. Di berbagai negara, agama kini memainkan peranan penting di dalam menata hidup warganya, maupun mengarahkan keputusan-keputusan yang bersifat publik. Menimbang situasi semacam itu, maka agama pun perlu untuk menghayati keseimbangan yang hidup.

Agama perlu untuk berada di antara kemampuan memberikan panduan hidup praktis sehari-hari di satu sisi, dan kemampuan untuk memberikan makna hidup yang mendalam bagi para penganutnya. Agama perlu untuk terus menampung kekaguman manusia akan segala keindahan alam semesta yang membuatnya tertegun dan mengarahkan diri ke penciptanya di satu sisi, dan ritual religius yang menyejukan hati di sisi lain.

Seni

Hidup tanpa seni itu kering dan membosankan. Tidak hanya itu, hidup itu sendiri pun adalah seni. Namun, secara spesifik, seni adalah kemampuan manusia untuk mengekspresikan pikiran maupun perasaan di dalam dirinya melalui berbagai alat, seperti alat musik, lukisan, dan berbagai jenis media lainnya. Jadi, seni adalah ekspresi hidup dari diri terdalam manusia. Dalam konteks ini, seni pun perlu untuk menjalankan keseimbangan yang hidup, sama seperti bidang-bidang lainnya.

Di satu sisi, seni perlu untuk sedetil mungkin menangkap dan menyampaikan pergulatan jiwa manusia. Di sisi lain, seni juga perlu menjadi alat untuk membawa pesan-pesan pencerahan ke publik. Di satu sisi, seni bisa secara abstrak dan bebas mengungkapkan dirinya. Dan, di sisi lain, seni bisa secara konkret dan menyenangkan menyampaikan pesan kepada publik luas. Inilah keseimbangan hidup yang, pada hemat saya, perlu untuk dihayati oleh dunia seni pada umumnya, dan para seniman pada khususnya.

Filsafat

Sebagai disiplin pemikiran yang cukup tua, filsafat pun perlu untuk memeluk konsep keseimbangan yang hidup sebagai bagian dari dirinya. Ia perlu menari antara kekuatan abstraksi yang jernih di satu sisi, dan kemampuan untuk membaca realitas serta mendorong tindakan yang mengubah di sisi lain. Kegagalan menghayati tegangan antara dua kutub ini akan membuat filsafat ketinggalan jaman, dan menjadi tak relevan.

Di dalam hidupnya, setiap orang mencari, atau setidaknya merindukan di dalam hatinya, kesempurnaan. Dalam arti ini, kesempurnaan adalah keseimbangan itu sendiri. Bukan keseimbangan yang statis, bagaikan titik matematis di dalam matematika, melainkan keseimbangan yang hidup, yang mengayun serta menari di antara berbagai ekstrem kehidupan yang menggoda untuk dipilih. Jika kesempurnaan adalah keseimbangan, dan orang bisa menari di dalam berbagai ekstrem pilihan hidup yang mengepungnya, mungkin inilah arti sesungguhnya dari kebijaksanaan. Mungkin...

Filsafat Pancasila

Para bapak pendiri bangsa Indonesia sudah sepakat, bahwa Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia. Artinya, segala kebijakan publik maupun perilaku bangsa haruslah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, sekarang ini, Pancasila terjebak menjadi sekedar retorika luhur, tanpa realitas yang jelas. Banyak kebijakan publik (mulai dari perda Syariah sampai kebijakan ala neoliberalisme) dan perilaku bangsa kita (brutal, korup, serta tidak adil) yang berbeda jauh dari nilai-nilai Pancasila yang ada.

Di sisi lain, pendidikan Pancasila pun semakin tak terasa relevansinya. Banyak orang mengeluh, bahwa pendidikan Pancasila terjebak menjadi semata kegiatan menghafal dan memuntahkan hasil hafalan belaka, tanpa olah pikir yang rasional, kritis, dan sistematis, serta tak jelas relevansinya. Situasi ini semakin mendorong terpuruknya Pancasila menjadi sekedar nostalgia sejarah, ataupun retorika luhur tanpa kenyataan. Trauma yang diciptakan oleh Orde Baru, yakni menindas dan memusnahkan kelompok-kelompok yang berbeda atas nama Pancasila, pun

belum juga hilang. Di dalam situasi semacam ini, apa yang bisa kita, sebagai pengajar, lakukan?

Di dalam tulisan ini, saya ingin mengajukan argumen, bahwa untuk mengembalikan Pancasila sebagai ideologi yang operasional dalam realitas, kita perlu untuk menyuntikkan filsafat di dalam proses memahami sekaligus mengajarkan Pancasila. Filsafat amat diperlukan, karena filsafat tidak hanya mengajarkan, melainkan menghidupi pola berpikir yang rasional, kritis, sistematis, dan berkelanjutan di dalam upaya memahami kehidupan, dan menjadi semakin bijak (bukan kebijaksanaan para orang kudus ataupun sufi) dari hari ke hari. Filsafat adalah kaca mata yang bisa digunakan untuk memahami dan mengajarkan Pancasila, sehingga sungguh menjadi atmosfer kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Pancasila dan Filsafat

Sebagai suatu pandangan dunia, Pancasila lahir dari negosiasi alot antara para pendiri bangsa yang berasal dari beragam latar belakang kehidupan. Rumusannya pun berulang kali berubah, walaupun tetap diusahakan untuk tidak mengundang kebingungan, ataupun tafsir ganda di kemudian hari. Sampai saat ini, kita sudah sepakat akan 5 sila yang dianggap mampu menampung nilai-nilai yang bisa menjadi panduan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu adalah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Bagaimana memahami nilai-nilai itu dalam kaca mata filsafat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin perjelas terlebih dahulu, apa yang saya maksud dengan filsafat. Sejauh saya pelajari dan refleksikan, filsafat adalah sebuah cara mengada, atau cara hidup, yang sedapat mungkin mengedepankan penalaran rasional, kritis (tidak mudah percaya dengan klaim-klaim luhur, atau apa yang tampak), sistematis (berpikir, menulis, dan berbicara dengan pola yang runut, serta taat asas), dan berkelanjutan (tidak pernah selesai, dan selalu siap untuk mengubah posisi sejalan dengan perkembangan situasi).

Pancasila harus dibaca dan dipahami dengan menggunakan penalaran rasional akal budi manusia. Pancasila juga harus dipahami dengan pendekatan kritis, yakni tidak mudah percaya dengan klaim-klaim

luhur ataupun praktek-praktek naif yang mengatasnamakan Pancasila. Tafsiran atas nilai-nilai Pancasila pun harus runut dan taat asas, sesuai dengan maksud dan tujuan adanya Pancasila itu sendiri. Seperti segala sesuatu di bawah langit, Pancasila, dan tafsiran atasnya, pun juga harus kontekstual, yakni sesuai dengan perkembangan jaman. Maka, nilai fleksibilitas, dalam tegangan dengan keteguhan prinsip-prinsip dasar, juga harus diperhatikan.

Hermeneutik Filosofis

Jika dibaca dengan kerangka berpikir filosofis, atau saya menyebutnya hermeneutik (ilmu tentang pola menafsir “teks”) filosofis, Pancasila setidaknya bisa dibaca dengan tiga cara. Cara pertama terkait dengan dua sila awal dalam Pancasila, yakni menjadi manusia yang ber-Tuhan dan beragama, sekaligus memiliki rasa kemanusiaan, dan beradab dalam bertingkah laku. Ini adalah gambaran manusia awal yang perlu menjadi tujuan bersama sistem pendidikan maupun kebudayaan bangsa Indonesia.

Cara kedua bergerak di level sosial, yakni melihat Indonesia sebagai suatu kesatuan entitas politis yang diikat oleh keadilan sosial. Dengan kata lain, persatuan Indonesia bukanlah persatuan semu, melainkan persatuan yang selalu didasarkan oleh keadilan sosial. Sebaliknya juga benar, bahwa ketika keadilan sosial sudah raib, maka persatuan pun hanya semu belaka, dan tak layak untuk sungguh dipertahankan. Poin terakhir inilah yang kerap kali dilupakan oleh para “fanatik” persatuan Indonesia yang buta pada realitas ketidakadilan yang terus menerus terjadi di lapangan.

Cara ketiga bergerak pada level politik praktis. Di dalam negara demokrasi modern, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dengan pertolongan wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga ini yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Pancasila sila keempat mengajak kita untuk menciptakan lembaga perwakilan yang sungguh mewakili kepentingan rakyat, dan bukan perwakilan yang justru tak pernah mewakili kepentingan rakyat, seperti yang sekarang ini sedang terjadi di dunia politik praktis kita.

Prinsip mendasar untuk menafsir Pancasila dengan kaca mata filsafat adalah, bahwa Pancasila harus dibaca secara rasional, kritis, sistematis, berkelanjutan, serta menyeluruh, tak pernah boleh terpisah-

pisah. Penghayatan Ketuhanan tidak pernah bisa dilepas dari rasa kemanusiaan, persatuan tak pernah bisa dilepaskan dari rasa keadilan, dan perwakilan tak pernah bisa lepas dari apa yang sungguh dibutuhkan oleh rakyat. Ketiga prinsip ini terjalin erat dalam satu ideologi dasar sekaligus pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila.

Metode Belajar dan Mengajar

Sebagai pelestari kebudayaan dan pembentuk karakter bangsa, sistem pendidikan menjadi garis depan penanaman nilai-nilai Pancasila pada seluruh rakyat Indonesia. Namun, metode pendidikan kuno, dengan teknik menghafal dan memuntahkan ulang hafalan, jelas tidak lagi bisa digunakan untuk mendidik bangsa sesuai dengan ideologi bangsa. Dengan kata lain, kita harus melakukan dekonstruksi sekaligus rekonstruksi pada metode pendidikan Pancasila yang tengah dilaksanakan sekarang ini.

Saya menyarankan diberlakukannya metode dialektik-kritis di dalam mengajar dan belajar Pancasila di Indonesia. Metode ini berpijak pada pola berpikir klasik tesis-antitesis-sintesis yang sudah dikembangkan oleh Sokrates, dan disempurnakan oleh Hegel dan para filsuf kontemporer. Inti dari metode ini adalah berusaha menabrakkan idealitas pikiran manusia dengan realitas hidup sehari-hari, lalu mencoba untuk mencari kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kelebihan dari metode ini adalah kemampuannya untuk mampu menampung aspek negativitas dunia sekaligus harapan-harapan akal budi kita tentang dunia yang lebih baik, mampu merumuskan langkah-langkah praktis untuk menciptakan perubahan, serta kemampuannya untuk terus berubah menyesuaikan diri dengan situasi yang ada.

Praktisnya begini, berikan pandangan normatif yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, misalnya oleh Ketuhanan yang berperikemanusiaan. Lalu, berikan beberapa kasus di koran ataupun televisi yang terkait langsung dengan konsep Ketuhanan yang berperikemanusiaan tersebut yang telah terjadi di Indonesia. Lalu, diskusikan apa yang telah terjadi, dan “mengapa” itu terjadi. Pada bagian penutup, berikan kemungkinan-kemungkinan melakukan sintesis (kesimpulan sementara), serta langkah-langkah praktis yang bisa diambil untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Terapkan model ini dalam setiap perjumpaan di kelas.

Mentalitas Pendidik

Metode sebegus apapun, materi sedalam apapun, tidak akan berguna, jika sang guru tidak memiliki mentalitas pendidik. Saya setidaknya melihat ada lima bentuk mentalitas yang perlu dipeluk oleh setiap guru, terutama guru-guru yang terlibat langsung dalam pengajaran Pancasila. Mentalitas ini juga terkait erat dengan upaya menajamkan penerapan sekaligus pendidikan Pancasila dengan menggunakan perspektif filsafat.

Mentalitas pertama adalah guru yang menghargai setiap pendapat muridnya, seganjil apapun pendapat itu. Sekolah adalah komunitas pembelajar. Guru dan murid adalah dua pihak yang sedang belajar bersama untuk memperluas sekaligus memperdalam pengetahuan. Kesalahan menjawab suatu pertanyaan seringkali merupakan titik tolak untuk membuka lahan-lahan pemikiran baru, atau proses untuk selangkah lebih maju, guna menemukan jawaban yang lebih tepat. Proses semacam inilah yang harus sungguh dihargai oleh seorang pendidik.

Mentalitas kedua adalah mentalitas demokratis tanpa pernah terjatuh ke dalam anarki, atau kekacauan kelas, dimana segala hal diperbolehkan, dan otoritas lenyap. Ini sebenarnya langsung terkait dengan mentalitas ketiga, yakni mentalitas otoritas tanpa menjadi guru yang otoriter. Seorang pendidik sejati haruslah peka pada tegangan-tegangan tipis semacam ini, sehingga sekolah dan kelas sungguh menjadi komunitas pembelajar yang tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga menyenangkan, dan membentuk karakter.

Mentalitas keempat adalah apa yang saya sebut sebagai mentalitas komunikatif. Seorang pendidik sejati mengajar dengan menggunakan contoh-contoh yang praktis, sekaligus juga dengan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti. Dengan ini, bahan yang ia kuasai, misalnya soal Pancasila, bisa sungguh hidup, dan terasa persentuhannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Mentalitas komunikatif inilah yang tampaknya mulai lenyap di dalam dunia pendidikan kita.

Mentalitas kelima adalah apa yang sebut sebagai keberanian untuk membuat terobosan. Apapun teorinya, seorang guru harus mengajak murid-muridnya untuk melampaui teori tersebut, dan berusaha membuat cara pandang baru. Pendidik sejati mengajak peserta didiknya untuk belajar bersama untuk melampaui apa yang sudah ada. Dalam arti ini, belajar

adalah suatu petualangan intelektual untuk melakukan terobosan-terobosan yang bermakna.

Pancasila bukanlah sekedar rumusan kering sisa-sisa masa lalu, melainkan roh sekaligus fondasi utama bangsa Indonesia. Pancasila bukanlah pasal-pasal mati yang mesti dihafal, melainkan sebuah realitas yang perlu untuk terus ditafsir semakin luas dan semakin dalam dengan menggunakan kerangka berpikir filsafati, sehingga mampu menjadi inspirator perilaku bangsa Indonesia setiap harinya. Untuk itu, proses pendidikan Pancasila haruslah menjadi yang menantang untuk berpikir, berguna untuk menjelaskan apa yang terjadi, serta mendorong tindakan-tindakan perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan konteks yang ada. Jadi, apa lagi yang kita tunggu?

Gelembung Politik Anas dan Anies

Mereka adalah Anas Urbaningrum dan Anies Baswedan. Anas kini (masih) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, yakin partai pemenang Pemilu terakhir di Indonesia. Sementara, Anies kini menjadi Rektor dari Universitas Paramadina, Jakarta, serta pendiri sekaligus ketua dari Gerakan Indonesia Mengajar, yang berusaha mengajak anak-anak muda Indonesia untuk menjadi guru di berbagai pelosok negeri. Keduanya adalah tokoh muda yang sama-sama lahir pada 1969. Anas lahir pada 15 Juli 1969. Sementara, Anies lahir pada 7 Mei 1969.

Anas

Anas Urbaningrum memiliki karir politik yang cerah. Sebelum menjadi ketua partai, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi di Partai Demokrat. Pada masa itu, ia juga menjabat sebagai ketua Fraksi Demokrat di DPR RI. Sejak menjadi ketua partai, ia mengundurkan diri dari DPR.

Lahir di Desa Ngaglik, Blitar, Jawa Timur, ia bersekolah di Kabupaten Blitar, dan lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga pada 1992. Ia kemudian mengambil gelar master politik di Universitas Indonesia dengan tesis tentang pemikiran Nurcholis Madjid, dan kini tengah menyelesaikan studi doktoral ilmu politik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Melalui tulisan maupun pidatonya, Anas tampak memiliki komitmen yang kuat pada demokrasi serta budaya politik yang bersih dan cerdas. Ia sering berkata dan menulis tentang pentingnya pengelolaan partai yang efisien dan bersih, serta komitmen pada pengembangan budaya demokrasi di Indonesia. Dengan sejarah hidup, tulisan, dan pidatonya, banyak orang percaya, bahwa Anas bisa menjadi pemimpin Indonesia masa depan.

Karir politik Anas tidak berjalan mulus. Pada 2011-2012 lalu, Anas terjerat kasus korupsi Wisma Atlet bersama dengan dugaan korupsi lainnya, juga dengan beberapa orang dari Partai Demokrat. Kepercayaan publik pun menurun, baik kepada Partai Demokrat, maupun pada Anas sendiri. Beberapa kalangan meminta Anas untuk meninggalkan jabatannya sebagai ketua umum partai. Semua upayanya untuk meniti karir di politik pun hancur, karena kasus-kasus korupsi yang menyimpannya belakangan ini.

Anies

Anies Baswedan dikenal sebagai salah satu mahasiswa aktivis di Indonesia yang mendapatkan beasiswa Fullbright untuk melanjutkan studi pasca sarjana di Amerika Serikat. Ia mengkhususkan dirinya di bidang politik, dan kini menjadi salah satu pemimpin muda Indonesia yang visioner dan dipercaya banyak kalangan. Majalah AS, Foreign Policy, menobatkan Anies sebagai 100 intelektual paling berpengaruh di dunia pada Mei 2008 lalu.

Tidak berhenti di situ, World Economic Forum melihat Anies sebagai Pemimpin Global Muda pada 2009. Pada bulan April 2010, majalah Jepang, Foresight, membuat laporan khusus tentang 20 orang yang paling potensial di dunia untuk membuat perubahan di 20 tahun mendatang. Nama Anies, bersama Vladimir Putin (Presiden Russia) dan Hugo Chavez (Presiden Venezuela), masuk ke dalam laporan itu.

Pada 2009 lalu, Anies menjadi moderator debat presiden pertama di Indonesia yang disiarkan di berbagai televisi nasional pada waktu itu.

Sekitar 100 juta orang menyaksikan debat itu. Anies juga berperan penting sebagai juru bicara Tim Delapan yang mencoba menjernihkan berbagai fakta terkait tuduhan terhadap dua anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia.

Anies adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Sarjana), Master dalam bidang Kebijakan Publik dari *University of Maryland, School of Public Policy*, AS, dan Doktor Filsafat dari *Northern Illinois University*, AS. Ia memiliki pandangan politik yang amat terbuka. Di dalam beberapa wawancara, Anies menekankan pentingnya pembentukan integritas di dalam diri setiap orang. Ia juga memiliki perhatian yang amat besar dalam bidang pendidikan.

Anas dan Anies

Bagi Anas, politik adalah soal membangun tata kelola hidup bersama yang bersih dan demokratis. Namun, ia gagal mewujudkan itu, dan justru terlibat cukup dalam beberapa kasus korupsi. Apa yang ia pernah tulis dan katakan tentang budaya politik yang bersih dan demokratis itu tampak hanya menjadi buih-buih mulut semata. Pesona kenikmatan kekuasaan dan uang telah menjeratnya, dan melenyapkan idealisme politik yang dulunya tertanam di dalam dirinya.

Bagi Anies, sebagai pribadi, kita perlu untuk kokoh dalam pegangan nilai, dan memiliki integritas pribadi yang jelas. Jika kita sudah kokoh, maka kita akan siap ditempatkan untuk apapun. Ia tidak terlibat langsung ke dalam dunia politik, melainkan memilih untuk masuk dalam di bidang pendidikan. Baginya, pendidikan adalah upaya untuk membuat orang memiliki integritas diri yang kuat, sehingga siap menghadapi tantangan kehidupan, apapun bentuknya.

Keduanya berawal dari idealisme yang sama, namun menempuh jalan yang berbeda. Yang satu terpesona oleh uang dan kekuasaan, dan terjebak dalam korupsi. Yang lain masih tetap teguh berkarya untuk membantu mengembangkan bangsa dengan kemampuan yang ia punya. Keduanya adalah “model” bagi orang-orang muda yang hendak memajukan bangsanya, baik di bidang politik, maupun di bidang lainnya. Manakah yang kiranya akan menjadi model anda?

Melawan Gelembung Diskriminasi

Kemenangan Jokowi dan Ahok di Pilkada putaran pertama di Jakarta beberapa hari lalu menandakan satu hal, bahwa kita mulai cerdas di dalam memilih para pemimpin republik ini. Kita bukan lagi “kambing” yang bisa dibuai oleh iklan dan uang, supaya memilih orang-orang yang salah. Konsep otonomi publik dan otonomi privat, dimana setiap orang dan setiap komunitas memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri secara rasional, mulai bertumbuh di republik yang telah tercabik oleh totalitarisme militer selama lebih dari 30 tahun ini.

Politik Identitas

Di sisi lain, ada kabar baik. Politik identitas, yang telah lama mewarnai panggung politik Indonesia, pun mulai luntur. Identitas-identitas primordial, seperti suku, ras, agama, memang masih memainkan peranan penting dalam politik, terutama dalam soal pemilihan umum, namun pengaruhnya kini mulai terkikis. Di dalam wacana Kajian Budaya, politik identitas adalah bentuk politik yang menggunakan identitas-identitas kuno, seperti suku, ras, dan agama, di dalam gerak pembuatan sekaligus

penerapan kebijakan-kebijakan publiknya. Bentuk politik semacam ini adalah musuh utama bagi demokrasi, dan kini bangsa Indonesia mulai bergerak melampauinya.

Apa yang salah dengan politik identitas? Dalam filsafat politik, politik identitas menyatukan yang serupa, dan memisahkan yang berbeda. Di dalam masyarakat homogen, seperti masyarakat purba, politik identitas bisa menjadi bentuk politik yang baik untuk menata kehidupan bersama. Namun, di dalam masyarakat demokratis, dimana perbedaan suku, ras, dan agama adalah bagian dari keseharian setiap orang, politik identitas justru memecah, dan menciptakan konflik-konflik sosial yang tidak perlu.

Sahabat berpisah, karena perbedaan suku, ras, dan agama. Keluarga terpecah, karena cinta mengikat dua orang yang berbeda, namun menimbulkan guncangan kultural bagi keluarga kedua belah pihak. Penerapan politik identitas, yakni politik yang berpijak melulu pada kesamaan suku, ras, dan agama, adalah racun utama penghancur masyarakat demokratis. Berita baiknya adalah, kini, di Indonesia, politik identitas mulai disadari, dan ditinggalkan.

Kesadaran Baru

Orang mulai sadar, bahwa kesatuan yang diciptakan oleh politik identitas, pada dasarnya, adalah sesuatu yang rapuh. Kesatuan berdasarkan pada kesamaan identitas primordial adalah kesatuan yang semu, yakni seolah-olah satu dan utuh, namun fragmen tetap tersembunyi di dalamnya, dan siap merobek tatanan yang ada. Politik identitas bukanlah jalan untuk menuju kesatuan dan kestabilan politik, melainkan sebaliknya, yakni jalan untuk memisahkan sahabat dan keluarga, serta memecah belah masyarakat.

Di Indonesia, orang mulai sadar, bahwa kebaikan tidak selalu sama dengan kesamaan identitas. Kebaikan dan keutamaan jiwa bisa ditemukan di orang-orang yang berbeda suku, ras, maupun agama. Kebaikan dan keutamaan jiwa adalah sesuatu yang universal, yang bergerak melampaui semua bentuk identitas primordial yang seringkali memenjara manusia. Semoga kesadaran ini tidak hanya luapan politis sementara, melainkan sungguh mencerminkan perkembangan mentalitas kita sebagai bangsa yang hendak mencapai keadilan serta kemakmuran dengan cara-cara yang demokratis.

Gerak melampaui politik identitas ini juga merupakan tanda, bahwa budaya demokrasi mulai tumbuh, dan tersebar di republik ini. Sudah lama kita mendapatkan kritik, bahwa di Indonesia, sistemnya memang sudah demokratis, dengan pemilu dan perwakilan rakyatnya, namun budayanya masih feodal, yakni masih terpesona dengan gelar dan uang, sehingga mengaburkan penilaian tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kritik ini memang benar dan tajam, namun mulai kehilangan pijakan realitasnya sekarang ini. Budaya demokrasi, perlahan namun pasti, mulai berkembang untuk mengimbangi sistem politik demokratis yang telah ada.

Ini adalah alasan untuk optimis, bahwa kehidupan politik kita mulai mengarah ke tempat yang seharusnya, yakni yang melampaui semua bentuk identitas primordial maupun feodalisme, serta mengarahkan kita untuk menjadi bangsa yang cerdas, adil, dan makmur. Ini adalah kabar baik yang patut kita syukuri bersama, dan terus diusahakan untuk berkembang merata ke berbagai penjuru tanah air. Di dalam pilpres 2014 nanti, kita pastikan bersama sebagai bangsa, bahwa yang memiliki keutamaan dan kekuatan jiwalah yang nantinya akan memimpin kita, bukan segerombolan orang yang menggunakan identitas-identitas primordial untuk merampok dan memperkaya golongannya sendiri.

Gelembung Neurosains

Manusia adalah entitas yang rumit dan paradoksal. Ia terdiri dari begitu banyak aspek, mulai dari biologis, spiritual, sosial, sampai dengan estetik. Namun, ia tetap mampu bergerak melampaui semua itu, dan bersikap bebas, baik terhadap dirinya maupun terhadap alam.

Di satu sisi, seperti dinyatakan oleh Barry Smith, manusia adalah bagian dari alam semesta. (Smith, 2012) Ia memiliki otak, tulang, daging, dan darah yang merupakan unsur-unsur biologisnya. Di sisi lain, ia memiliki kesadaran, yakni ia sadar akan dirinya sendiri, mampu mempertanyakan keberadaan dirinya sendiri, dan kemudian berkarya.

Pertanyaan yang, menurut saya, cukup penting disini adalah, bagaimana hubungan antara unsur-unsur biologis di dalam tubuh manusia di satu sisi, dan kesadarannya sebagai manusia di sisi lain? Dengan kesadaran, demikian kata Smith, manusia mampu berpikir dan merasa. Ia mampu menghadirkan pengalaman subyektif di dalam dirinya, seperti pengalaman akan suara, akan rasa, akan cuaca, yang kesemuanya itu merupakan gambaran dari dunia yang ada di sekitarnya. (Smith, 2012)

Kesadaran Manusia

Pemikiran tentang kesadaran merentang jauh ke abad 17 di Prancis, tepatnya di dalam pemikiran Rene Descartes. Baginya, setiap manusia terdiri dari dua aspek, yakni aspek fisik material, dan aspek spiritual. Aspek kedua inilah yang mengandung pikiran dan jiwa, di mana proses-proses berpikir manusia terjadi.

Kesadaran dan jiwa semacam ini hanya milik manusia. Hewan dan tumbuhan tidak memilikinya. Mereka, sebagaimana ditulis oleh Smith, hanyalah mekanisme-mekanisme otomatis semata. (Smith, 2012) Menurut Descartes, ketika seekor binatang mengeluarkan suara, itu bukanlah rasa sakit, melainkan hanya gerak mekanis udara yang keluar dari tubuh mereka, tanpa emosi, tanpa rasa sakit.

Manusia, dengan kesadarannya, hidup, menggerakkan tubuhnya, bercinta, menginginkan sesuatu, dan berusaha untuk mewujudkannya. Pertanyaan filosofis yang terkandung dalam argumen Descartes ini adalah, bagaimana mungkin entitas yang tidak material, yakni kesadaran, mampu menggerakkan tubuh fisik manusia?

Bagi Smith, ini adalah pertanyaan yang tidak tepat, karena berpijak pada pemahaman yang salah, yakni pemahaman, bahwa tubuh dan jiwa manusia adalah dua hal yang berbeda. Di dalam filsafat, ini disebut sebagai teori dualisme tubuh-jiwa, dengan Plato dan Descartes sebagai tokoh-tokoh utamanya.

Kelahiran Neurosains

Dewasa ini telah muncul satu cabang ilmu pengetahuan baru yang disebut sebagai neurosains. Ilmu ini berusaha untuk memahami perilaku manusia dengan mencoba menganalisis unsur-unsur biologisnya. Misteri utama di dalam ilmu ini adalah segala sesuatu terkait dengan otak manusia, serta kaitannya dengan kesadaran sebagai unsur utama pembentuk identitas manusia.

Di dalam pikiran para ilmuwan neurosains, pandangan Descartes salah. Tidak hanya itu, seluruh dualisme manusia (tubuh dan jiwa) juga salah. Kunci utama untuk memahami manusia, menurut mereka, adalah dengan memahami otak manusia. Di dalam otak terjadi proses berpikir, dan proses membuat keputusan. Namun, sampai saat ini, seperti dicatat oleh

Smith, para ilmuwan neurosains belum bisa menjelaskan, bagaimana kesadaran bisa lahir dan berkembang dari otak manusia.

Ketidaksadaran

Di awal abad 20, Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, sudah mengingatkan kita, bahwa kesadaran hanyalah unsur kecil yang mempengaruhi perilaku manusia. Ada unsur lain yang amat kuat mempengaruhi perilaku manusia, yakni unsur ketidaksadaran. Banyak perilaku kita sebagai manusia lahir dari ketidaksadaran ini. Tak heran pula, banyak orang merasa dirinya baik, walaupun sebenarnya ia banyak berbuat jahat pada orang lain. Perbuatan jahat ini lahir dari ketidaksadarannya.

Kini, neurosains berhasil menemukan dasar biologis bagi pemikiran Freud tersebut. Mereka berhasil menemukan fakta biologis, bahwa banyak yang dilakukan manusia justru lahir dari proses-proses yang tidak sadar, dan bersifat mekanistik-otomatis saja. Bahkan, menurut Smith, neurosains berhasil menemukan, dalam bentuk hipotesis yang masih terus diuji, bahwa ada banyak level kesadaran yang mendorong orang untuk berpikir, atau membuat keputusan. (Smith, 2012)

“Kesadaran”, demikian tulis Smith, “terikat pada rasa diri kita, namun rasa dari diri kita terkait erat dengan kesadaran akan tubuh.” (Smith, 2012) Dengan kata lain, ketika kita bergerak, kita merasa menjadi tuan atas diri kita. Kita memerintahkan tubuh kita untuk bergerak, dan tubuh itu pun bergerak. Namun, mekanisme ini tidaklah mutlak.

Otak dan Rasionalitas

Ketika salah satu bagian dari otak terluka, mekanisme gerak ini pun terganggu. Orang tidak lagi bisa menjadi tuan atas dirinya sendiri. Mereka justru dikendarai oleh tubuhnya yang tidak lagi berfungsi dengan normal. Dalam kasus-kasus semacam ini, otak, yang tidak lagi tunduk pada kesadaran, seringkali memainkan peranan penting.

Para filsuf amat memuja kemampuan manusia untuk berpikir rasional. Namun, kemampuan itu pun hilang, ketika otak mengalami cedera. Bagian otak yang digunakan untuk berpikir rasional adalah prefrontal cortex, yakni bagian yang paling baru tumbuh di otak manusia, dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. (Lehrer, 2011) Ketika fungsi-

fungsi biologis di bagian ini terganggu, maka kemampuan manusia untuk berpikir rasional pun juga terganggu.

Sikap Kita

Neurosains mengajak kita untuk menembus batas-batas spekulasi filosofis, dan mulai memasuki eksperimen-eksperimen biologis untuk memahami lebih jauh, mengapa kita, manusia, melakukan apa yang kita lakukan. Dalam konteks ini, problem hubungan antara otak dan kesadaran manusia, yang merupakan motor dari segala perilaku dan tindakan manusia, amatlah penting untuk ditelusuri, baik untuk kepentingan medis, sosial, pendidikan, maupun untuk melebarkan pemahaman manusia tentang dirinya sendiri. Dari pemahaman-pemahaman baru penelitian neurosains tentang kesadaran dan otak manusia, kita bisa menurunkan begitu banyak penerapan-penerapan praktis yang berguna untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia.

Namun, neurosains bisa dengan mudah jatuh pada biologisme, yakni melihat manusia semata-mata sebagai makhluk biologis, dan berusaha untuk menjelaskan segala sebab musabab perilakunya berdasar pada unsur-unsur biologis. Pandangan ini jelas merupakan penyempitan pada kekayaan eksistensi manusia.

Penggunaan pandangan ini di dalam menerapkan berbagai kebijakan jelas akan membawa lebih banyak masalah, daripada memberikan solusi. Manusia adalah makhluk yang jauh lebih kaya daripada unsur-unsur biologisnya, maka ia jelas harus ditempatkan dan diperlakukan sesuai dengan kekayaannya tersebut.

Dalam hal ini, neurosains bisa banyak belajar dari filsafat dan sastra. Dengan kemampuan kritis dan rasionalnya, filsafat bisa memberikan daya analisis yang tajam sekaligus kritis pada asumsi-asumsinya sendiri bagi neurosains. Dengan kemampuan mengasah rasa serta mengolah imajinasi, sastra bisa membantu neurosains tetap halus dan manusiawi di dalam menganalisis dan memahami kerumitan kesadaran manusia.

Diinspirasi dari Neuroscience and philosophy must work together |

Barry Smith | The Guardian

<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/mar/04/consciousness-neuroscience-self-philosophy> (16 April 2012)

Gelembung Kesempitan Berpikir

Kita hidup dalam dunia yang telah disempitkan. Hal-hal yang kaya dan rumit disempitkan menjadi hal-hal sederhana yang justru membunuh arti pentingnya. Gejala ini dapat dilihat di semua bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, politik, sampai dengan seni. Penyempitan dunia kehidupan ini perlu untuk kita refleksikan, lalu kita kurangi sisi merusaknya.

Politik

Dunia politik disempitkan menjadi pengejaran kekuasaan. Aliansi antar partai politik dibangun bukan untuk meningkatkan kinerja politik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, melainkan untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Negosiasi dibangun bukan untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menunjang kinerja mesin politik, melainkan untuk membuat proyek-proyek baru yang penuh dengan lubang untuk dikorupsi.

Dunia politik juga disempitkan menjadi kesempatan untuk menumpuk uang. Orang berlomba-lomba menjadi anggota DPR dan DPRD bukan untuk melaksanakan pengabdian, melainkan untuk mencari celah, guna mengembangkan modal keuangan mereka. Ketika menjabat sebagai

kepala daerah, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan proyek dan tender, guna mendapatkan uang lebih banyak lagi, setidaknya untuk menutupi ongkos kampanye politik sebelumnya.

Padahal sejatinya, politik adalah soal pengabdian pada kepentingan rakyat untuk mewujudkan terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali. Ketika ini disempitkan semata menjadi pengejaran kekuasaan dan kesempatan untuk menumpuk uang, masalah besar muncul. Politik adalah soal tata kelola masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang bisa dipertanggungjawabkan bersama. Ketika politik tidak berjalan, tata kelola masyarakat pun tidak berjalan, dan semua urusan akan berantakan.

Pendidikan

Dunia pendidikan pun mengalami penyempitan. Pendidikan disempitkan menjadi semata-mata latihan untuk berhasil dalam tes. Murid dibombardir dengan latihan tes terus menerus, terutama menjelang UNAS. Metode menghafal dan memuntahkan kembali menjadi yang utama, dan, sejalan dengan itu, membunuh kreativitas dan orisinalitas berpikir anak.

Pendidikan juga disempitkan menjadi semata-mata mengulang apa yang dikatakan oleh guru. Dalam arti ini, menurut saya, pendidikan telah berubah menjadi perbudakan pikiran. Pikiran yang kreatif dan orisinal dianggap pemberontak, maka harus didisplinkan dan dihukum. Pada akhirnya, anak-anak menjadi robot yang patuh, tanpa kemampuan kritis dan kreativitas berpikir.

Padahal sejatinya, pendidikan adalah pembebasan anak dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan juga adalah proses penyadaran anak atas situasi sekitarnya, dan mengajaknya untuk mengambil sikap yang tepat atas berbagai situasi itu. Dalam arti ini, pendidikan adalah pembentukan proses berpikir manusia untuk secara cerdas dan tepat menanggapi situasi kehidupannya. Pemahaman inilah yang terlupakan dari dunia pendidikan kita.

Bisnis dan Ekonomi

Bidang bisnis juga mengalami penyempitan yang sama. Bisnis semata-mata disempitkan menjadi proses untuk mengumpulkan keuntungan semata, jika perlu dengan cara-cara yang tidak baik. Padahal,

bisnis adalah soal tata kelola untuk menciptakan produk-produk yang bermutu, maupun pelayanan-pelayanan yang baik kepada masyarakat. Di dalam bisnis, keuntungan adalah akibat logis dari mutu, dan bukan tujuan utama.

Ekonomi juga disempitkan menjadi pengamatan pada data statistik semata, yang seringkali berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan. Sejatinya, ekonomi juga adalah soal tata kelola perdagangan dan transaksi barang, uang, dan jasa di dalam masyarakat, supaya bisa menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Dalam hal ini, data statistik adalah alat bantu analisis masalah dan pembuatan kebijakan. Yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah kenyataan di lapangan, terkait dengan pemerataan kekayaan bagi seluruh rakyat. Ini semua tidak terjadi, ketika orang hanya terpaku pada data statistik yang seringkali dibuat dengan penyimpangan-penyimpangan metodologis, demi alasan efisiensi dan efektivitas.

Agama, Seni, dan Kepemimpinan

Agama di Indonesia pun juga mengalami penyempitan menjadi semata-mata kumpulan aturan, larangan, dan ritual semata. Agama kehilangan spiritualitasnya yang justru menjadi lambang kesucian dan hubungan manusia dengan yang transenden itu sendiri.

Kepemimpinan di berbagai bidang pun disempitkan menjadi semata-mata soal kerapihan administrasi. Kemampuan pemimpin untuk memotivasi dan memberikan inspirasi ke arah tujuan-tujuan yang baik telah hilang, dan digantikan dengan semata-mata dengan soal pemberian tanda tangan, dan kerapihan dokumen semata.

Seni pun disempitkan semata menjadi pemuas selera pasar dan konsumen. Seni sebagai ekspresi otentik dari penghayatan diri atas peristiwa-peristiwa kehidupan sudah nyaris tak terdengar. Di sisi lain, penelitian ilmiah yang sejatinya untuk mengungkap kebenaran dan menemukan pengetahuan di berbagai bidang kini disempitkan semata sebagai pemburuan hibah dari pemerintah, ataupun sekedar untuk menambah poin untuk peningkatan karir dosen.

Matinya Akal Sehat

Ini semua adalah tanda-tanda dari apa yang disebut Dahlan Iskan sebagai pembunuhan akal sehat. Artinya, akal sehat kita tahu, bahwa ada yang salah. Namun, karena kita merasa tak berdaya untuk memperbaiki kesalahan, maka kita pun beradaptasi. Akal sehat kita melemah, dan kini telah menyesuaikan dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Hannah Arendt menyebutnya sebagai banalitas kejahatan, yakni kejahatan yang tak lagi dilihat sebagai kejahatan, tetapi sebagai sesuatu yang “biasa-biasa saja”.

Dalam konteks ini, kita membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir progresif, yakni orang-orang yang berani menggugat dan mempertanyakan segala sesuatu yang ada, menemukan kelemahan di dalamnya, dan berjuang untuk menambal kelemahan-kelemahan itu, atau mengubah seluruh tatanan yang ada, supaya lebih baik untuk semua orang. Sayangnya, di tengah dunia yang semakin global ini, kehadiran orang-orang progresif justru disalahpahami sebagai pemberontak, penyebar ajaran sesat, atau orang-orang yang “bikin susah”. Sayangnya memang....

Defisit Rasa

Pengalaman manusia adalah sesuatu yang amat kaya. Ketika kita melihat sebuah gunung, berbagai unsur dalam diri kita bekerja, dan menghasilkan pengalaman yang amat kaya atas gunung tersebut. Gunung tidak dilihat semata sebagai tumpukan tanah dan batuan, tetapi juga sebagai inspirasi yang membuat kita merasa kagum, tenang, dan damai.

Ketika kita mengalami sesuatu, ada tiga unsur yang secara otomatis dan simultan bergerak dalam diri kita, yakni pikiran, perasaan, dan merangsang tanggapan kita atas sesuatu itu dalam bentuk perilaku. Kekayaan dan kerumitan realitas ditangkap langsung oleh panca indera, akal budi, dan rasa yang sudah selalu ada dalam diri kita. Dari proses campuran ketiga unsur kita, kita menanggapi realitas yang ada.

Namun, di Indonesia, sistem pendidikan yang ada memangkas kemampuan kita untuk menangkap dan menghayati kekayaan realitas yang ada. Pedagogi dan metode pembelajaran yang memusatkan pada kemampuan akal budi sebagian, yakni kemampuan untuk menghafal, tetapi tidak untuk berpikir kritis, pada akhirnya melibas kemampuan untuk merasa.

Akhirnya, realitas yang dipahami manusia pun hanya sebagian, yakni realitas rasional yang sebenarnya hanyalah bagian kecil dari kekayaan dan kerumitan dunia itu sendiri. Yang hilang dari Indonesia bukanlah kecerdasan, melainkan kemampuan untuk merasa. Ketika rasa hilang dari kehidupan manusia, yang tersisa adalah kekejaman, kekumuhan, dan kedangkalan hidup.

Rasa

Perlu juga diperhatikan, bahwa rasa itu bukanlah semata emosi. Emosi adalah bagian dari rasa, namun lebih kecil dan lebih sempit ruang lingkungannya. Sementara, rasa itu selalu mengandung emosi, namun lebih kaya dan lebih luas jangkauannya. Ketika orang menyamakan keduanya, mereka bagaikan menyamakan bukit di kaki gunung Semeru dengan gunung Semeru itu sendiri.

Sebagaimana diutarakan oleh filsuf asal Bandung, Ignatius Bambang Sugiharto, rasa di dalam diri manusia mampu menangkap totalitas dari realitas, dan kemudian mengekspresikannya secara indah dengan cara-cara estetik maupun puitik yang seringkali melampaui rasionalitas dan kesempitan bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, menurutnya, setiap orang perlu untuk mendalami estetika, supaya ia mampu memahami kerumitan serta kekayaan dunia, menghargainya, dan mengekspresikan penghargaan itu dengan cara-cara yang indah.

Di sisi lain, emosi, seperti sudah saya tulis sebelumnya, adalah bagian dari rasa, namun mempersempit kekayaan realitas pada satu sisi, dan menguncinya secara berlebihan. Emosi mengunci pada satu hal yang ada dalam realitas, misalnya hal negatifnya, lalu melebih-lebihkannya, sampai tak terkontrol. Emosi menolak untuk menghargai kekayaan realitas, dan memilih untuk secara sempit menafsirkan realitas, dan mendorong perilaku-perilaku manusia yang tak seimbang.

Pada hemat saya, rasa adalah unsur yang kurang dari begitu banyak bidang kehidupan di Indonesia. Ketika rasa tidak ada, yang kemudian tersisa, kekumuhan, kejahatan, dan kedangkalan hidup yang menjangkiti berbagai bidang kehidupan kita di Indonesia. Situasi ketanpa-rasa-an, atau krisis rasa, inilah yang perlu untuk kita hadapi bersama.

Krisis Rasa

Di dalam bidang politik, para politisi dan pemerintah negara kita kurang memiliki rasa dalam memimpin dan mengeluarkan kebijakan. Kemampuan mengambil posisi orang lain, dan berusaha merasakan apa yang dirasakannya, tidak tumbuh. Akibatnya, banyak kebijakan politik justru melukai hati rakyat, dan memperbesar masalah yang sudah ada.

Para pelaku bisnis dan pembuat kebijakan ekonomi di Indonesia juga miskin akan rasa. Mereka terpaksa pada upaya mencari dan menumpuk keuntungan, dan dengan proses itu menginjak martabat manusia, dan merusak alam. Para pembuat kebijakan ekonomi terpaksa pada data statistik, dan lupa, bahwa statistik adalah abstraksi dari realitas, dan tak pernah bisa menangkap apa yang sesungguhnya terjadi di dalam dunia.

Dunia pendidikan di Indonesia juga miskin akan rasa. Pendidikan berpusat pada pengembangan ketrampilan menghafal semata. Ujian juga hanya mengukur satu aspek dari diri manusia, yakni aspek kemampuan menghafal dan memuntahkan kembali ke dalam ujian, yang sebenarnya tak terlalu penting dalam menjalani kehidupan. Pendidikan rasa berusaha mengajak orang untuk jujur pada apa yang dirasakannya, ketika melihat dunia, dan berani mengekspresikan perasaan tersebut dengan cara-cara yang indah.

Di Indonesia, banyak kota-kota besar mengalami permasalahan tata kota. Banyak bangunan berdiri di tempat-tempat yang tidak pas, sehingga menciptakan kemacetan yang parah. Kebersihan pun menjadi masalah besar kota-kota di Indonesia, yang nantinya berujung pada bencana banjir yang jadi langganan tiap tahunnya. Ini semua terjadi, karena pemerintah daerah di kota-kota Indonesia tidak menggunakan rasa di dalam kerja-kerja mereka.

Rasa dan Karya

Di dalam setiap karyanya, orang harus selalu menggunakan rasa. Perhitungan untung rugi memang penting, tetapi rasa di dalam karya pun tak kalah pentingnya. Rasa menjamin, bahwa setiap karya manusia akan bisa menghasilkan keindahannya masing-masing, mulai dari tukang sapu, sampai dengan presiden. Jika setiap orang menggunakan rasa di dalam hidup dan karyanya, maka dunia ini, saya yakin, akan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali.

Banyak konflik antar kelompok, bangsa, dan individu terjadi, karena hubungan antar mereka tidak menggunakan rasa. Untung dan rugi menjadi dasar dari hubungan antar manusia. Ketika rugi lebih besar dari pada untung, hubungan pun terputus, serta potensi untuk terjadinya konflik pun semakin besar. Jika setiap orang menggunakan rasa dalam membangun hubungan dengan orang lainnya, perhitungan untung rugi pun menjadi relatif, dan kita bisa sungguh menemukan makna di dalam hubungan kita dengan orang lain.

Situasi krisis rasa tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi oleh seluruh dunia. Situasi ini telah menyiksa hidup banyak orang, menciptakan perang antar tetangga, dan membuat alam menjadi tempat yang semakin tak layak untuk ditinggali. Sudah saatnya, kita bergerak melampaui krisis rasa ini. Hidup manusia tidak akan pernah utuh dan bermakna, jika ia tidak mengasah rasanya untuk memahami kekayaan realitas, dan menggunakan rasa untuk menghargai keindahan hidup bersama orang lain.

Mencintai “Yang Tak Dapat Dicintai”

Apa yang anda lakukan, ketika anda berbeda pendapat dengan sahabat anda? Apa yang anda lakukan, ketika anda berkonflik tajam dengan kolega anda? Apa yang anda lakukan, ketika anda memiliki visi hidup dan keinginan yang berbeda ekstrem dengan kekasih anda? Biasanya orang akan mengambil satu pilihan, yakni pergi; cari pacar lagi, cari teman lagi, cari tempat kerja lain yang lebih cocok, atau cari kolega lain yang mengerti jalan pikiran kita. Apakah ini cara yang tepat untuk mengelola perbedaan dan silang pendapat?

Di dalam tulisan ini, dengan berbekal pemaparan yang amat menarik dari O’Dwyer, saya akan mencoba menjelaskan pandangan Žižek tentang cinta. Seperti biasa, pandangannya amat dipengaruhi oleh aliran filsafat sekaligus psikoanalisis yang ia alami selama ini. Sebagai upaya pengembangan, saya juga akan mencoba menarik konsekuensi logis pandangan Žižek khusus untuk konteks pernikahan. Bagi Žižek, cinta adalah suatu untuk mencintai yang seolah “tak dapat dicintai”. Cinta lahir dari

kebebasan, dan tidak pernah dapat diperintahkan, apalagi dipaksakan. Saya akan jelaskan lebih jauh.

Slavoj Žižek dikenal sebagai seorang filsuf psikoanalisis ternama di dunia.¹ Ia memiliki gaya yang unik dalam menyampaikan pemikirannya. Seringkali ia tidak menolak kontradiksi (bersatunya hal-hal yang berbeda, seperti jahat sekaligus baik, hitam sekaligus putih), melainkan melihatnya sebagai suatu gerak realitas yang alamiah.

Salah satu argumennya yang paling banyak tampil di berbagai forum adalah, bahwa budaya massa sekarang ini, mulai dari film sampai dengan berbagai bentuk gaya hidup, adalah suatu bentuk mitos ataupun tipuan yang menutupi realitas ganjil yang tersembunyi di baliknya. “Dia”, demikian tulis O’Dwyer, “bukan filsuf biasa, karena ia berpikir dan menulis dengan gaya yang ceroboh sekaligus menyenangkan, ia terus membuat filsafat dengan penuh resiko menjadi menyenangkan.” (O’Dwyer, 2012)

Titik tolak Žižek adalah salah satu ajaran Kristiani tentang cinta, yakni cintailah tetanggamu. Dalam arti ini, menurut saya, kata tetangga bisa diartikan sebagai orang lain, “yang lain” dari saya. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa itu orang lain, siapa itu “yang lain” dari saya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Žižek mengutip pendapat Lacan, orang lain, termasuk tetanggamu, adalah the real itu sendiri. The real adalah yang tak terduga, yang memecah kita dari rutinitas keseharian. “The real”, demikian tulis O’Dwyer tentang Žižek, “adalah orang lain dengan segala kelemahan, kerapuhan, keanehan, dan kesalahan yang sifatnya traumatik.” (O’Dwyer, 2012)

Mencintai orang lain berarti mencintai tidak hanya sisi-sisi baiknya, tetapi juga sisi-sisi traumatis yang tak terduga, yang terkandung di dalam dirinya. Mencintai yang terduga berarti tidak mencintai sama sekali, karena kita sudah menebak, dan mengkalkulasi dirinya. Mencintai baru bisa dianggap sungguh mencintai, ketika kita mencintai orang-orang yang tak terduga, yang tak dapat kita terka, yang tak dapat kita bungkus dalam kesempitan konsep pikiran maupun keinginan kita.

Di dalam dunia sehari-hari, kita sering mendengar kata-kata luhur, seperti toleransi, kasih universal, dan kesetaraan antar manusia. Menurut

¹ Tulisan ini diinspirasi sekaligus dikembangkan dari tulisan Kathleen O’Dwyer yang berjudul *Žižek on Love* dalam http://www.philosophynow.org/issues/77/Žižek_on_Love diakses 23 Mei 2012, 15.42

Žižek, di balik keluhuran kata-kata ini, ada keengganannya yang tersembunyi, yakni keengganannya untuk bersentuhan dengan “yang lain”, yang tak terduga, dan traumatik. Artinya, wacana yang bersifat luhur tentang cinta kepada manusia lain seringkali justru memamatkan upaya kita untuk sungguh mencintai “yang lain”, yang tak terduga, dan traumatik. Orang lain, sejatinya, selalu berbeda, dan selalu mengancam cara hidup dan gaya berpikir kita dengan keberbedaannya tersebut.

Berpikir tentang toleransi, kesetaraan, dan kasih jelas membuat kita berharap, bahwa orang lain akan juga bersikap sama, yakni bersikap baik pada kita. Di dalam realitas, harapan semacam ini tidak akan terwujud. Yang kita dapatkan, dari harapan semacam ini, adalah kekecewaan, karena orang lain ternyata tak dapat diduga, dan bahkan bertindak sama sekali tidak seperti yang kita harapkan. Orang lain, pada dasarnya, adalah traumatik dan mengancam. Cinta yang sesungguhnya adalah mencintai orang yang membuat kita traumatik dan merasa terancam, karena perbedaan yang ia tampilkan.

Pada titik ini, Žižek, sebagaimana dibaca oleh O’Dwyer, mulai berbicara soal hakekat dari manusia, apa artinya menjadi manusia. Tentu saja, seperti bisa langsung ditebak, konsep Žižek tentang manusia bernuansa ganjil dan gelap. Ia tidak berbicara tentang kemanusiaan universal yang bersifat luhur dan mulia, melainkan tentang manusia yang berbeda, yang lain, yang tak terduga, yang tak tertebak, yang mengancam stabilitas sosial yang sudah ada, manusia yang penuh dengan ketidakpastian dan kontradiksi pada dirinya sendiri. Dalam ketidakpastiannya itu, manusia menjadi sesuatu yang lain, yang terasing, dari apa yang umum, dari apa yang sudah diterima sebagai sesuatu yang baku.

Orang lain adalah suatu realitas yang unik, yang tak dapat kita kurung dalam harapan ataupun pikiran yang kita punya. Orang lain adalah realitas yang nyata, yang tak dapat kita hindari dengan ilusi-ilusi harapan yang kita punya tentangnya. Membayangkan bahwa orang lain bisa selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan pikirkan adalah ilusi yang menciptakan konsep-konsep luhur, seperti toleransi, dan kasih universal.

Mudah bagi kita untuk mencintai orang-orang miskin, orang-orang yang tak mampu, sakit, kelaparan, ataupun kaum minoritas yang jinak. Mudah juga bagi kita, demikian kata Žižek, untuk mencintai orang lain, selama orang lain itu tidak mengganggu hidup kita, cukup jauh dari kita,

dan ada jarak yang terus memisahkan saya dengan mereka. Namun, itu bukanlah cinta. Itu hanya tawar menawar. Cinta yang sejati bisa terlihat, ketika orang masuk ke dalam hidup kita tanpa jarak, tanpa rencana, dan kita bisa tetap mencintainya.

Kedekatan itu seringkali menyedihkan. Perbedaan seringkali membuat kita cemas, membuat rutinitas yang telah kita bangun menjadi hancur, dan harus dipikir ulang. Perbedaan yang dekat dengan kita memaksa kita berpikir ulang tentang semuanya. Ketidakmampuan mengelola perbedaan yang mendekat secara tajam dalam hidup kita bisa membuat cinta berubah menjadi kebencian. Dalam arti ini, cinta dan kebencian hanyalah setipis benang. Bahkan Žižek mengatakan, bahwa cinta mengandaikan kemungkinan adanya kebencian di dalamnya.

Mencintai berarti mencintai yang traumatis, yang tak terduga, dan yang mengancam kita dengan perbedaan yang ia tawarkan. Cinta adalah komponen utama dalam pernikahan. Pernikahan yang mengharapkan adanya harmoni akan berujung pada kekecewaan yang mendalam. Justru di dalam pernikahan, belajar dari Žižek, kita perlu untuk siap pada yang tak terduga, tak tertebak, yang mengancam kita untuk mengubah segala hal yang kita pegang selama ini. Pernikahan adalah the real itu sendiri.

Di dalam pernikahan, mudah sekali untuk mencintai orang yang memberi kita kedamaian. Mudah sekali juga untuk mencintai orang yang memberikan kita kebahagiaan. Namun, realitas tidak seperti itu. Banyak pasangan berpisah, karena mereka tidak siap pada yang tak terduga, yang mungkin muncul di dalam hubungan mereka. Di dalam pernikahan, mencintai berarti mencintai “yang traumatis”. Selain itu, bersiaplah untuk bercerai.

Pola berpikir yang sama bisa diterapkan di arena politik. Di alam demokrasi, perbedaan adalah udara yang kita hirup sehari-hari. Yang juga mesti diingat adalah, demokrasi mengandaikan adanya cinta. Bukan cinta yang mengharapkan orang lain (dari etnis, suku, ras, ataupun agama lain) untuk bertindak sesuai keinginan kita, melainkan cinta yang berusaha untuk melampaui dirinya sendiri dengan mencintai orang-orang lain (dari etnis, suku, ras, ataupun agama lain) yang seolah tak dapat dicintai.

Di tengah kerumitan hidup dan kekacauan realitas, Žižek mengajak kita untuk tetap untuk mencintai, terutama mencintai mereka “yang tak dapat dicintai”.

Gelembung Institusi

Sudah lama Maria memiliki mobil. Ia membelinya dari seorang bapak yang sedang membutuhkan uang. Tentu saja, sampai sekarang, secara legal, mobil itu masih atas nama bapak tersebut. Setelah dua tahun mengendarai mobil yang telah ia beli itu, Maria punya keinginan untuk menjadikan mobil tersebut atas namanya sendiri. Ia pun pergi ke kantor resmi terdekat untuk mengurus balik nama mobil yang telah ia beli.

Sampai di kantor itu, Maria mengalami kesulitan. Ia dimintai beragam dokumen yang tak dijelaskan kegunaannya. Bahkan, ia diminta pergi ke berbagai macam kantor. Padahal, ia adalah wanita yang sehari-hari bekerja mencari nafkah untuk mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Inilah lingkaran birokrasi yang mencekik niat baik Maria. Akhirnya, ia menggunakan calo, karena tak punya waktu, tak punya pengetahuan, dan tak punya cukup tenaga serta kesabaran untuk berurusan dengan birokrasi yang terlalu rumit.

Anton punya pengalaman agak mirip. Ia hendak melanjutkan studi ke luar negeri. Ia mendapat beasiswa penuh beserta dengan biaya hidup. Masalah muncul, ketika ia hendak mengurus perpanjangan paspor. Di kantor resmi pengurusan paspor, ia diminta mengantri berjam-jam tanpa kepastian. Ia diminta untuk membeli bermacam-macam hal, serta dilempar ke berbagai kantor. Ia bahkan diminta untuk kembali setelah beberapa hari.

Padahal, sama seperti Maria, ia juga perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta mengembangkan dirinya.

Pengalaman Kristian lain lagi. Baru-baru ini, ia kecopetan. Dompet beserta uang dan kartu-kartu resmi kependudukannya hilang. Ia pun melapor untuk mendapatkan pertolongan, serta untuk mengurus surat-surat legalnya yang hilang.

Tak disangka-sangka, ia mengalami kesulitan besar. Ia harus menyuap beragam orang, hanya untuk mengurus kartu-kartunya yang hilang, karena kecopetan. Seperti kata peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dialami oleh Kristian. Tak hanya uang dan dompet yang hilang, ia pun harus kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran lagi, karena kerumitan dan korupsi birokrasi. Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Maria, Anton, dan Kristian?

Pada hemat saya, pengalaman mereka bertiga mengajarkan kita satu hal, bahwa banyak institusi-institusi penting di Indonesia tidak lagi menjalankan perannya. Pendek kata, Indonesia mengalami krisis institusi, dalam arti, institusi-institusi yang ada tidak lagi menjalankan perannya secara maksimal. Padahal, krisis institusi, perlahan namun pasti, akan menghancurkan suatu negara.

Apa yang mendorong kemajuan suatu negara? Menurut Michael Porter, ahli manajemen strategik dan filsuf bisnis asal Universitas Harvard, AS, kemajuan didorong oleh tingkat produktivitas suatu area. Artinya, semua komponen yang ada di dalam suatu masyarakat dipergunakan untuk mendorong masyarakat tersebut untuk menghasilkan produk-produk yang bermutu, baik barang ataupun jasa. Di dalam proses tersebut, kehadiran institusi-institusi yang menopang kehidupan publik amatlah penting.

Dari argumen di atas, kita bisa menarik kesimpulan, bahwa kehadiran institusi amatlah penting untuk mendorong produktivitas suatu masyarakat, yang berarti juga mendorong kemajuan masyarakat tersebut. Institusi, seperti kantor pemerintahan, pelayanan hukum, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya, yang efektif, efisien, dan tidak korup jelas akan mendukung produktivitas. Dan, seperti sudah disinggung sebelumnya, produktivitas akan mendukung kemajuan suatu bangsa.

Di dalam masyarakat modern, peran institusi amatlah besar, tidak hanya untuk mendorong produktivitas, tetapi juga untuk menjamin, bahwa keadilan dan kemakmuran bisa dirasakan oleh semua rakyat. Institusi

hukum, mulai dari kepolisian sampai Mahkamah Agung, berperan amat penting untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Institusi-institusi lainnya, baik milik pemerintah ataupun swasta, berperan amat penting di dalam memberikan kemakmuran lahir batin bagi seluruh rakyat.

Di sisi lain, institusi juga menopang demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang berdiri di atas pilar-pilar institusi, mulai dari Komisi Pemilihan Umum, Perwakilan Rakyat, kabinet pemerintahan, sampai dengan RT dan RW di wilayah masing-masing. Jika institusi-institusi yang menopang demokrasi tersebut busuk, maka demokrasi juga akan ikut menjadi busuk. Jika demokrasi busuk, maka proses untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada kehendak kolektif rakyat juga akan terhambat.

Dengan kata lain, kegagalan institusi berarti juga kegagalan demokrasi. Kegagalan institusi juga berarti kegagalan proses untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi semua. Ketika ini terjadi, hidup bersama akan terasa begitu menyakitkan. Segala hal yang sebenarnya mudah menjadi sulit, karena kerumitan dan korupsi birokrasi yang ada di dalam berbagai institusi. Ketika korupsi menjadi paradigma sehari-hari institusi, maka keadilan dan kemakmuran hanya merupakan mimpi belaka yang tak akan pernah terwujud.

Hal yang amat kecil, seperti bekerja di berbagai institusi tempat kita berada dengan kesungguhan hati, efisiensi, efektivitas, dan sikap anti korupsi, bisa mendorong gerak perubahan yang amat besar menuju terciptanya Indonesia yang nyaman untuk ditinggali, adil, serta makmur. Kesadaran semacam inilah yang kita perlu bangun bersama di berbagai institusi tempat kita berkarya.

Kisah “Kasih” Jono dan Sinta

Namanya adalah Jono. Ia tinggal di sebuah kota besar di Indonesia. Sama seperti banyak anak remaja lainnya, Jono punya banyak teman, baik di sekolah, maupun di kampung tempat tinggalnya. Sejak SMP, ia sering berkumpul bersama teman-temannya.

Di waktu senggang, mereka merokok bersama. Siapa yang tidak merokok akan dianggap lemah, cemen. Jono pun ikut merokok. Ia membeli rokok dari uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya, atau meminta dengan paksa dari adik kelasnya yang lebih lemah.

Jono sebenarnya anak pemalu, terutama jika bergaul dengan perempuan. Namun, jika ia bersama teman-temannya, sambil merokok, ia sering menggoda perempuan yang kebetulan lewat di depannya. Ya, sama seperti anak muda lainnya, Jono takut jika sendirian, namun berani jika bersama-sama temannya.

Sama seperti banyak anak muda lainnya di Indonesia, Jono tak peduli soal kebersihan. Sehabis jajan, ia sering membuang sampahnya di jalan raya, walaupun sudah diajarkan berkali-kali, bahwa sampah itu

merusak keindahan kota, dan menjadi penyebab utama terjadinya banjir di kota-kota besar.

Puntung rokok pun ia buang di got paling dekat. Akhirnya, ketika hujan deras, got rumahnya mampet. Rumahnya pun banjir. Jono tetap tak peduli. Yang penting ia bisa tetap tampak jagoan di hadapan teman-temannya.

Jono juga suka naik motor. Sebenarnya, ia tak punya SIM, dan tak ada rencana untuk mengurusnya. Seringkali, ia naik motor tanpa helm. Ia juga senang sekali mengejar. Lampu lalu lintas tak dipedulikannya. Di malam hari, ia juga suka naik motor bertiga dengan teman-temannya, bahkan kadang-kadang berempot. Ia tak peduli keselamatan orang lain dan dirinya, selama ia bisa tampak seperti jagoan di hadapan teman-temannya.

Jono juga suka telat, jika berjanji. Ia selalu telat mengumpulkan tugas sekolahnya. Akibatnya, nilainya jelek. Jika janji untuk berjumpa dengan temannya, bukan Jono namanya, jika ia tidak datang telat, lama setelah semua teman-temannya datang. Jono tetap tak peduli.

Sama seperti anak-anak muda Indonesia pada jamannya, Jono tak suka politik. Ia malas berpikir yang sulit-sulit. Ia lebih senang nongkrong, nonton sinetron murahan, film bioskop murahan, atau pergi ke mall dengan uang pas-pasan. Ketika Pemilu dan Pilkada sudah mulai, Jono siap menjual suaranya pada penawar tertinggi yang biasanya memberikan makanan, kaos, dan uang sekedarnya.

Di dalam perjalanan hidupnya, Jono bertemu Sinta, calon istrinya.

Perjumpaan

Sinta adalah tipikal anak perempuan Indonesia pada umumnya yang tinggal di kota-kota besar. Sedari kecil, ia suka sekali menonton film Korea dengan cerita romantis, serta aktornya yang, menurutnya, cakep-cakep. Ia juga suka nonton film sinetron di malam hari, walaupun ceritanya tak kreatif, dan akting para aktor dan aktrisya amat jelek.

Sinta amat mencintai agamanya. Segala sesuatu dikaitkan dengan agamanya. Jika ditanya pendapat tentang suatu masalah, Sinta malas berpikir sendiri, dan mengutip apa kata agamanya. Bahkan ketika ujian di sekolahnya, dan diminta pendapatnya tentang suatu hal, Sinta pun juga mengutip agamanya secara harafiah, tanpa sentuhan kreativitas dan orisinalitas sedikit pun.

Sinta juga suka mematahkan janji. Ia suka telat datang ke kampus, suka telat mengumpulkan tugas, dan suka telat, jika berjanji berjumpa dengan temannya. Ia sering menggunakan alasan-alasan yang terdengar saleh untuk menutupi kesalahannya tersebut. Agama seolah membimbingnya, walaupun tindakan-tindakannya banyak merugikan orang lain.

Sinta pergi ke berbagai tempat dengan mengendarai sepeda motor otomatis yang dibelikan ayahnya. Ia mengendarai dengan pelan, supaya aman di jalan. Tak lupa sebelum berangkat, ia selalu berdoa mohon perlindungan dari Tuhan.

Walaupun begitu, ia selalu menyetir di tengah atau kanan jalan dengan kecepatan rendah. Akibatnya, banyak pengendara lain terganggu. Padahal, peraturannya sudah jelas, bahwa pengendara dengan kecepatan rendah harus menggunakan lajur kiri, bukan di tengah, apalagi di kanan. Akan tetapi, Sinta tetap tak peduli. Ia yakin, Tuhan melindunginya.

Jika ditegur oleh pengendara lainnya, Sinta tetap cuek. Ia tak peduli, walaupun tindakannya membahayakan diri dan orang sekitarnya. Ia yakin, setelah berdoa, Tuhan pasti melindunginya.

Tak heran, Sinta tak suka politik. Sama seperti Jono, ia tak suka memikirkan hal-hal sulit dan dalam. Ia tak peduli dengan politik. Ia lebih suka nonton film Korea, sinetron di TV, film-film horor dan komedi romantis di bioskop terdekat, main Facebook, Twitter, baca komik anak kecil, atau berdoa meminta banyak hal pada Tuhannya. Dengan gaya hidup seperti inilah, nantinya, Sinta berjumpa dengan Jono, calon suaminya.

Kisah Kasih

Karena kesamaan karakter dan kesukaan, Jono dan Sinta pun menjadi sepasang kekasih. Mereka menikah, membina sebuah keluarga, dan mempunyai anak laki-laki. Sebagai ayah, Jono mengajarkan nilai-nilai “jagoan” yang ia ketahui sepanjang hidupnya. Sebagai ibu, Sinta mengajarkan nilai-nilai agamis untuk dipatuhi secara mutlak oleh anaknya.

Si anak pun bingung. Di satu sisi, ia harus tampak jagoan di hadapan teman-temannya. Di sisi lain, ia harus mematuhi secara mutlak nilai-nilai agama, tanpa pertanyaan apapun. Di waktu senggang, ia diajak nonton film-film komedi romantis, film-film horor murahan, diajak main fesbuk bersama orang tuanya, dan diajak mengebut di jalan bersama ayahnya.

Jono, Sinta, dan anaknya hidup sebagai keluarga yang apolitis, karena tidak suka berbicara urusan yang rumit-rumit. Mereka suka buang sampah sembarangan, tak peduli kebersihan, tak peduli peraturan lalu lintas, suka berdoa meminta banyak hal pada Tuhan, dan, sekali lagi, tak peduli sama sekali soal-soal politis yang terkait dengan kehidupan bersama.

Jono adalah tipikal orang Indonesia pada umumnya. Sinta pun juga. Keluarga mereka adalah representasi (walaupun tidak 100 persen akurat) dari keluarga Indonesia pada umumnya. Dengan kata lain, mayoritas (tidak 100 persen) orang Indonesia memiliki karakter dan kebiasaan yang sama dengan keluarga Jono, Sinta, dan anaknya.

Pada level yang lebih luas, bangsa kita sudah sepakat, bahwa bentuk pemerintahan demokratis, dengan kepentingan rakyat sebagai tolok ukur utama, adalah jalan yang paling tepat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, kekuatan demokrasi adalah mutu dari rakyat suatu negara, bukan pimpinannya semata. Pertanyaan kritisnya disini adalah, jika mayoritas keluarga di Indonesia hidup dengan pola karakter dan kebiasaan seperti keluarga Jono dan Sinta, mampukah negara kita membangun demokrasi yang sehat, yang siap mengantar rakyatnya menuju keadilan dan kemakmuran? Anda sendiri yang bisa menjawabnya.

Gelembung “Asal Luar Negeri”

Alkisah hiduplah seorang pemimpin fakultas di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Selama ia menjalani masa pendidikan sampai level doktoral, ia tak pernah ke luar negeri. Ia menjalani pendidikannya di Indonesia. Ia pun merasa iri dengan teman-temannya yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di luar negeri.

Setelah ia menjadi dekan, ia pun membuat kebijakan, agar semua dosen di bawah pimpinannya melanjutkan studi di luar negeri, di universitas apapun, asal di luar negeri. Pada hemat saya, ini adalah kebijakan yang amat salah kaprah. Ada dua alasan. Pertama, tidak semua institusi pendidikan di luar negeri itu bagus. Kita tidak boleh terjebak pada cara berpikir “asal luar negeri”.

Yang kedua, banyak paradigma penelitian di luar negeri dilakukan dalam konteks sosial mereka. Artinya, apa yang mereka temukan, dan cara berpikir di belakangnya, tidak selalu cocok untuk digunakan untuk memahami situasi Indonesia. Cara berpikir “asal luar negeri” ini mencampurkan kedua hal itu, tanpa berpikir sama sekali. Tak heran, banyak

lulusan luar negeri di Indonesia tidak mampu menyumbangkan kontribusi nyata bagi perkembangan bangsa.

Si dekan ini suka sekali mengundang tamu-tamu dari luar negeri. Bayaran yang ia tawarkan kepada mereka pun juga amat besar, jauh lebih besar dari apa yang dibayarkan pada para tenaga pengajar “pribumi”. Dia senang ikut seminar dan konferensi di luar negeri, walaupun tidak mendapat apapun, kecuali prestise semata. Ironisnya, dekan, atau bahkan rektor, semacam ini tidak cuma satu di Indonesia, tetapi amat banyak. Pertanyaan kecil saya adalah, mau dibawa kemana dunia pendidikan kita, jika para pemimpin institusi pendidikan kita masih menggunakan cara berpikir “asal luar negeri”, tanpa sikap kritis sama sekali?

Bule-isme

Alkisah ada sebuah restoran di daerah Jakarta, Indonesia. Restoran ini mempekerjakan banyak sekali koki dari berbagai belahan dunia. Ada dua orang yang paling menonjol. Yang satu orang Indonesia. Sementara yang lain adalah orang yang berasal dari Eropa.

Mereka memiliki beban kerja yang sama. Tanggung jawab dan target kerjanya juga sama. Namun, pendapatan orang yang berasal dari Eropa berpuluh kali lipat, daripada orang Indonesia dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Hal ini merupakan kebijakan dari manajemen restoran yang sebenarnya adalah orang Indonesia juga.

Pola semacam ini bisa ditemukan di berbagai bidang bisnis, mulai dari restoran, hotel, universitas, sekolah, perusahaan minyak, dan sebagainya. Dengan tanggung jawab yang sama, orang-orang Eropa dan Amerika yang berkarya di Indonesia mendapatkan gaji berpuluh kali lipat dari pada orang Indonesia yang bekerja di tempat yang sama, dengan tanggung jawab yang sama.

Saya menyebut beragam fenomena ini sebagai “bule-isme”, yakni pemujaan pada orang-orang bule. Apa yang orang-orang Bule lakukan selalu dianggap lebih daripada yang orang-orang Indonesia lakukan, walaupun, jika ditelaah lebih obyektif, proses dan hasilnya sama saja. Apa sebenarnya akar dari semua fenomena ini, yakni fenomena bule-isme dan pola berpikir “asal luar negeri”?

Mentalitas Kita

Kita memuja segala sesuatu yang berasal dari luar negeri, terutama dari Eropa dan Amerika. Mereka yang selesai belajar dari sana dianggap lebih mampu, padahal belum tentu. Banyak sekali lulusan Amerika dan Eropa yang tak mampu memberikan kontribusi banyak pada perkembangan bangsa, dan hanya hidup dengan prestise semu belaka. Orang-orang yang berasal dari sana dianggap lebih kompeten, padahal tidak ada kepastian sama sekali, bahwa orang-orang “bule” lebih mampu bekerja, daripada orang Indonesia.

Cara berpikir yang mengagungkan “luar negeri” seraya menginjak bangsa sendiri inilah yang saya sebut sebagai pola pikir bangsa terjajah. Harus saya tegaskan, bahwa bangsa kita sama sekali belum merdeka dari jajahan asing, baik secara politik, ekonomi, dan, terutama, dari cara berpikir. Kita masih hidup sebagai bangsa terjajah, dan itu terlihat jelas dari sikap kita yang suka “menjilat” orang-orang bule, dan orang-orang luar negeri lainnya.

Bangsa kita masih merasa inferior di hadapan bangsa-bangsa asing lainnya. Kita belum menemukan kebanggaan pada jati diri kita sebagai bangsa. Keindonesiaan masih merupakan barang langka yang nyaris punah di Indonesia. Akibatnya, kita selalu merasa rendah diri, dan kemudian bertindak untuk semata-mata menjilat bangsa asing lainnya, sambil juga merendahkan kualitas kerja bangsa sendiri. Mental inferior di hadapan bangsa asing dan mental asal luar negeri inilah yang, pada hemat saya, menjadi salah satu musuh pendidikan dan pengembangan budaya di Indonesia.

Kebenaran, Kebaikan, dan Keindahan

Apa yang benar harus selalu mengikuti standar luar negeri (Eropa dan Amerika). Apa yang ilmiah harus selalu mengikuti standar luar negeri. Bahkan harga minyak milik kita sendiri pun harus selalu mengikuti standar luar negeri. Inilah gejala-gejala dari bangsa yang menderita penyakit inferioritas dan penyakit “asal luar negeri”.

Apa yang baik juga selalu mengikuti standar luar negeri, terutama Eropa dan Amerika. Moralitas dan tata krama pun tidak dianggap “eksis”, jika tidak sejalan dengan tata krama dan moralitas luar negeri. Sambil memuja kebaikan orang-orang bule yang berasal dari luar negeri, kita

tertawa-tawa menghina bangsa sendiri, dan melanjutkan hidup sebagai bangsa terjajah dan bodoh, seperti pada masa penjajahan Belanda dulu.

Apa yang indah dan cantik pun selalu mengikuti standar luar negeri. Orang Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi putih, seperti orang luar negeri. Padahal, kulit putih itu kulit lemah, dan jauh lebih tidak sehat, daripada kulit coklat atau kulit hitam yang tebal pigmennya. Lukisan orang luar negeri juga selalu dihargai lebih tinggi, daripada lukisan anak bangsa sendiri, dengan teknik dan kedalaman refleksi seni yang sama. Dengan melanjutkan pola berpikir semacam ini, kita terus akan menjadi bangsa yang terbelakang, terjajah, inferior, dan, terus terang saja, memalukan!

Lalu Bagaimana?

Yang harus ditegaskan adalah, bahwa orang bisa belajar dimanapun, baik di luar negeri, ataupun di dalam negeri. Yang perlu terus dibawa adalah, baik ketika di luar ataupun dalam negeri, baik ketika berhadapan dengan orang asing ataupun orang pribumi, sikap kritis dan skeptis yang sehat dan konstruktif. Dua hal itu yang terus ada, supaya kita tidak terjebak menjadi bangsa yang bermental penakut dan penjilat, sambil menjadi penindas bangsa sendiri, seperti yang sekarang ini terjadi.

Yang paling penting bukanlah dari mana kamu berasal, atau di mana kamu sekolah, tetapi apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan komunitas tempatmu hidup dan berkarya. Dan ini seringkali tidak ada kaitannya dengan dari mana kamu berasal, atau di mana kamu menyelesaikan pendidikan. Kita tak boleh semata menilai orang dengan semata dari mana ia berasal, atau di mana ia sekolah, melainkan dari apa yang secara nyata ia berikan untuk mengembangkan komunitas tempatnya hidup dan berkarya.

Lebih dalam lagi, ini adalah soal Keindonesiaan, yakni kecintaan dan kebanggaan kita pada bangsa kita, tempat kita lahir, hidup, dan berkarya. Kita boleh membenci pemerintah, karena sikap korup, dan kebijakan-kebijakan irasional yang dikeluarkannya. Kita boleh membenci orang-orang yang berpikir fanatik, sempit, dan bodoh, yang notabene adalah anak bangsa kita juga. Namun, kita tidak boleh membenci bangsa Indonesia, dengan segala sejarah dan kisah perjuangannya, hanya karena pemerintahnya korup, atau sebagian kecil warganya berperilaku bodoh, dan picik.

Sebaliknya, dengan hati yang terbakar dan pikiran yang jernih, kita bisa terus berkarya dibarengi dengan sikap kritis dan kreatif untuk mengembangkan bangsa kita. Kita bisa mulai menyembuhkan diri dari penyakit “asal luar negeri”, dan mentalitas “bule-isme”. Kita bisa mulai merasa bangga dengan melihat sisi-sisi baik dari bangsa kita yang mungkin kita abaikan sebelumnya, karena masih terkena penyakit “asal luar negeri” dan “bule-isme”. Saya rasa, sekarang sudah waktunya bangsa kita sungguh-sungguh merdeka, terutama merdeka dari penjajahan cara berpikir.

Menata Hasrat

Manusia adalah makhluk yang terdiri dari banyak aspek. Salah satu aspek yang paling menentukan adalah hasrat. Hasrat menampakkan dirinya dalam emosi manusia. Kedua hal ini, yakni hasrat dan emosi, menurut Thomas Aquinas, filsuf Eropa Abad Pertengahan, pada dasarnya adalah sesuatu yang baik. Keduanya ada dalam diri manusia secara alamiah, dan membantu manusia untuk mencapai kebaikan.

Hasrat dan Emosi Manusia

Thomas Aquinas berpendapat, bahwa ada dua macam hasrat. Yang pertama adalah hasrat-hasrat fisik manusia, seperti hasrat untuk makan, seks, dan dorongan-dorongan fisik lainnya. Yang kedua adalah hasrat-hasrat yang bersifat intelektual, seperti hasrat untuk belajar, untuk ingin tahu, dan berbagai kegiatan intelektual lainnya. Semuanya ada secara alamiah di dalam diri manusia, dan secara mendasar, semuanya adalah baik.

Di dalam hidup manusia, emosi dan akal adalah dua aspek yang berbeda, namun selalu bekerja sama. Ketika manusia melihat sesuatu, dan menginginkan atau menolaknya, emosi dan akalnya secara otomatis bekerja sama untuk menghasilkan pengetahuan dan penilaian. Misalnya, ketika kita

melihat makanan yang enak, dan menginginkannya, emosi dan akal sudah langsung bekerja di dalam diri kita untuk membuat keputusan, tentang apa yang akan dilakukan dengan makanan itu.

Dalam konteks ini, yang perlu kita pelajari sebagai manusia adalah, bagaimana cara untuk menata hasrat serta dorongan-dorongan yang muncul di dalam diri kita? Aquinas menawarkan konsep “bekerja dengan emosi”, yang berarti belajar untuk menata hasrat dan emosi di dalam diri, serta mengarahkannya untuk membantu kita menjadi manusia yang baik. Saran praktisnya adalah, supaya kita, sebagai manusia, belajar untuk berpikir secara tepat. Jadi, cara terbaik untuk menata hasrat dan emosi adalah dengan berpikir secara tepat.

Melatih Pikiran

Di dalam setiap peristiwa, pikiran kita menciptakan penilaian, apakah suatu peristiwa itu baik, atau buruk. Dalam konteks ini, pikiran haruslah dilatih untuk melakukan penilaian yang tepat dan seimbang atas suatu peristiwa. Melatih pikiran berarti juga melatih hasrat, karena pikiran dan hasrat, walaupun berbeda, tetaplah selalu bekerja sama dalam setiap aktivitas berpikir maupun merasa manusia.

Pikiran harus dilatih. Pikiran yang terlatih akan menghasilkan penilaian yang tepat. Penilaian yang tepat akan membuat hasrat dan emosi kita juga bereaksi dengan tepat. Ini semua perlu untuk menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan, dan menjadi bagian utuh dari diri kita sebagai manusia.

Bagaimana cara melatih pikiran, sekaligus melatih hasrat dan emosi dalam diri kita? Langkah pertama, menurut Thomas Aquinas, adalah dengan mendengar emosi di dalam diri kita. Ketika kita marah atau sedih, kita perlu diam sejenak, mengambil jarak, dan mendengar apa yang hendak dikatakan oleh emosi ataupun hasrat yang menggelegak di dalam diri kita.

Setelah mendengarkan, Aquinas menyarankan, supaya kita mempertimbangkan semua emosi yang kita rasakan dengan akal budi yang kita miliki. Yang perlu diingat adalah, bahwa emosi dan hasrat manusia tidak selalu bisa dipercaya. Maka kita perlu berpikir, apakah emosi dan hasrat yang kita rasakan itu sungguh bisa dibenarkan, atau justru harus segera dihilangkan? Sebelum manusia sampai pada keutamaan diri, maka emosi dan hasrat yang ia punya harus terus dimurnikan dengan akal budi.

Hasrat dan Keutamaan

Jika manusia sudah memiliki keutamaan diri, yakni kebaikan-kebaikan diri yang menjadi ciri khas manusia, seperti kejujuran, keberanian, kerendahan hati, dan keadilan, maka hasrat dan emosi yang ia rasakan justru akan membawa dirinya pada kebaikan yang lebih tinggi. Ada saatnya kesedihan, sebagai sebuah emosi, adalah sesuatu yang baik, terutama saat kematian saudara atau sahabat. Begitu pula kemarahan adalah suatu emosi yang tepat, terutama ketika terjadi ketidakadilan.

Kata orang, semakin orang baik, semakin hatinya tenang. Ia tidak merasakan gejolak hasrat dan emosi lagi di dalam dirinya. Pandangan ini, menurut Aquinas, tidaklah tepat. Justru sebaliknya, semakin orang tumbuh dalam kebaikan, maka semakin ia merasakan hasrat dan emosi untuk berbuat baik, marah ketika melihat ketidakadilan, dan sedih, karena kematian saudara atau sahabat.

Emosi, hasrat, dan dan pikiran adalah tiga komponen yang bisa mengarahkan manusia pada kebaikan. Namun, ia harus menggunakan pikirannya untuk mempertimbangkan emosi dan hasratnya. Ia harus belajar untuk melatih pikiran, dan, dengan demikian, juga melatih emosi dan hasratnya, sehingga perlahan tapi pasti bisa menjadi manusia yang baik, yang berkeutamaan. Inilah inti pemikiran Thomas Aquinas tentang hasrat dan emosi manusia. ***

*Diinspirasi dari diskusi bersama Nicholas Lombardo di UNIKA Widya Mandala Surabaya, 16 Mei 2012. Ia adalah penulis buku *The Logic of Desire: Aquinas Approach*.*

Gelembung Hukum Rimba

Di Indonesia, kita hidup selalu dalam situasi ekstrem. Ketika Orde Baru berkuasa, tatanan politik dipaksa untuk stabil oleh militer. Stabilitas politik tercipta, namun memang bersifat semu dan sementara, karena berada di bawah todongan senjata. Kini di era Reformasi, kita hidup dalam anarki. Ketidakpastian menjadi raja, dan stabilitas nyaris hanya menjadi cita-cita.

Krisis Bangsa

Pelanggaran hukum terjadi setiap saat, namun hukuman yang menjamin keadilan tak kunjung datang. Pencuri terus mencuri, dan lolos dengan menyuap para penegak hukum. Provokator massa justru dijunjung tinggi, karena ia bergerak atas nama agama. Perusak kehidupan ratusan ribu orang kini justru mencalonkan diri menjadi pemimpin bangsa.

Pengadilan korupsi berubah menjadi tontonan massa. Keadilan tak juga terwujud, karena hukuman yang diberikan terlalu ringan, dan bahkan lubang untuk melakukan suap bertebaran tanpa bisa dikontrol. Inilah yang disebut sebagai tebang pilih, ketika hanya kasus-kasus korupsi yang

sensasional yang selidiki, sementara tindak korupsi lainnya, yang jauh lebih luas dan mengakar, lolos dari pandangan mata publik.

Pelaku tindak kriminal lolos dari genggamannya penegak hukum. Kepastian hukum hanya omong kosong belaka. Bahaya mengincar di segala tempat. Masyarakat hidup dalam rasa takut dan gelisah, karena setiap detik terancam kehilangan nyawa. Di dalam situasi ini, kita lebih tepat disebut sebagai 'negara hukum rimba'.

Tenaga kerja Indonesia di luar negeri terus mengalami penindasan dan ketidakadilan. Beberapa dihukum mati, tanpa melalui proses peradilan yang terbuka. Hak-hak asasi diinjak-injak, karena bangsa kita dianggap lemah di mata negara lain. Pemerintah tak berdaya, malah justru ikut mempersulit warganya sendiri dengan lingkaran birokrasi yang seringkali tak masuk akal.

Dunia pendidikan pun juga ikut menyiksa rakyat. Jutaan anak mengalami tekanan mental yang begitu dalam, karena mereka harus mengikuti ujian nasional yang, jika dipikir lebih dalam, tidak berfaedah apa-apa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Yang diuji bukan analisis ataupun sikap kritis, tetapi kemampuan menghafal fakta-fakta yang tak banyak gunanya di kehidupan nyata, khususnya di masa hadirnya Prof. Google di internet.

Arah bangsa kita tak jelas. Para pemimpinnya terpesona oleh harta dan kuasa, serta lupa mengusahakan kebaikan bersama. Para penegak hukum seolah tak punya otot dan nyali untuk menerapkan hukum yang sudah tertulis dengan seadil mungkin. Kita mengalami krisis jiwa bangsa.

Pada level politik, kepentingan sesaat untuk harta dan kuasa menjadi raja. Kepentingan menyandera niat baik, sehingga ia tak lagi menjadi bagian dari hidup bersama. Kepentingan sesaat menyandera demokrasi, sehingga tak lagi mampu menyuarakan kepentingan rakyat yang sesungguhnya, tetapi hanya kepentingan elit, ataupun kepentingan mayoritas yang tak berpikir.

Para penguasa politik tidak mengabdikan pada rakyat, melainkan pada hasrat kepuasan mereka sendiri. Kepentingan sesaat bagaikan Tuhan yang harus disembah, sementara keberpihakan pada kepentingan bersama hanya menjadi retorika kosong semata. Orang miskin dan kelompok minoritas hanya bisa tabah mengelus dada, karena hampir setiap saat harus menelan pil pahit ketidakadilan.

Negara Hukum Rimba

Politik Indonesia adalah politik hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang akan memperoleh segalanya. Siapa yang mayoritas, dialah yang akan menentukan kebijakan untuk semuanya, walaupun ketidakadilan terasa di seluruh getar nadir diri. Siapa yang berharta berlimpah, dialah yang akan menikmati surga dunia, walaupun harus mengorbankan sesamanya yang terus hidup menderita. Mereka yang cacat, kelompok minoritas, dan miskin harus mempersiapkan hati untuk terus hidup dalam kekecewaan.

Ekonomi Indonesia adalah ekonomi hukum rimba. Perusahaan-perusahaan multinasional mengeruk habis kekayaan bangsa, tanpa perlawanan dari pemerintah yang berkuasa. Orang Indonesia masih terpesona dengan orang asing, sehingga untuk pekerjaan yang sama, dan tanggung jawab yang sama, orang asing mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi dari orang Indonesia yang bekerja di tanah air mereka sendiri. Ironi yang sampai sekarang belum bisa saya pahami.

Dalam konteks pendidikan, berbagai institusi berlomba untuk menggunakan kata “internasional”. Padahal, tidak ada yang berubah dalam kurikulum dan paradigma pendidikan. Yang berubah hanya bahasanya saja, yakni bahasa Inggris. Dunia pendidikan di Indonesia kehilangan karakter lokalnya, dan terus berusaha menjilat pendidikan luar negeri yang belum tentu baik untuk kemajuan bangsa.

Pendidikan kita pun adalah pendidikan hukum rimba. Pendidikan hanya mengabdikan pada si kaya. Sementara si miskin mendapatkan pendidikan “sampah”, atau bahkan tak mendapatkan pendidikan sama sekali. Pendidikan hanya untuk si pintar. Sementara si “bodoh” dipaksa hidup dalam sistem sosial yang sama sekali tak menghargai martabat dirinya.

Beasiswa diberikan, tetapi hanya untuk si pintar. Si “bodoh”, namun kaya, mungkin bisa melanjutkan pendidikan, walaupun tak maksimal. Namun, banyak juga orang yang tidak hanya miskin, tetapi juga “bodoh”. Untuk orang-orang semacam itu, kepedihan, kekecewaan, dan ketidakadilan sistemik adalah pil hitam kehidupan yang harus selalu mereka telan bulat-bulat.

Di tengah situasi semacam ini, reformasi tidaklah cukup. Reformasi berarti membetulkan sebuah sistem yang memang dari dasarnya sudah rusak. Jadi, reformasi berarti memperkuat apa yang sudah rusak, yang berarti juga menciptakan kerusakan yang lebih dalam. Yang kita butuhkan sekarang adalah revolusi, yakni perubahan yang cepat, mendadak, mengakar, dan menyeluruh di seluruh sistem-sistem sosial di Indonesia. Siapa yang bisa melakukannya?

Filsafat, Ilmu Pengetahuan, dan Demokrasi Kita

Filsafat adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan. Ini adalah pernyataan faktual historis. Selama lebih dari 2500 tahun, filsafat mewarnai pemikiran dan kebudayaan Eropa, dan nantinya mempengaruhi seluruh dunia, seperti kita rasakan sekarang ini. Oleh karena itu, sampai sekarang, gelar pendidikan tertinggi masih menggunakan kata *Philosophy Doctor* (Ph.D) di negara-negara berbahasa Inggris, atau *Doktor der Philosophie* (Dr. phil) di negara-negara berbahasa Jerman.

Di sisi lain, walaupun sumbangannya dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan manusia tak bisa lagi diragukan, filsafat, sebagai disiplin akademik, terutama di Indonesia, mendapat amat sedikit perhatian. Beberapa orang berpikir, bahwa filsafat adalah sejenis mistik, dan terkait dengan dunia perdukunan. Beberapa orang lain berpikir, bahwa filsafat adalah hamba agama, maka harus selalu dipelajari dalam kaitan dengan agama. Tempat terhormat yang dulu diduduki filsafat, sebagai alat utama manusia untuk memahami dunia, kini digantikan oleh ilmu pengetahuan.

Filsafat dan Sains

Yang pasti adalah filsafat tidak terkait dengan dunia mistik, atau perdukunan. Filsafat juga tidak selalu terkait dengan agama, walaupun ada kajian filsafat agama. Filsafat juga berbeda dengan sastra, karena filsafat menekankan pencarian rasional untuk mendapatkan pengetahuan yang sifatnya intersubjektif. Dan yang terakhir, sebagaimana ditekankan oleh Julian Friedland, filsafat bukanlah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan. Filsafat memiliki metode yang unik untuk memahami dunia, dan menghasilkan pengetahuan yang unik pula tentang dunia.

Sekarang ini, aliran saintisme bertumbuh pesat. Aliran ini berpendapat, bahwa hanya ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan manusia pada kebenaran tentang kehidupan, pikiran, manusia, dan alam. Pandangan ini begitu kuat tertanam di dalam dunia ilmu pengetahuan sekarang ini. Bahkan, banyak filsuf yang sekarang ini mengabdikan dirinya untuk mengabdikan pada satu jenis ilmu pengetahuan. “Penelitian yang mereka lakukan”, demikian tulis Friedland, “biasanya berfungsi untuk menajamkan tombak ilmu pengetahuan, atau pembalut untuk membuat hasil penelitian ilmiah lebih diterima masyarakat umum.” (Friedland, 2012)

Ilmu pengetahuan, dengan pendekatannya yang bersifat kuantitatif dan eksperimental, merasa menjadi satu-satunya jalan untuk sampai pada kebenaran. Tidak ada alternatif lain. Seni, agama, filsafat, dan budaya hanya merupakan jalan-jalan sekunder yang statusnya lebih rendah daripada ilmu pengetahuan. Pada hemat saya, sejalan dengan Friedland, filsafat juga bisa menawarkan kebenaran yang sifatnya rasional dan intersubjektif (dipahami dan berguna bagi banyak orang). Bahkan, dalam banyak hal, pengetahuan yang ditawarkan filsafat jauh lebih rasional dan “berguna” untuk memperbaiki kehidupan banyak orang.

Pengetahuan Khas

Pengetahuan apa yang ditawarkan oleh filsafat? Jika ilmu pengetahuan bergulat dengan data hasil eksperimen yang sifatnya sementara, filsafat sibuk dengan analisis rasional dan logis tentang suatu konsep yang bisa menawarkan suatu bentuk pengetahuan yang lebih menyeluruh dan tahan lama. Pendekatan semacam ini, menurut Friedland, jika dilakukan dengan baik, akan menghasilkan pengetahuan yang sifatnya intersubjektif, dan berguna untuk menciptakan kebaikan bersama bagi

banyak orang. Ia menulis begini, “Pengukuran ilmu pengetahuan pada prinsipnya selalu dapat diubah tergantung pada pengamatan atau uji coba lain di masa datang. Sementara, argumen filosofis yang bagus seringkali mencapai tingkat keabadian”, dalam arti tahan lama, dan mencerahkan banyak orang. (Friedland, 2012)

Saya amat setuju dengan pendapat ini. Inilah sebabnya, saya amat menyukai filsafat, karena di dalamnya banyak terkandung argumen-argumen dan pengetahuan-pengetahuan yang amat dalam, yang bertahan lama, dan mencerahkan kehidupan. Sementara, ketika belajar ilmu pengetahuan, kita akan berpijak pada pengetahuan yang sifatnya terbatas, relatif, dan selalu berubah. Sejantik perubahan di dalam realitas akan membuat seluruh bangunan ilmu pengetahuan berubah, dan kita harus mulai dari “awal” lagi.

Dalam konteks era sekarang, menurut Friedland, filsafat harus menggunakan pendekatannya yang khas untuk membantu memahami dan memecahkan masalah-masalah kehidupan sekarang ini. Tugas filsafat adalah sebagai “penjaga akal budi”, yakni sebagai penjamin, bahwa akal budi manusia selalu digunakan secara maksimal untuk mencoba memahami dan memecahkan masalah-masalah kehidupan. Jika ilmu pengetahuan berurusan dengan fakta, maka filsafat berurusan dengan fakta sekaligus nilai yang memandu kehidupan manusia. Fakta dibangun dari eksperimen, sementara nilai dibangun dari analisis rasional dan logis atas konsep-konsep yang digunakan dalam hidup manusia.

Demokrasi Kita

Filsafat jelas amat dibutuhkan di dalam mempertahankan dan mengembangkan iklim demokrasi di Indonesia. Pada hemat saya, demokrasi kita terlalu “ilmiah”, dalam arti terlalu terpaku pada fakta, dan lupa berpijak pada nilai. Kita dibutakan oleh data dan fakta, serta lupa, bahwa kepemimpinan adalah soal membangun nilai sebagai dasar dan arah kehidupan bersama, dan bukan keterpakuan pada fakta-fakta kering kuantitatif semata, yang sifatnya amat sementara, labil, dan kerap kali menyesatkan, karena tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi.

Pengetahuan filosofis bisa menyediakan hal itu. Dengan melalui analisis yang logis dan rasional terkait dengan konsep-konsep yang penting untuk kehidupan bersama kita, seperti konsep keadilan, kemiskinan,

korupsi, kepemimpinan, demokrasi, dan bahkan soal seks, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih kokoh dan berguna untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan publik yang ada. Kita bisa hidup dengan nilai serta harapan yang rasional, dan tak lagi terjebak pada data ataupun fakta yang memang mengesankan, ketika dipandang mata.

Diinspirasi dan dikembangkan dari tulisan Julian Friedland, Philosophy Is Not a Science - NYTimes.com
<http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/04/05/philosophy-is-not-a-science/> 25 April 2012

Mengapa Kita Perlu Belajar Filsafat?²

Pernahkah anda bertanya dalam hati, apa tujuan hidup ini? Atau mengajukan pertanyaan, mengapa saya ada? Memang, agama memberikan jawaban. Namun, apakah anda puas dengan jawaban yang diberikan agama?

Jika anda tidak puas dengan jawaban dari agama, ataupun dari tradisi anda, maka belajar filsafat adalah sesuatu yang mesti anda lakukan. Setidaknya dengan mempelajari filsafat, anda bisa menemukan metode yang lebih tepat untuk memahami dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut.

Berpikir

Filsafat, pada hemat saya, bukan sekedar merupakan mata kuliah. Filsafat adalah suatu tindakan, suatu aktivitas. Filsafat adalah aktivitas

² Diolah dan dikembangkan dengan pemikiran saya sendiri dari <http://www.guardian.co.uk/education/2008/may/01/universityguide.philosophy?INTCMP=SRCH> 20 April 2012. 14.68.

untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia (apa tujuan hidup, apakah Tuhan ada, bagaimana menata organisasi dan masyarakat, serta bagaimana hidup yang baik), dan mencoba menjawabnya secara rasional, kritis, dan sistematis.

Untuk catatan, filsafat sudah ada lebih dari 2000 tahun, dan belum bisa (tidak akan pernah bisa) memberikan jawaban yang pasti dan mutlak, karena filsafat tidak memberikan jawaban mutlak, melainkan menawarkan alternatif cara berpikir.

Ketika belajar filsafat, anda akan berjumpa dengan pemikiran para filsuf besar sepanjang sejarah manusia. Sebut saja nama-nama pemikir besar itu, seperti Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Thomas Aquinas, dan Jacques Derrida. Pemikiran mereka telah membentuk dunia, sebagaimana kita pahami sekarang ini.

Beberapa mata kuliah yang diajarkan adalah filsafat moral, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat budaya, filsafat politik, filsafat sejarah, logika, eksistensialisme, dan sebagainya. Anda juga akan diajak memikirkan soal keadilan global, teori-teori demokrasi, dan etika biomedis. Untuk para profesional, filsafat juga amat berguna untuk memperluas wawasan berpikir.

Kemampuan-kemampuan Penting

Dengan belajar filsafat, anda akan mendapatkan beberapa ketrampilan berikut; memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif, dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga.

Dengan belajar filsafat, anda akan dilatih menjadi manusia yang utuh, yakni yang mampu berpikir mendalam, rasional, komunikatif. Apapun profesi anda, kemampuan-kemampuan ini amat dibutuhkan. Di sisi lain, dengan belajar filsafat, anda juga akan memiliki pengetahuan yang luas, yang merentang lebih dari 2000 tahun sejarah manusia.

Kemampuan berpikir logis dan abstrak, kemampuan untuk membentuk argumen secara rasional dan kritis, serta kemampuan untuk menyampaikan ide secara efektif, kritis, dan rasional, akan membuat anda mampu berkarya di berbagai bidang, mulai dari bidang informasi-

komunikasi, jurnalistik, penerbitan, konsultan, pendidikan, agamawan, ataupun menjadi wirausaha.

Para pengacara, praktisi hukum, praktisi pendidikan, pemuka agama, maupun praktisi bisnis akan mendapatkan wawasan yang amat luas, yang amat berguna untuk mengembangkan diri dan profesi mereka. Jika anda sungguh ingin mendalami filsafat, anda bisa melanjutkan studi sampai pada level master dan doktoral, dan kemudian mengajar di bidang filsafat.

Kemampuan-kemampuan Khusus

Dengan belajar filsafat, anda akan mampu melihat masalah dari berbagai sisi, berpikir kreatif, kritis, dan independen, mampu mengatur waktu dan diri, serta mampu berpikir fleksibel di dalam menata hidup yang terus berubah.

Filsafat mengajak anda untuk memahami dan mempertanyakan ide-ide tentang kehidupan, tentang nilai-nilai hidup, dan tentang pengalaman kita sebagai manusia. Berbagai konsep yang akrab dengan hidup kita, seperti tentang kebenaran, akal budi, dan keberadaan kita sebagai manusia, juga dibahas dengan kritis, rasional, serta mendalam.

Filsafat itu bersifat terbuka. Sekali lagi, filsafat tidak memberikan jawaban mutlak yang berlaku sepanjang masa. Filsafat menggugat, mempertanyakan, dan mengubah dirinya sendiri. Ini semua sesuai dengan semangat pendidikan yang sejati.

Filsafat mengajarkan kita untuk melakukan analisis, dan mengemukakan ide dengan jelas serta rasional. Filsafat mengajarkan kita untuk mengembangkan serta mempertahankan pendapat secara sehat, bukan dengan kekuatan otot, atau kekuatan otoritas politik semata.

Filsafat adalah komponen penting kepemimpinan. Dengan belajar berpikir secara logis, seimbang, kritis, sistematis, dan komunikatif, anda akan menjadi seorang pemimpin ideal, yang amat dibutuhkan oleh berbagai bidang di Indonesia sekarang ini. Jadi tunggu apa lagi? Mari belajar filsafat!

Memecah Gelembung bersama Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu adalah seorang pemikir Prancis yang hendak memahami struktur sosial masyarakat, sekaligus perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalamnya. Baginya, analisis sosial selalu bertujuan untuk membongkar struktur-struktur dominasi ekonomi maupun dominasi simbolik dari masyarakat, yang selalu menutupi ketidakadilan di dalamnya. Untuk itu, ia mengembangkan beberapa konsep yang diperolehnya dari analisis data sosiologis, sekaligus pemikiran-pemikiran filsafat yang ia pelajari.

Pierre Bourdieu lahir pada 1 Agustus 1930 di Denguin, Prancis. Ia meninggal pada 23 Januari 2002 di Paris, Prancis.³ Ia dikenal sebagai seorang intelektual publik yang lahir dari pengaruh pemikiran Emile Zola dan Jean-Paul Sartre. Konsep-konsep yang ia kembangkan amat berpengaruh di dalam analisis-analisis sosial maupun filsafat di abad 21. Sebelum meninggal, ia mengajar di lycée di Moulins (1955–58), University

³ Untuk memperkenalkan Bourdieu, saya menggunakan uraian dari <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/860434/Pierre-Bourdieu> 10 maret 2012

of Algiers (1958–60), University of Paris (1960–64), École des Hautes Études en Sciences Sociales (dari 1964), dan Collège de France (1982).

Di Prancis, ia mendirikan Centre for the Sociology of Education and Culture. Dia sudah menulis beberapa buku, antara lain *Sociologie de l'Algérie* (1958; *The Algerians*, 1962), *La Distinction* (1979; *Distinction*, 1984), *Le Sens pratique* (1980; *The Logic of Practice*, 1990), *La Noblesse d'état* (1989; *The State Nobility*, 1996), and *Sur la télévision* (1996; *On Television*, 1998). Tema-tema bukunya berkisar kritik terhadap konsep sekaligus praktek ekonomi neoliberal, globalisasi, elitisme intelektual, dan televisi.

Bourdieu juga menjadi editor untuk jurnal *Actes de la recherche en sciences sociales*. Pada 1989, ia mendirikan *Liber*, sebuah review atas karya-karya ilmiah di Eropa. Pada 2001 lalu, untuk menghormati karya-karyanya, dipublikasikan sebuah film dokumenter tentangnya. Judul film itu adalah *Sociology is a Combat Sport*. Film tersebut disambut dengan baik di Prancis.

Habitus⁴

Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan filsafati atas perilaku manusia. Dalam arti ini, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia, dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Habitus seseorang begitu kuat, sampai mempengaruhi tubuh fisiknya. Habitus yang sudah begitu kuat tertanam serta mengendap menjadi perilaku fisik disebutnya sebagai *Hexis*.

Saya adalah seorang dosen filsafat politik dan filsafat sains. Sejak kecil, saya terbiasa membaca buku. Ayah saya bekerja di toko buku, dan sering membawakan buku komik, novel, koran, serta majalah terbaru untuk saya. Dunia bacaan adalah dunia yang telah akrab di mata saya, sejak saya kecil.

Sewaktu SMU, saya tinggal di asrama. Di waktu-waktu kosong, karena tidak banyak hiburan, saya mulai membaca buku yang tebal-tebal.

⁴ Untuk selanjutnya saya terinspirasi dari uraian dan diskusi bersama Haryatmoko (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta) pada presentasinya di Surabaya, 4 April 2012.

Akhirnya, kegiatan membaca pun menjadi suatu kebutuhan yang amat penting untuk saya. Saya seolah tidak bisa hidup, tanpa membaca.

Sewaktu kuliah, saya diminta banyak menulis paper ilmiah. Saya pun mulai belajar menulis, dan menyukai kegiatan itu. Di sisi lain, saya juga banyak ikut kelompok diskusi di kampus. Kegiatan itu merangsang saya untuk berani berpendapat, berargumen, dan mendengarkan pemikiran orang lain.

Dari sudut pandang teori Bourdieu tentang habitus, saya sudah memiliki habitus yang tepat untuk menjadi seorang pendidik, yakni habitus membaca, menulis, dan berdiskusi. Habitus yang sama memungkinkan sama saya untuk lulus kuliah dengan nilai yang lumayan baik, sehingga saya bisa menjadi pendidik nantinya. Habitus tersebut saya peroleh dari penghayatan nilai-nilai yang ada di lingkungan saya, yang kemudian mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang saya hayati sebagai manusia.

Kapital

Kapital adalah modal yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup. Ada banyak jenis kapital, seperti kapital intelektual (pendidikan), kapital ekonomi (uang), dan kapital budaya (latar belakang dan jaringan). Kapital bisa diperoleh, jika orang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya.

Habitus membaca, menulis, dan berdiskusi akan menghasilkan kapital intelektual dan kapital budaya. Sementara, sikap rajin bekerja dan banyak jaringan bisnis akan menghasilkan kapital ekonomi. Kapital bukanlah sesuatu yang mati, melainkan hidup dan bisa diubah.

Karena memiliki kapital intelektual (pendidikan), orang bisa bekerja sebagai pendidik, dan memiliki uang (kapital ekonomi) untuk hidup. Kapital intelektual juga bisa diubah menjadi kapital budaya (jaringan yang banyak), sehingga bisa memperkaya kapital intelektual itu sendiri. Kapital ekonomi juga bisa diubah, misalnya dengan investasi, sehingga menghasilkan kapital ekonomi dan kapital budaya yang lebih besar.

Arena

Arena adalah ruang khusus yang ada di dalam masyarakat. Ada beragam arena, seperti arena pendidikan, arena bisnis, arena seniman, dan

arena politik. Jika orang ingin berhasil di suatu arena, maka ia perlu untuk mempunyai habitus dan kapital yang tepat.

Misalnya di dalam arena pendidikan, jika ingin berhasil, orang perlu memiliki habitus pendidikan (belajar, menulis, berdiskusi, membaca) dan kapital intelektual (pendidikan dan penelitian) yang tepat. Jika ia tidak memiliki habitus dan kapital yang tepat untuk dunia pendidikan, maka ia tidak akan berhasil di dalam arena pendidikan.

Hal yang sama berlaku di dalam arena bisnis. Jika orang ingin berhasil dalam bisnis, maka ia harus memiliki habitus yang tepat (ulet bekerja dan hemat) serta kapital bisnis (uang sebagai modal usaha) maupun kapital budaya (jaringan kenalan yang luas) yang tepat. Jika orang memiliki habitus dan kapital seorang pendidik, dan ia terjun ke dalam dunia bisnis, maka kemungkinan besar, ia tak akan berhasil.

Dengan demikian, konsep habitus, kapital, dan arena terkait amat erat. Untuk bisa berhasil dalam salah satu arena dalam hidup, orang perlu mempunyai habitus dan kapital yang tepat untuk arena itu. Jika ia tidak memiliki habitus dan kapital yang tepat untuk satu arena, maka ia, kemungkinan besar, akan gagal dalam arena yang telah ia pilih tersebut.

Pendidikan

Bourdieu juga banyak berbicara tentang pendidikan. Baginya, pendidikan adalah suatu proses penciptaan ulang dominasi sosial yang telah ada sebelumnya. Pendidikan menutup pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki habitus maupun kapital sebagai seorang pembelajar. Dan orang-orang yang ditolak ini adalah umumnya kelas ekonomi bawah yang memang tidak memiliki habitus maupun kapital untuk belajar secara akademik.

Dengan demikian, pendidikan, pada hakekatnya, bersifat diskriminatif. Secara tidak langsung, pendidikan menindas orang-orang yang memang sejak awal sudah “kalah”, baik secara ekonomi, maupun secara habitus belajar. Secara mekanis, nyaris otomatis, pendidikan melestarikan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, antara si “pintar” (memiliki habitus dan kapital intelektual), dan si “bodoh” (tidak memiliki habitus maupun kapital intelektual).

Pendidikan, dengan demikian, menutupi sekaligus melestarikan ketidakadilan serta kesenjangan sosial yang telah berlangsung lama di masyarakat. Argumen ini diperoleh Bourdieu dari analisis terhadap data-

data mahasiswa yang memasuki fakultas-fakultas tenar di Prancis. Jika anda berasal dari keluarga yang cukup kaya, dan memiliki habitus membaca, menulis, dan berdiskusi sejak kecil, maka kemungkinan besar (tidak mutlak), anda akan belajar di fakultas-fakultas tenar di perguruan tinggi-perguruan tinggi ternama di negara anda.

Tentang pendidikan moral, Bourdieu berpendapat, bahwa yang terpenting bukanlah apa yang dinyatakan (eksplisit) dalam ajaran maupun aturan moral, melainkan apa yang tak dinyatakan (implisit), yang hanya dapat dilihat dalam perilaku sehari-hari. Singkat kata, baginya, dalam konteks pendidikan moral, yang terpenting adalah teladan, dan bukan perintah moral yang keluar dari mulut.

Maka itu, sarana pengajaran moral yang paling baik bukanlah ajaran moralitas agama yang penuh dengan pengharusan dan larangan, melainkan melalui sastra. Di dalam karya sastra, orang secara bebas memilih, tokoh apa yang menjadi favoritnya. Tokoh tersebut pasti memiliki kualitas kepribadian yang khas, sehingga orang menyukainya. Ada kebebasan di dalam memilih teladan.

Sementara, dalam ajaran-ajaran agama, yang banyak terdengar adalah keharusan dan larangan. Di dalam pola semacam itu, tidak ada kebebasan. Yang ada adalah paksaan, atau dominasi. Dan dimana terdapat dominasi, selalu ada perlawanan. Itulah sebabnya, mengapa ajaran agama tidak bisa menjadi alat yang efektif untuk melakukan pendidikan moral.

Pembedaan

Bourdieu juga merumuskan konsep pembedaan (*distinction*). Secara singkat, pembedaan berarti tindakan membedakan diri yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan kelasnya dalam masyarakat. Biasanya, pembedaan dilakukan oleh kelas menengah ekonomi ke atas untuk menunjukkan statusnya yang khas dibandingkan dengan kelas ekonomi yang lebih rendah.

Contohnya beragam. Misalnya, orang yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas akan menggunakan pakaian ataupun mobil dengan merk yang khusus, yang harganya jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dicapai oleh kelas ekonomi yang lebih rendah. Proses penempatan diri ini merupakan ciri khas kelas ekonomi menengah ke atas yang ingin mendapatkan pengakuan dari kelas ekonomi yang lebih rendah.

Dalam konteks pendidikan, lulusan perguruan tinggi luar negeri biasanya melakukan pembedaan terhadap lulusan perguruan tinggi dalam negeri. Mereka merasa “berbeda”, jika mampu membaca, menulis, ataupun berbicara dalam bahasa asing, sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka yang lulus dari perguruan tinggi dalam negeri. Inilah permainan *distinction* dalam konteks pendidikan.

Kelas ekonomi menengah ke bawah juga melakukan hal yang sama. Namun, bagi Bourdieu, tindakan tersebut bukanlah merupakan pembedaan, melainkan suatu bentuk perlawanan. Jadi, jika datang dari atas, pengambilan posisi untuk mendapatkan pengakuan disebut sebagai *distinction*. Dan jika datang dari kelas ekonomi menengah ke bawah, misalnya dengan menggunakan pakaian-pakaian anti kemapanan, atau justru tertarik membaca buku dalam bahasa-bahasa Sanksekerta kuno, maka itu disebut sebagai perlawanan (*resistance*).

Status Bahasa

Bourdieu juga banyak menulis soal bahasa. Baginya, bahasa bukanlah alat komunikasi yang bersifat netral, tanpa kepentingan. Pandangan semacam itu amat naif, jika tidak mau dikatakan sebagai picik.

Sebaliknya, bagi Bourdieu, bahasa adalah simbol kekuasaan. Di dalam bahasa tersembunyi dominasi simbolik serta struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Tata bahasa yang digunakan oleh seseorang mencerminkan kelas sosial ekonominya di masyarakat. Dalam arti ini, sebagai sebuah simbol, bahasa adalah suatu “teks” yang perlu untuk terus dipahami secara kritis.

Ilmu pengetahuan modern memiliki cita-cita untuk menjadi jalan utama manusia sampai pada kebenaran. Para ilmuwan modern yakin, bahwa bahasa ilmu pengetahuan adalah bahasa obyektif yang terbebaskan dari prasangka maupun kekuasaan itu sendiri. Ilmu pengetahuan adalah jalan netral dan bebas hambatan untuk sampai pada kebenaran.

Bagi Bourdieu, pandangan semacam ini amatlah picik. Dengan mengira bahwa bahasa yang ia gunakan adalah netral, maka para ilmuwan secara sadar menyembunyikan kepentingan-kepentingan dan pengaruh kekuasaan yang terkandung dalam bahasa itu. Ini berarti mereka melakukan penipuan pada masyarakat. Jika tidak sadar akan hal ini, maka

mereka menjadi boneka dari “kekuasaan simbolik” yang tengah berlangsung di masyarakat.

Orang yang berasal dari tingkat pendidikan tertentu memilih menggunakan bahasa yang lebih formal, daripada mereka yang lebih rendah tingkat pendidikannya. Di masyarakat-masyarakat tertentu, orang yang berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi menggunakan bahasa yang berbeda dengan orang lainnya yang berasal dari kelas sosial yang lebih rendah.

Dominasi Simbolik

Dominasi simbolik adalah penindasan dengan menggunakan simbol-simbol. Penindasan ini tidak dirasakan sebagai penindasan, tetapi sebagai sesuatu yang secara normal perlu dilakukan. Artinya, penindasan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang ditindas itu sendiri.

Misalnya, guru yang otoriter di kelas, namun tidak mendapatkan perlawanan apapun dari muridnya, karena muridnya telah menyetujui “penindasan” yang dilakukan oleh gurunya. Atau seorang istri yang tidak dapat membela diri, walaupun telah dirugikan oleh suaminya, karena ia, secara tidak sadar, telah menerima statusnya sebagai yang tertindas oleh suaminya.

Konsep dominasi simbolik (penindasan simbolik) juga dapat dengan mudah dilihat dalam konsep sensor panopticon. Sensor panopticon adalah konsep yang menjelaskan mekanisme kekuasaan yang tetap dirasakan oleh orang-orang yang dikuasai, walaupun sang penguasa tidak lagi mencurahkan perhatiannya untuk melakukan kontrol kekuasaan secara nyata.

Misalnya, di dalam penjara, ada menara penjaga yang berdiri di tengah berbagai unit-unit tempat tinggal narapidana. Menara penjaga itu menjadi simbol kontrol yang bersifat permanen terhadap narapidana, walaupun tidak ada penjaga yang sungguh menjaga di dalam menara tersebut. Sensor dan kontrol tetap terasa, walaupun sang penjaga dan penguasa tidak lagi secara nyata melakukan sensor dan kontrol.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme kekuasaan Orde Baru adalah contoh yang paling jelas. Kekuasaan Suharto pada masa itu (Orde Baru: 1966-1998) terasa sampai ke berbagai pelosok Indonesia, walaupun ia tidak secara fisik hadir untuk memastikan kekuasaannya. Bahkan sampai

sekarang, ada beberapa kelompok masyarakat yang mengakui legitimasi kekuasaan Orde Baru, walaupun eranya telah lama berlalu.

Mekanisme dominasi simbolik nantinya memuncak pada pemikiran Bourdieu tentang doxa. Secara singkat, doxa adalah pandangan penguasa yang dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak lagi memiliki sikap kritis pada pandangan penguasa. Pandangan penguasa itu biasanya bersifat sloganistik, sederhana, populer, dan amat mudah dicerna oleh rakyat banyak, walaupun secara konseptual, pandangan tersebut mengandung banyak kesesatan.

Misalnya, banyak penguasa otoriter di dunia ini beranggapan, bahwa pandangan mereka mewakili pandangan rakyat, maka mereka harus dipatuhi. Biasanya, mereka menggunakan slogan-slogan populis semacam ini, “Musuh Pemerintah=Musuk Rakyat!”, “Pemerintah hadir untuk membawa kemakmuran untuk Rakyat!”, dan beragam slogan-slogan lainnya.

Doxa menunjukkan, bagaimana penguasa bisa meraih, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaannya dengan mempermainkan simbol yang berhasil memasuki pikiran yang dikuasai, sehingga mereka kehilangan sikap kritisnya pada penguasa. Pihak yang dikuasai melihat dirinya sama dengan penguasa. Mereka ditindas, tetapi tidak pernah merasa sungguh ditindas, karena mereka hidup dalam doxa.

Doxa juga berlaku di dalam ranah ilmu pengetahuan. Paradigma positivisme kontemporer (realitas dilihat sebagai sesuatu yang bisa diukur dan dihitung, seperti menghitung “uang belanjaan”) dan empirisme dogmatis (terjebak hanya pada apa yang dapat dilihat oleh panca indera) menjadi pandangan penguasa (komunitas ilmiah) yang dianggap sebagai pandangan seluruh ilmuwan (yang dikuasai).

Banyak ilmuwan modern terjebak pada doxa penguasa di bidang penelitiannya. Mereka menerima begitu saja pandangan penguasa sebagai pandangannya. Mereka kehilangan sikap kritis. Pada akhirnya, mereka hanya mengabdikan pada kepentingan penguasa, dan kehilangan sentuhan dengan kebutuhan manusia yang nyata di dunia.

Perubahan Sosial dan Kebebasan

Bourdieu juga berbicara soal perubahan sosial. Menurutnya, perubahan sosial bisa dilakukan, jika orang memiliki habitus, kapital, dan

mampu menempatkan keduanya dalam konteks yang tepat di suatu arena. Prinsip ini berlaku untuk semua arena, mulai dari arena pendidikan, arena budaya, dan sebagainya.

Misalnya, anda ingin membuat perubahan sosial di dalam arena politik. Hal pertama yang anda lakukan adalah mendapatkan habitus yang tepat sebagai seorang politikus (mampu mendapatkan dukungan, mampu memperluas dan mempertahankan jaringan, mampu bernegosiasi, tingkat pendidikan yang sesuai). Habitus tersebut akan menghasilkan kapital yang tepat (kapital budaya, kapital intelektual, kapital ekonomi) yang akan membuat anda memiliki posisi yang bagus untuk membuat perubahan sosial di arena politik.

Namun, itu semua belum cukup. Anda harus bisa menempatkan diri anda (positioning) dalam arena politik yang terkait. Jaringan luas dan kepintaran akademik bisa menjadi bumerang yang menghancurkan karir politik anda, jika anda tidak bisa menempatkan diri secara tepat pada arena politik yang ada. Kemampuan menempatkan diri ini misalnya mampu berbicara dengan tema yang tepat, nada yang tepat, pada orang yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Pada hemat saya, ini adalah bagian dari kapital intelektual yang amat diperlukan untuk berhasil membuat perubahan sosial dalam satu arena tertentu.

Perubahan sosial hanya mungkin, jika manusia bukan merupakan “budak” dari sistem sosial yang mengitarinya. Dengan kata lain, perubahan sosial hanya mungkin, jika ada kebebasan. Sejauh saya pahami, Bourdieu tidak berbicara spesifik tentang kebebasan. Namun, kita bisa menafsirkan arti kebebasan yang tersembunyi di balik tulisan-tulisannya.

Bagi Bourdieu, kebebasan adalah suatu bentuk improvisasi yang menghasilkan variasi. Artinya, kebebasan adalah perubahan, atau faktor X, yang membuat seluruh konsep habitus, kapital, arena, dan doxa menjadi relatif; tidak mutlak. Dalam arti ini, manusia bukan hanya merupakan produk dari sistem-sistem yang mengitarinya, melainkan makhluk yang mampu membuat improvisasi, dan, dengan demikian, membuat perubahan sosial.

Pada hemat saya, ketika mencoba memahami pemikiran Bourdieu, ada satu poin penting yang penting untuk kita renungkan bersama; bahwa ilmu pengetahuan sosial dan filsafat harus mampu mengangkat dan menganalisis berbagai situasi di masyarakat yang menciptakan

ketidakadilan dan penindasan sosial. Ia menyebutnya sebagai sosiologi reflektif dan sosiologi kritis.

Gelembung Rok Mini

Perempuan tampaknya memang tak pernah menjadi “tuan” atas tubuhnya. Beberapa kelompok masyarakat mewajibkan perempuan mengurung tubuhnya atas nama moralitas. Sementara, beberapa kelompok masyarakat lain mewajibkan perempuan membuka tubuhnya atas nama keindahan dan seni. Adakah yang pernah bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan perempuan dengan tubuhnya? Permasalahan ini kembali muncul dalam kontroversi rok mini yang baru-baru ini terjadi. “Kasus rok mini” lahir dari gedung DPR, dan dari pernyataan gubernur Jakarta. Ketua DPR Marzuki Alie dari fraksi Partai Demokrat menyatakan, bahwa penggunaan rok mini bisa menimbulkan pelecehan seksual.

Fauzi Bowo, Gubernur Jakarta, juga pernah memberi pernyataan, bahwa orang yang naik angkot, dan kemudian menggunakan rok mini, pasti akan menimbulkan kegerahan dari yang melihatnya. Walaupun akhirnya meminta maaf, pernyataan tersebut sudah menempatkan perempuan sekali lagi sebagai “budak” dari tubuhnya sendiri. Pada hemat saya, pandangan Martin Heidegger tentang teknologi, terutama cara berpikirnya, bisa menerangi permasalahan sebenarnya terkait dengan “kasus rok mini” di atas.

Heidegger adalah seorang filsuf metafisis-fenomenologi-eksistensial asal Jerman yang hidup di awal abad ke-20. Ia mencoba menanggapi secara kritis cara berpikir yang berada di balik ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berkembang amat pesat pada jamannya. Untuk menjelaskan argumen ini, dan kaitannya dengan “fenomena rok mini”, saya menggunakan teks Martin Heidegger yang berjudul *The Question Concerning Technology and other Essays*, dan teks sekunder yang amat membantu dari Arthur Windermere yang berjudul *Understanding Heidegger’s Question Concerning Technology*.

Realitas yang Mengungkapkan Dirinya

Berulang kali Martin Heidegger menyatakan, bahwa pemikiran Barat telah mereduksi arti kebenaran (Wahrheit) hanya semata pada apa yang dapat diketahui manusia. Tidak hanya itu, apa yang benar, menurut Heidegger, sudah disempitkan melulu pada apa yang faktual nyata (Faktum). (Windermere, 2012) Menurutnya, pola berpikir semacam ini telah membatasi kemampuan manusia untuk sungguh memahami realitas yang ada di sekitarnya. Kebenaran bukanlah hanya soal pengetahuan, tetapi soal keterbukaan (aletheia) realitas itu sendiri pada manusia.

Dalam arti ini, dapatlah dikatakan, bahwa manusia bukanlah makhluk yang murni ada untuk mengetahui realitas di sekitarnya. Manusia hidup dengan hasrat, tujuan, dan kepribadian yang unik. Semua ini, menurut Heidegger, mempengaruhi cara manusia berhubungan dengan realitas di sekitarnya. Gambaran tentang realitas lahir dari penghayatan orang tersebut tentang realitas, dan apa yang menjadi latar belakangnya.

Seorang pelukis akan melihat lukisan abstrak sebagai karya seni yang indah. Sementara orang lainnya, atau pelukis dengan selera berbeda, akan melihat lukisan abstrak sebagai coretan tak berpola dan tak indah dipandang mata. Lukisan abstrak mengungkapkan dirinya secara berbeda pada orang-orang yang berbeda. Keduanya benar, dan keduanya, menurut Heidegger, adalah dua sisi yang berbeda dari satu realitas yang sama. Obyek yang mengungkapkan dirinya, itulah makna kebenaran menurut Heidegger. Ia menulis,

“Teknologi bukan hanya alat. Teknologi adalah jalan untuk mengungkapkan diri dari

realitas. Jika kita memberikan ini kesempatan, maka ruang yang lain dari teknologi akan membuka dirinya pada kita. Ini adalah ruang untuk pengungkapan, misalnya, kebenaran” (Heidegger, 1977, hal. 12)

Dunia mengungkap dirinya, dan orang bisa menangkapnya dengan emosi, atau dengan akal budi (ilmu pengetahuan dan teknologi). Emosi dan akal budi, ataupun apapun dari manusia, adalah caranya berhubungan dengan dunia. Rasa benci terhadap kemacetan, seperti yang sering saya alami, adalah ungkapan kebenaran dari realitas, bahwa kemacetan itu menyiksa. Perasaan jatuh cinta berarti ungkapan realitas, bahwa yang dicintai itu memang layak untuk dicintai.

Esensi dari Teknologi Modern

Heidegger menulis satu buku kecil berjudul *The Question Concerning Technology*. Di dalam buku itu, ia hendak memahami esensi dari teknologi modern. Dalam arti ini, sebagaimana dicatat oleh Windermere, kita harus membedakan antara teknologi tradisional di satu sisi, dan teknologi modern di sisi lain. Misalnya seorang petani.

Seorang petani memiliki hubungan batin dengan tanahnya. Ia memperlakukan tanah dengan rasa hormat. Ia merawat tanah, menyiramnya, memupuknya, dan menggeburkannya. Dan dari beragam usaha tersebut, ia memetik hasilnya, ketika panen tiba. Inilah pola yang terjadi di dalam teknologi tradisional.

Sementara di dalam teknologi modern, manusia memperlakukan alam tidak dengan rasa hormat, melainkan hanya sebagai obyek untuk diperas sampai habis demi kepentingan manusia. Slogan teknologi modern adalah “hisap sebanyak mungkin dengan modal sesedikit mungkin”. (Windermere, 2012) Keindahan pantai dilihat tidak sebagai keindahan itu sendiri, tetapi sebagai obyek untuk diperas demi kepentingan pariwisata, pengumpulan modal, dan alat untuk mencapai kenikmatan belaka. Pantai adalah “alat”, atau “obyek”, untuk melayani kepuasan manusia. Heidegger menulis,

“Keterbukaan dari yang telah terbuka telah datang pada manusia sejak ia siap untuk menerima keterbukaan itu. Ketika manusia, dengan jalannya sendiri, dari pengungkapan mengungkap apa yang hadir, ia hanya menanggapi panggilan dari pengungkapan itu bahkan ketika ia menolaknya. Dengan demikian, ketika manusia menyelidiki, mengamati, dan melihat alam dari area yang dapat dicernanya, ia juga tidak diklaim dengan cara yang mengungkapkan tantangan pada dirinya untuk mendekati alam sebagai obyek penelitian, sampai obyek itu menghilang menjadi tidak ada obyek dan hanya berdiri sebagai sumber daya yang berdiri.” (Heidegger, 1977, hal. 19)

Di mata teknologi modern, dan praktisi serta penggunaannya, alam adalah sekumpulan sumber daya yang perlu untuk diperas habis demi kepentingan manusia. Heidegger menyebut pola semacam ini sebagai “kekuatan yang koheren dan dapat diperhitungkan.” (Windermere, 2012) Seluruh ilmu pengetahuan modern, termasuk yang mengaku mencoba memahami perilaku manusia, semata melihat alam, dan manusia, sebagai alat ataupun obyek untuk dipergunakan, sebagai sumber daya untuk diperas habis demi kepentingan pengumpulan modal, atau melayani kepuasan beberapa pihak semata. Tentang ini, Heidegger menulis,

“Definisi instrumental dari teknologi in begitu benar sehingga itu juga bisa menjelaskan teknologi modern, namun dalam hal lain, kita tetap mempertahankan dengan pembenaran, bahwa berbeda dengan teknologi yang lebih tua, beberapa hal sangatlah berbeda, dan

baru. Bahkan pembangkit listrik yang baru dengan turbin-turbinnya serta generator adalah buatan manusia sebagai alat dari satu tujuan yang ditentukan oleh manusia. Bahkan pesawat jet dan alat-alat berfrekuensi tinggi adalah alat dari satu tujuan tertentu. Stasiun radar jelas lebih sederhana dari alat perkiraan cuaca. Untuk lebih yakin, pembangunan alat-alat berfrekuensi tinggi membutuhkan kombinasi dari berbagai proses produksi yang bersifat teknis dan industrial.” (Heidegger, 1977, hal. 5)

Apa masalahnya? Bukanlah alam ini memang hadir untuk kepentingan manusia? Menurut saya, ini adalah pandangan yang amat picik. Alam hadir untuk alam itu sendiri, bukan untuk sesuatu diluarnya. Bagi Heidegger, pandangan yang melihat alam sebagai sumber daya untuk manusia telah meracuni cara berpikir kita sebagai manusia. Pada akhirnya, kita hanya mampu menangkap satu ungkapan dari alam, yakni ungkapan fungsi (Funktion). Sementara ungkapan-ungkapan alam lainnya tak lagi bisa kita sadari.

Di dalam ilmu pengetahuan, inilah yang, menurut saya, telah terjadi. Ilmu pengetahuan modern hanya mampu melihat dunia dengan satu kaca mata, yakni kaca mata ilmiah yang berarti empiris dan dapat dihitung. Ungkapan realitas lainnya yang lebih rumit dan agung tidak lagi bisa dirasakan oleh ilmu pengetahuan modern. Heidegger menyatakan, bahwa bukan berarti ilmu pengetahuan dan teknologi modern adalah sesuatu yang salah. Yang ingin ia tekankan adalah, bahwa ilmu pengetahuan hanyalah salah satu cara untuk menangkap ungkapan realitas yang begitu rumit dan kaya. Ada banyak ungkapan realitas lainnya yang lain dari “yang ilmiah”.

Alam dan realitas sebagai keseluruhan adalah entitas yang kaya dan terus mengungkapkan dirinya pada manusia. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan modern tidak boleh memonopoli kebenarannya sendiri sebagai satu-satunya kebenaran. Alam dan realitas bukan hanya entitas yang bisa “digunakan”, “dihitung”, atau semata sesuatu yang terjadi akibat “hubungan sebab akibat”. Alam dan realitas mengungkapkan dirinya pada manusia secara estetik, puitis, religius, filosofis, dan semua ini, menurut Heidegger, adalah ungkapan dari kebenaran itu sendiri.

Mencari Kebenaran

Realitas mengungkapkan dirinya pada manusia. Dengan kata lain, pengungkapan realitas mencerminkan adanya hubungan yang unik dan intim antara manusia dengan realitas itu sendiri. Realitas mengungkapkan dirinya tidak pada kekosongan, melainkan pada manusia yang sudah memiliki kesadaran (*Bewußtsein*) di dalam dirinya. Hubungan antara kesadaran manusia di satu sisi, dan ungkapan dari alam di sisi lain, mengubah diri manusia itu sendiri.

Sebagai seorang ilmuwan modern yang tidak kritis, orang bisa melihat alam semata sebagai entitas yang dapat dihitung. Pola ini juga mengubah kesadaran orang tersebut, yakni sebagai menjadi kalkulator dari realitas yang siap menghitung aspek untung rugi dari upaya untuk menghisap realitas demi kepentingannya. Orang semacam ini melihat tujuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagai upaya untuk menaklukkan dan menghisap alam sehabis-habisnya. (Windermere, 2012)

Di dalam proses tersebut, roh manusia pun terkikis. Hubungan manusia dan alam tidak lagi unik dan intim, melainkan semata-mata kalkulasi untung rugi, dan bersifat eksploitatif. Kesadaran manusia hanya mampu menangkap satu bentuk ungkapan alam, yang akhirnya juga mengikis habis kesadaran manusia menjadi semata hitung-hitungan untung rugi. Akhirnya, manusia pun tak lebih dari elemen alam yang bisa diperas, diperbudak, dan dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Padahal, menurut Heidegger, kesadaran manusia baru dapat utuh, jika ia dapat menangkap beragam ungkapan realitas yang tampil di hadapannya. “Menjadi utuh secara roh”, demikian tulis Windermere tentang Heidegger, “berarti kita mampu mengalami beragam bentuk kebenaran yang lebih tinggi.” (Windermere, 2012) Jika ini tidak dapat dilakukan, maka kita akan semacam menjadi robot penghitung yang tak punya jiwa.

Sekali lagi perlulah ditegaskan, bahwa Heidegger sama sekali tidak menolak perkembangan teknologi. Yang ditentang Heidegger adalah cara berpikir yang ada di balik teknologi modern, yang menyempitkan alam (Natur) semata sebagai sesuatu yang bisa dihitung dan diperas demi kepentingan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern harus ditempatkan hanya sebagai salah satu dari upaya kesadaran manusia untuk

menangkap beragam ungkapan kebenaran dari realitas yang begitu kaya dan rumit.

Yunani Kuno

Sebagai contoh, Heidegger mengajak kita melihat hubungan orang-orang Yunani Kuno dengan alam yang ada di sekitar mereka. Di mata para penyair, filsuf, dan seniman pada masa itu, alam adalah sesuatu yang perlu dirawat demi dirinya sendiri. Para seniman dan filsuf mengekspresikan kekaguman mereka dalam bentuk lukisan dan tulisan. Para pemahat dan pematung membiarkan alam tampil secara alamiah di dalam karya-karya mereka. Tentang ini, Heidegger menulis,

“Ada waktunya ketika tidak hanya teknologi yang menggunakan nama *techne*. Dulu segala sesuatu yang mengungkapkan kebenaran juga dianggap sebagai *techne*. Dan *poiesis* dari seni juga disebut sebagai *techne*. Di Yunani, sebagai titik tolak takdir peradaban Barat, seni berkembang sampai pada titik tertinggi dari ungkapan realitas yang tampil kepadanya. Seni membawa kehadiran dewa-dewa, membawa dialog antara yang Transenden dan manusia menjadi kenyataan. Seni adalah *techne*. Seni adalah sesuatu yang tunggal, yang mengungkapkan realitas secara bertahap. Seni adalah keutamaan.. sebagai penjaga kebenaran. (Heidegger, 1977, hal. 34)

Dalam konteks itu, manusia adalah bagian dari alam. Manusia bukan tuan atas alam yang bisa menggunakan alam semata untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dalam hubungan yang unik dan intim semacam ini, manusia bisa mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, karena ia mampu melihat beragam ungkapan kebenaran dari alam dan realitas itu sendiri.

Rok Mini

Rok mini adalah bagian dari realitas. Tubuh perempuan juga adalah bagian dari realitas. Realitas mengungkapkan dirinya kepada kesadaran manusia. Pengungkapan diri realitas, termasuk rok mini dan tubuh perempuan, adalah bagian dari kebenaran itu sendiri. Kesadaran kita pun menangkapnya, dan menafsirkannya.

Rok mini dan tubuh perempuan adalah bagian dari realitas yang mengungkapkan dirinya kepada kesadaran kita dengan beragam cara, dengan cara estetis, biologis, puitis, kultural, filosofis, politis, moralis, dan sebagainya. Namun, sayangnya, kesadaran kita sudah tertutup, sehingga hanya mampu menangkap satu ungkapan dari realitas rok mini dan tubuh perempuan, yakni ungkapan seksual.

Ketika kita menangkap rok mini dan tubuh perempuan secara seksual semata, kesadaran kita pun berubah menjadi kesadaran “si binal”. Kita menyempitkan ungkapan kebenaran realitas rok mini dan tubuh perempuan dengan otak kita yang binal, yakni sebagai fenomena seksual dan pornografi yang harus dicegah. Akhirnya, kita pun menjadi semakin tidak bijaksana. Kita gagal memahami kekayaan realitas rok mini dan tubuh perempuan yang sesungguhnya begitu rumit dan agung.

Di dalam tubuh perempuan, ada lekuk alami yang menginspirasi beragam seniman di sepanjang sejarah manusia untuk menghasilkan karya seni yang luar biasa indah dan menggerakkan hati. Di dalam tubuh perempuan, kita bisa melihat potensi untuk menciptakan, melahirkan, dan merawat kehidupan. Kita kehilangan kemampuan berpikir semacam ini, karena kita sudah berubah menjadi “si binal” yang melihat realitas melalui dengan otak kita yang telah “kotor”.

Kita tak berhak mengatur tubuh perempuan. Kita juga tak berhak melarang penggunaan rok mini. Hanya orang-orang berotak kotor yang hendak menindas tubuh perempuan atas nama moralitas dan kepantasan. Hanya orang-orang berpikiran “binal” yang melarang penggunaan rok mini.

Belajar dari pemikiran Heidegger, kita perlu belajar untuk melihat realitas tubuh perempuan dan rok mini dengan cara-cara baru yang bisa menangkap sisi lain kebenarannya, di samping sisi binal dan seksualnya. Hanya dengan begitu, kesadaran kita sebagai manusia bisa berkembang, dan kita terhindar dari bahaya untuk hidup sebagai “manusia-manusia binal”.

Daftar Rujukan

Heidegger, Martin, *The Question Concerning Technology and Other Essays*, William Lovitt (terj), Garland Publishing, New York, 1977.

Windermere, Arthur, *Understanding Heidegger's Question Concerning Technology*, <http://arthurwindermere.hubpages.com/hub/QuestionConcerningTechnology>, 30 Maret 2012

Melawan Gelembung Tulisan

Publish or perish, publikasikan karya, atau punah, itulah semboyan seorang pendidik dan peneliti. Sebagai seorang pendidik, kita punya kewajiban moral dan legal untuk menulis. Menulis itu berarti terutama menulis buku teks, atau menerbitkan karya penelitian yang telah dilakukan.

Menulis itu mengabdikan pada tiga tujuan. Yang pertama adalah dengan menulis (buku teks), kita sebagai pendidik bisa membantu proses belajar peserta didik. Mereka memiliki panduan yang jelas tentang apa yang mereka pelajari. Mereka juga mendapatkan pengetahuan tentang kompetensi macam apa yang nantinya mereka dapatkan.

Sebagai peneliti, publikasi adalah jembatan antara peneliti dan masyarakat luas. Masyarakat luas bisa mendapatkan banyak hal berguna dari karya penelitian yang dipublikasikan. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki sumber data maupun analisis yang kuat untuk membuat kebijakan-kebijakan publik yang bermutu.

Dua, publikasi juga adalah aktualisasi diri pendidik. Pendidik sejati banyak membaca dan menulis. Publikasi adalah bentuk nyata dari proses

membaca dan menulis tersebut. Aktualisasi diri memberikan rasa kepenuhan hati yang membahagiakan.

Tiga, publikasi adalah alat pencerahan masyarakat. Tak dapat diragukan lagi, masyarakat Indonesia sekarang membutuhkan pencerahan di berbagai bidang. Pencerahan tersebut berupa terobosan ide, data baru, atau analisis baru yang bisa lebih menjelaskan permasalahan. Percuma penelitian dan pemikiran bermutu, tetapi tak pernah tersebar ke peserta didik, atau ke masyarakat luas.

Budaya Menulis

Sekarang ini, banyak media untuk menulis. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan beragam gadget, kita bisa menulis kapan pun dan dimana pun. Kita bisa menulis di sekolah, kantor, rumah, bahkan menulis di kamar mandi (dengan tablet ataupun netbook). Segala fasilitas ada dan bisa digunakan, selama kita punya keinginan untuk menulis.

Kita bisa memublikasikan karya kita dengan medium tradisional, seperti buku (teks). Namun sekarang ini, kita juga bisa memublikasikan karya kita dalam bentuk blog di internet. Banyak fasilitas blog yang tersedia. Kita tinggal memilih, belajar sedikit teknis penggunaannya, dan mulai menulis. Peserta didik dan masyarakat luas bisa mendapatkan banyak hal baik dari blog yang kita tulis.

Budaya menulis harus menjadi kebiasaan hidup (*habitus*) para pendidik. Artinya menulis itu menjadi kebutuhan, sama dengan makan, minum, ataupun berpakaian. Kalau tidak menulis, rasanya badan sakit, bahkan seperti mau mati. Ingatlah bahwa sebagai pendidik, kita punya kewajiban luhur untuk menulis dan menyebarkan karya penelitian maupun pemikiran kita untuk para peserta didik kita, serta untuk masyarakat yang lebih luas.

Mulai dari Mana?

Biasanya, jika ditanya, mengapa para pendidik jarang menulis, jarang memublikasikan karya mereka, jawaban yang keluar adalah, bahwa mereka tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana memulainya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan beberapa langkah praktis.

Pertama, kita perlu membayangkan, untuk siapa kita menulis. Apakah untuk anak TK, anak SD, atau masyarakat intelektual yang lebih luas. Pada titik ini, menurut saya, ada satu prinsip universal yang bisa kita pegang bersama, usahakan agar orang yang paling “bodoh” di dunia pun bisa memahami isi tulisan kita. Tulisan kita harus dibuat seramah mungkin, terutama untuk mereka-mereka yang memang tak menekuni dunia intelektual.

Dua, kumpulkan data ataupun analisis teori yang sudah ada sebelumnya. Tentukan pembagian isi tulisan maupun buku dalam bentuk poin-poin yang jelas. Sedapat mungkin, data dan teori yang digunakan adalah data dan teori yang paling baru, sehingga pembaca mendapatkan data dan analisis yang paling akurat.

Tiga, jika data, analisis, dan poin-poin pemikiran sudah ada, mulailah menulis. Jangan terlalu ragu. Jangan terlalu banyak berpikir. Tumpahkan pemikiran dan bahan ke dalam tulisan sesegera mungkin.

Empat, di dalam menulis, gunakan kalimat-kalimat pendek. Jangan sampai kalimat yang anda buat beranak pinak, sampai bercucu dan bercicit. Titik dan koma adalah waktu pembaca untuk menarik nafas. Jika kalimat ditulis secara pendek, maka pembaca lebih nyaman membaca, karena mereka punya waktu untuk bernafas.

Lima, jangan gunakan kata serapan (kata dari bahasa asing, seperti fragmentasi, komponen, legibilitas). Gunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia asli, kecuali memang kata itu belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ini penting sekali, supaya tulisan bisa dipahami dengan mudah, dan menjadi enak dibaca.

Enam, di dalam menulis, gunakan banyak contoh. Contoh-contoh bisa diambil dari cerita yang sudah ada, pengalaman pribadi, ataupun pengalaman orang lain. Contoh semacam ini membuat tulisan memiliki daging dan darah. Tulisan menjadi terasa manusiawi.

Tujuh, menulislah dengan gaya yang mengajak berpikir. Gunakan bahasa-bahasa seperti berikut, “Bagaimana menurut anda? Apakah anda setuju?”. Dengan cara ini, pembaca tersentak dari keterlenaannya dalam tulisan, dan mencoba melakukan refleksi pemikiran. Ingatlah, bahwa pertanyaan yang tepat jauh lebih penting daripada jawaban yang tepat.

Delapan, jangan sampai terjebak dalam plagiarisme. Tulislah semua sumber tulisan anda dalam bentuk side note, misalnya (Susanto, 2012, 45).

Kutipan langsung harus menggunakan tanda kutip buka dan kutip tutup. Kutipan langsung tidak perlu menggunakan tanda kutip, tetapi amat perlu untuk mencantumkan sumber tulisan dalam bentuk nama belakang pengarang, tahun karya yang dikutip, dan halamannya. Jangan sampai anda jatuh ke dalam plagiarisme, karena keteledoran semata.

Jika ide sudah tertuang, kalimat sudah dibuat secara singkat, dan tidak ada aspek plagiarisme dalam tulisan, maka seluruh tulisan (buku) perlu untuk dibaca secara perlahan dari awal. Perbaiki kalimat-kalimat rumit. Ganti kata-kata yang membuat bingung.

Dukungan Sistem

Menulis haruslah menjadi budaya, dan menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Tidak ada hari tanpa menulis. Usahakan agar sebagai pendidik, anda menulis paling minimal dua paragraf sehari tentang bidang ilmu pengetahuan yang anda tekuni. Ini harus dilakukan setiap hari. Tidak boleh ada alasan!

Sistem yang ada juga harus mendukung semua proses ini. Para pendidik tidak boleh memiliki jam mengajar yang mencekik, atau pekerjaan administratif yang bertumpuk. Sekolah harus menciptakan kesempatan bagi para gurunya untuk menulis, meneliti, dan memublikasikan karyanya. Alokasi dana untuk publikasi juga harus ada setiap tahunnya, termasuk pembelian buku, pencarian data, insentif penulis, dan penerbitan karya.

Saya amat sadar, himbauan seperti yang diberikan tulisan ini tidaklah cukup. Orang Indonesia tidak cukup hanya dengan dihimbau. Maka saya harap, proses berlatih menulis dan memublikasikan karya tetap berlangsung, walaupun himbauan sudah berlalu, dan tak ada penghargaan memadai untuk usaha yang dilakukan. Publikasikan karya anda sebagai pendidik, atau bersiap untuk punah....

Gelembung Demokrasi dan Kota

Sekarang ini di Indonesia, segala sesuatu harus dikelola secara demokratis. Artinya segala sesuatu sungguh harus dibicarakan bersama, lalu keluar keputusan dari proses pembicaraan tersebut. Keputusan tersebut akan mengikat semua pihak yang sebelumnya bersama-sama berdiskusi untuk membuatnya. Inilah mekanisme standar demokrasi yang kini menjadi paradigma dunia.

Kegagalan menciptakan tata kelola demokratis akan menciptakan ketidakpatuhan sah (*legitimate disobedience*). Artinya ketidakpatuhan pada suatu keputusan ataupun kebijakan, atas dasar rasionalitas yang bisa diterima dengan akal sehat. Ketidakpatuhan muncul, karena orang tidak diajak ambil bagian dalam keputusan yang telah dibuat.

Sekarang ini Jakarta sebagai ibu kota Indonesia sedang mencari pemimpin yang baru. Jelas pemimpin yang baru ini harus terbiasa dengan tata kelola demokratis, sebagaimana saya jabarkan sebelumnya. Ia harus mampu mengajak berbagai pihak di Jakarta untuk bekerja sama menghadapi permasalahan-permasalahan kota yang memang amat rumit. Jakarta yang baru, yang lebih baik, harus dikelola secara demokratis dengan melibatkan berbagai pihak yang ada di dalamnya.

Orkestra dan Harmoni

Bentuk nyatanya adalah sang pemimpin, gubernur, harus mampu berperan sebagai dirigen orkestra. (Kasali, 2012) Ia mampu mengajak dan mengatur berbagai pemain orkestra yang ada untuk menciptakan harmoni. Para pemain orkestra ini adalah berbagai kelompok yang hidup dan beraktivitas di Jakarta. Harmoni adalah integrasi dari berbagai kelompok tersebut, dengan gubernur sebagai pemimpinya, untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar.

Kerja sama yang terintegrasi tersebut juga harus memiliki fokus yang jelas. Visi yang ingin dicapai harus jelas. Langkah-langkah kerja yang harus dilakukan pun harus jelas dan fokus, serta urut dari prioritas yang paling mendesak, sampai yang tidak terlalu penting. Untuk itu calon gubernur Jakarta yang baru perlu memiliki *people skills* untuk menggalang kerja sama berbagai pihak, menentukan fokus kerja yang jelas, dan bekerja dengan fokus.

Apa itu *people skills*? *People skills* adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secara baik untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. (Margaretha, 2012) Kemampuan ini amat penting dalam kehidupan. Para pemimpin mutlak memiliki kemampuan ini. Tanpa kemampuan ini, banyak hal tidak akan bisa berjalan, dan banyak tujuan akan terabaikan.

Empati

Langkah pertama untuk membangun *people skills* adalah dengan membangun sikap empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain dari sudut pandang orang lain. Dengan kata lain empati adalah kemampuan mengambil alih posisi orang lain dalam satu konteks tertentu. Empati adalah kunci utama dalam komunikasi yang bermutu.

Empati adalah pikiran sekaligus perasaan. Namun empati juga harus terwujud dalam tindakan, yakni bertindak secara empatik. Bertindak secara empatik berarti bertindak dengan memperhatikan pikiran serta perasaan orang lain yang terkena dampak dari tindakan yang kita ambil. Seorang pemimpin harus mampu bertindak secara empatik dalam segala keputusan maupun tindakan yang ia lakukan.

Bentuk nyata dari bertindak empatik adalah berbicara dengan orang lain. Berbicara berarti sungguh-sungguh hadir, dan mengungkapkan ide-ide

yang memperhatikan pikiran dan perasaan lawan bicara. Berbicara bukan hanya soal menyampaikan ide, tetapi juga berbicara untuk mengajak bekerja sama.

Untuk bisa berbicara secara efektif, orang juga perlu untuk mendengar. Mendengar tidak hanya apa yang terucap, melainkan justru yang tak terucap, yang tersembunyi di balik kata-kata. Inilah yang disebut sebagai tindak mendengar secara empatik. Mendengar secara bijak.

Sikap empatik, tindakan empatik, berbicara dan mendengar secara empatik adalah hal-hal yang amat mutlak ada di dalam diri pimpinan, mulai dari level keluarga, kota, sampai dengan negara. Semua ini menjadi semakin manusiawi, jika dibalut dengan humor dan tawa dalam berkomunikasi. Humor menjadi semakin hidup, jika dibalut dengan sikap informal yang anti feodalisme.

Para pejabat mengira, bahwa humor dan sikap informal itu tidak perlu. Mereka menyangka, itu adalah sikap yang kurang hormat. Namun sebaliknya untuk menciptakan hubungan dan komunikasi yang bermutu, humor dan sikap informal jelas amat diperlukan. Untuk mencapai visi yang jelas, dan mewujudkan kerja yang fokus, orang perlu untuk memiliki selera humor yang tinggi, dan bersikap informal di dalam kesehariannya.

Pemecahan Masalah

Di dunia ini, tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua orang. Selalu ada orang yang puas, dan ada yang tidak, sebaik apapun keputusan yang kita ambil. Namun ada satu prinsip yang perlu terus ada, yakni prinsip *meeting in the middle*, atau bertemu di tengah. Ketika dua pihak berbeda tajam dalam memandang masalah, maka keduanya harus belajar untuk mengalah, dan berjumpa di tengah demi kebaikan yang lebih tinggi.

Semua ini adalah upaya-upaya yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Paradigma pemecahan masalah (*problem solving paradigm*) itu bertindak kecil untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil, namun berkontribusi dalam pemecahan masalah-masalah yang lebih besar. Indonesia menantikan orang-orang yang mampu bekerja seperti ini.

Masalah bisa selesai, jika orang bisa bekerja fokus untuk menyelesaikan masalah. (Widodo, 2012) Kerja fokus menuntut kesetiaan

dan konsistensi pada perjanjian ataupun keputusan yang telah dibuat. Pemecahan masalah membutuhkan akurasi dan relasi erat antara kata dan tindakan. Kemendalaman berpikir dan analisis, serta kemampuan untuk bertindak fokus dan pragmatis, adalah dua kunci keberhasilan suatu rencana kerja.

Biasanya, masalah muncul, karena kualitas komunikasi yang lemah, sehingga kerja sama terputus, pembuatan keputusan terhambat, rencana kerja terbengkalai, dan masalah tetap ada, bahkan membesar. Namun seperti berulang kali dinyatakan oleh Habermas, seorang filsuf Jerman terkemuka, kegagalan komunikasi tidak dapat diatasi dengan melepaskan komunikasi, atau menggantinya dengan kekuatan otot, melainkan dengan upaya untuk melakukan komunikasi secara intensif dan berkualitas.

Apa yang saya tulis di atas bisa digunakan sebagai model tata kota untuk berbagai kota di Indonesia, baik yang besar maupun yang kecil. Visi jelas, kerja sama yang fokus, dan kesetiaan pada komitmen, itulah kunci keberhasilan. Semua itu harus dijalankan dengan mekanisme-mekanisme demokratis yang mengedepankan *people skills* yang juga mantap. Jadi tunggu apa lagi?

Gelembung Buku Bajakan

Bolehkah saya membaca buku-buku bajakan yang bisa dengan mudah diperoleh di internet dalam bentuk soft copy? Kalau boleh mengapa? Kalau tidak mengapa? Bukankah informasi dan pengetahuan itu untuk semua orang, sehingga bisa diakses oleh siapapun? Namun di sisi lain, bukankah buku itu adalah karya cipta seseorang yang berhak mendapatkan penghargaan atas karyanya tersebut? Kalau kita mengunduh secara gratis sebuah buku, bukankah kita melanggar hak si pengarang untuk mendapatkan penghargaan atas usaha kreatifnya menulis buku?

Pro Kontra

Di dalam salah satu esainya yang berjudul *The Ethics of Internet Piracy*, Peter Singer mencoba menganalisis masalah ini. Ia membuat alur berpikir berikut. Bayangkan jika saya mencuri buku dari orang lain, maka

orang itu akan mengalami kerugian. Saya untung, tetapi ia rugi. Ini jelas salah, dan tidak boleh dilakukan.

Skenario lain. Saya menggunakan buku bajakan versi *soft copy*. Saya untung, namun penerbit dan penulis rugi, karena mereka tidak mendapatkan uang. Ini hanya satu sisi. Ada sisi lain.

Jika saya tidak mengunduh buku bajakan tersebut, maka saya akan meminjam dari perpustakaan, dan menutup kesempatan bagi orang lain untuk bisa meminjam buku yang sama tersebut. Jadi dengan menggunakan buku bajakan, saya memberikan kesempatan pada orang lain untuk menggunakan buku tersebut, misalnya dengan meminjam di perpustakaan. (Singer, 2012)

Biasanya, orang mengunduh buku bajakan, dan merasa tidak bersalah, karena mereka merasa, bahwa semua orang toh melakukannya. Jadi ini semacam mentalitas massa. Kita berbuat sesuatu yang salah, namun tidak merasa bersalah, karena massa, yakni orang banyak, pun melakukannya.

Sama seperti Singer, saya adalah seorang penulis, sekaligus pembaca buku yang agresif. Secara pribadi, saya tidak keberatan buku saya dibajak oleh orang, karena saya tidak mengandalkan hasil penjualan buku untuk menafkahi hidup saya. Namun, untuk orang-orang yang memilih jalan sebagai penulis profesional, pembajakan buku adalah musuh yang mengancam piring nasi mereka. Jelas, mereka dirugikan.

Situasi Kita

Demokrasi berdiri di atas pengandaian, bahwa warga negara memiliki solidaritas dan kemampuan berpikir rasional di dalam membuat keputusan yang terkait dengan kehidupan publik. Dalam konteks ini, peran buku amatlah besar. Buku-buku bermutu harus tersedia dalam jumlah banyak, dan, sedapat mungkin, gratis untuk semua orang. Buku membantu orang mengembangkan cara berpikirnya di dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam hidupnya.

Di sisi lain, para penulis buku yang kreatif harus juga dapat hidup dari profesinya. Orang harus dapat berkata, “Saya penulis”, dan sungguh bisa hidup secara bermartabat dari profesinya tersebut. Musuh utama mereka adalah pembajakan buku, dan juga penerbit yang suka tipu-tipu

terkait dengan royalti penjualan buku. Bagaimana mendamaikan kedua tegangan ini?

Jelas, kita sulit mengharapkan pemerintah untuk memberikan subsidi pada para penulis kreatif di negara kita. Korupsi dan kesalahan prioritas berpikir menggejala begitu dalam dan luas di dalam birokrasi pemerintahan kita. Mengharapkan dunia bisnis juga amat sulit, karena fokus utama mereka adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Ini juga sulit, karena dunia bisnis penuh dengan arogansi kosong, dan sulit diajak berpikir terkait dengan pengembangan budaya demokrasi di masyarakat.

Beberapa Ide

Saya melihat setidaknya ada tiga langkah yang bisa diambil. Pertama, kita harus menanyakan, apakah seorang penulis hendak memberikan bukunya secara gratis, atau tidak? Bisa juga beberapa buku disebar secara gratis untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas, sementara buku-buku lain dijual secara komersil untuk kepentingan menafkahi sang penulis.

Dua, setiap buku setidaknya dibuat dalam dua bentuk, yakni hard copy dalam bentuk buku fisik, dan soft copy dalam bentuk file komputer, serta keduanya bisa tersebar secara luas. Keduanya bisa dijual ataupun dibagikan secara gratis, tergantung perjanjian dengan si penulis buku. Jika dijual, maka harus dipastikan, bahwa harga soft copy harus jauh lebih rendah, daripada harga buku hard copy, mengingat tidak ada ongkos cetak maupun distribusi yang besar.

Tiga, orang-orang yang peduli dengan pengembangan demokrasi dan terciptanya masyarakat yang beradab di Indonesia harus mengorganisir diri, tentu dalam kerja sama dengan pemerintah dan dunia bisnis, sehingga mereka bisa mengawal semua proses di atas, dan menjamin tidak adanya korupsi. Organisasi-organisasi masyarakat, seperti organisasi keagamaan, universitas, LSM-LSM, organisasi-organisasi profesi, harus menyatukan diri untuk tujuan ini, yakni pengembangan demokrasi melalui buku-buku yang bermutu, karena kunci perubahan ada di pundak mereka. Inilah yang Habermas sebut sebagai “kekuatan komunikatif masyarakat sipil.” (Habermas, 1994)

Organisasi ini bertugas mencari dana alternatif untuk menopang hidup para penulis bangsa ini, bisa dengan memiliki bisnis tersendiri milik organisasi yang bisa dikelola, dan hasilnya bisa digunakan untuk tujuan-tujuan pengembangan demokrasi, ataupun dengan cara-cara strategis lainnya, seperti investasi, penggalangan dana, dan sebagainya. Tentu saja, hukum terkait dengan pembajakan buku juga harus ditegakkan.

Yang amat perlu disadari adalah, bahwa buku adalah jendela dunia yang bisa memperluas wawasan berpikir kita. Ini adalah aspek yang amat penting di dalam masyarakat demokratis. Pembajakan buku bisa membunuh para penulis kreatif bangsa ini, dan akhirnya mereka terpaksa harus pindah ke profesi lain, yang amat mungkin tidak menunjang kreativitas mereka. Jika itu yang terjadi, kita semua yang rugi.

Kita semua, yakni masyarakat sipil Indonesia, tentu dalam koordinasi dengan pemerintah dan bisnis, harus menemukan cara untuk menopang para penulis kreatif bangsa ini. Solidaritas dan kebaikan bersama adalah kata kunci dalam proses ini, bukan kebaikan para pebisnis rakus ataupun kebaikan segelintir koruptor licik yang menyesakan dada kita semua.

Mengembangkan Pendidikan di Indonesia

Sudah lama di Indonesia, profesi guru dan dosen dianggap sebagai profesi kelas dua. Mereka yang memiliki kompetensi tinggi justru lebih ingin menjadi praktisi bisnis, insinyur, ataupun dokter. Sementara, orang-orang yang kebingungan mau jadi apa nantinya justru memasuki sekolah-sekolah pendidikan. Pandangan ini jelas salah, dan perlu diubah.

Di sisi lain, salah satu akar utama masalah pendidikan di Indonesia adalah lemahnya otoritas pendidikan yang ada. Dalam arti ini, lemah berarti otoritas tersebut tidak memiliki konsep pendidikan yang jelas, dan sembarangan mengeluarkan kebijakan yang justru kontra produktif bagi pengembangan pendidikan. Saya yakin jika para petinggi pendidikan di Indonesia ditanya, apa arti pendidikan, mereka tidak akan mampu menjawab secara jelas dan tepat.

Mengembangkan Pendidikan

Guru adalah profesi yang amat luhur, karena langsung terkait dengan pembentukan cara berpikir yang menentukan semua perilaku manusia. Apalagi guru adalah pendidik calon-calon pemimpin masa depan. Posisi guru amat penting untuk menggulirkan perubahan cara berpikir yang lebih rasional, kritis, dan anti korupsi di masa depan. Mengingat semua ini, maka profesi guru haruslah diisi oleh orang-orang yang sungguh kompeten dan peduli pada pembangunan karakter serta cara berpikir bangsa. Pemerintah dan rakyat harus menunjang kehidupan para guru, sehingga mereka bisa hidup secara manusiawi, dan bangga dengan profesinya.

Otoritas pendidikan, baik pada level nasional maupun lokal, harus bisa dikontrol secara demokratis. Proses pembuatan kebijakan, sampai dengan jumlah anggaran yang tersedia, haruslah dibuat seterbuka mungkin, sehingga bisa dikontrol secara demokratis oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Orang-orang yang duduk di dalamnya juga harus teruji sebagai tokoh pendidikan yang visioner, dan bukan hanya sekedar administrator yang miskin visi.

Seleksi guru dan dosen juga diperketat. Tidak semua orang bisa menjadi pendidik. Hanya orang-orang yang sungguh mencintai pendidikan, mencintai peserta didik mereka, dan sungguh kompeten dalam bidang ilmunyalah yang layak menjadi guru dan dosen. Otoritas pendidikan di Indonesia, baik level nasional maupun lokal, harus berani tegas dalam hal ini. Jangan mengangkat orang sebagai guru, hanya karena kedekatan pribadi, kesamaan latar belakang (politik, ras, ataupun agama), ataupun tujuan-tujuan lainnya di luar peningkatan kualitas pendidikan.

Paradigma Pendidikan

Yang juga amat penting adalah perubahan paradigma pendidikan. Kultur pilihan ganda haruslah dihapus, dan diganti dengan kultur ujian untuk mencipta, misalnya menjalankan proyek tertentu untuk menghasilkan karya cipta sesuai dengan bidangnya. Ini perlu dilakukan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.

Kultur menghafal juga harus diganti dengan kultur menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan bidang ilmunya. Jika difokuskan untuk menyelesaikan masalah dan berkarya, maka materi pendidikan akan

menjadi bagian dari penghayatan pribadi yang melekat seumur hidup, dan bukan sekedar hafalan yang akan segera lenyap, setelah ujian selesai.

Kultur guru otoriter, dan guru sebagai sumber kebenaran utama, juga harus diganti dengan kultur pendidikan demokratis, di mana siswa bisa berpendapat secara rasional dan berdiskusi secara sehat dengan segala pihak. Kultur bertanya juga harus dikembangkan, karena dari pertanyaan-pertanyaanlah pikiran kita berkembang, dan wawasan kita sebagai manusia bertambah luas. Bahkan, menurut saya, yang terpenting bukanlah menjawab secara benar, tetapi mengajukan pertanyaan yang benar. Karena seringkali jawaban yang benar atas pertanyaan yang salah justru membawa kita pada kesesatan.

Partisipasi Rakyat

Semua ini perlu didukung oleh sumber daya yang besar. Maka pemberantasan korupsi harus dilakukan secara agresif, sehingga kita memiliki sumber daya yang memadai untuk mengembangkan hal-hal yang sungguh penting bagi kehidupan berbangsa kita, yakni pendidikan anak-anak kita. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan KPK atau pemerintah semata, tetapi juga harus mendapatkan dukungan nyata dari seluruh rakyat terkait, terutama ketika mereka menyaksikan sendiri korupsi terjadi di depan mata mereka.

Partisipasi kita sebagai rakyat amat dibutuhkan untuk mewujudkan semua langkah di atas menjadi kenyataan. Kekuatan masyarakat demokratis bukan pada pimpinannya, tetapi pada rakyatnya yang peduli dan terus berjuang mengontrol kekuasaan, sehingga bisa tetap dipergunakan untuk kepentingan yang lebih baik dan lebih besar.

Di titik ini, kita menemukan sebuah logika melingkar. Di satu sisi, partisipasi demokratis dari seluruh rakyat amat penting untuk mengontrol kekuasaan, terutama untuk memastikan terciptanya pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat. Di sisi lain, pendidikan yang humanistik, seperti yang saya jelaskan di atas, bisa menjamin kultur demokratis di negara kita tetap terjaga. Dengan mengontrol kekuasaan secara demokratis, kita bisa melapangkan jalan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang kita impikan bersama.

Empat Pilar Demokrasi untuk Indonesia

Perbedaan masih seringkali memicu konflik, bahkan konflik berdarah, di masyarakat kita. Perbedaan suku, ras, agama, dan cara hidup seringkali menajamkan prasangka yang berujung pada kekerasan antar manusia. Feodalisme politik masih tercium di udara. Orang menjadi penguasa bukan karena kemampuan nyatanya, melainkan karena kedekatannya dengan kekuasaan yang ada, dan kemampuannya melakukan manuver-manuver politis yang penuh tipu daya semata.

Di sisi lain, banyak kebijakan lahir dari mekanisme-mekanisme yang rahasia dan tidak masuk akal, seperti kebijakan Ditjen DIKTI yang secara tiba-tiba mengeluarkan aturan tentang penerbitan dan publikasi jurnal ilmiah di Indonesia, sampai dengan perpindahan tiba-tiba Angelina Sondakh, tersangka kasus korupsi, ke salah satu komisi di DPR yang mengurus anggaran. Pada saat yang sama, mayoritas rakyat dibuai dengan konsumsi, dan lupa tanggung jawab mereka sebagai warga negara untuk mengawasi kekuasaan. Barang-barang hasil produksi sistem ekonomi kapitalisme menutup mata mereka dari kebenaran “hitam” politis yang sebenarnya terpampang di depan mata.

Di titik ini, pada hemat saya, kita perlu menegaskan kembali komitmen kita pada terciptanya masyarakat demokratis di Indonesia, dan memperdalam pengetahuan kita tentang demokrasi tersebut. Sebagai sistem tata kelola politik, demokrasi pada dasarnya adalah tata kelola masyarakat dengan menjadikan kepentingan rakyat (*demos*) sebagai fokus utamanya. Asumsi dasarnya adalah, bahwa rakyat merupakan penguasa (*kratos*=kekuasaan) utama dari negara.

Ukuran dari keberhasilan demokrasi sebagai tata kelola masyarakat adalah, sejauh mana kebijakan dan praktek politik yang ada menyumbang pada terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh, atau sebanyak mungkin, rakyat. Jika itu tidak tercapai, maka pemerintah yang berkuasa harus segera dicopot, dan diganti dengan pemerintah (partai) yang lain.

Pada hemat saya, demokrasi memiliki empat pilar yang menyangganya. Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya demokrasi dapat diukur secara kurang lebih obyektif dari keberadaan empat pilar itu dalam masyarakat. Empat pilar tersebut adalah kemampuan mengelola perbedaan secara sehat (1), tidak adanya kekuasaan politis yang bersifat mutlak (2), akuntabilitas serta transparansi kekuasaan publik (3), dan partisipasi publik yang tinggi dari setiap warganya (4).

Mengelola Perbedaan

Perbedaan adalah fakta hidup. Tidak ada pola hidup yang seragam. Keseragaman adalah pemaksaan, dan pemaksaan adalah ciri penguasa otoriter dan totaliter. Demokrasi tidak menyeragamkan kehidupan, melainkan memelihara dan mengelola perbedaan, sehingga perbedaan menjadi energi dasar untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bersama.

Maka di dalam masyarakat demokratis, perbedaan adalah sesuatu yang dibanggakan, mulai dari perbedaan ras, suku, agama, golongan, paham politik, perbedaan cara hidup, sampai dengan perbedaan selera. Semua itu dikelola dengan prinsip *fairness*. Artinya segala persoalan dan keputusan dibicarakan di dalam ruang publik yang bebas dan egaliter. Pihak yang pemikirannya tidak diterima harus secara terbuka mengakui “kekalahannya”, menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan bersama, serta diberi kesempatan untuk kembali mengajukan keberatannya di kesempatan-kesempatan publik yang telah tersedia.

Di dalam masyarakat demokratis yang sehat, kita akan melihat orang-orang yang berasal dari latar belakang dan ideologi yang berbeda bisa hidup berdampingan. Konflik tetap ada, namun dikelola dengan prinsip *fairness*. Keadilan dapat diakses oleh semua pihak, walaupun mereka miskin ataupun bagian dari kelompok minoritas. Jika ini tidak ada, maka masyarakat tersebut belum layak disebut sebagai masyarakat demokratis.

Tidak Ada Kekuasaan Mutlak

Di dalam masyarakat demokratis, kekuasaan politis bersifat relatif. Artinya kekuasaan tersebut ada, selama ia masih berperan dalam mengupayakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Jika ia dianggap gagal dalam menjalankan misi tersebut, maka kekuasaan politis itu dicabut, dan diberikan ke pihak lain yang lebih kompeten. Kekuasaan absolut yang dapat kita temukan pada pemerintahan monarki dan totaliter tidak berlaku di dalam pemerintahan demokratis.

Hal ini berlaku mulai dari pemerintahan politis pusat, sampai dengan tata kelola pemerintahan terkecil, yakni pada level RT dan RW. Di dalam semua bentuk kekuasaan politis tersebut, ada satu ciri yang sama, bahwa semuanya bersifat temporal dan relatif pada kinerja dari kekuasaan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa kultur meritokrasi, di mana yang terbaiklah yang akan memimpin, meresap ke dalam berbagai struktur maupun institusi politik yang ada.

Prinsip *fairness* juga meresap ke dalam pelbagai institusi yang ada. *Fairness* menjadi kultur, dan bukan sesuatu yang asing. Artinya seorang penguasa bisa dengan lapang dada meninggalkan pos politiknya, jika ia memang terbukti secara definitif gagal dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada drama politik yang biasanya muncul, karena seorang penguasa dicopot dari jabatan politisnya.

Akuntabilitas dan Transparansi

Di dalam pemerintahan monarki absolut ataupun totaliter, aspek-aspek kekuasaan adalah sesuatu yang rahasia. Bahkan dapatlah dikatakan, bahwa seluruh fondasi politis adalah rahasia, terutama soal taktik merebut dan mempertahankan kekuasaan politis. Karena rahasia berkuasa, maka ketidakpercayaan menjadi atmosfer hidup bersama. Masyarakat hidup dan bergerak dengan rasa curiga dan prasangka.

Masyarakat demokratis menjauh dari politik rahasia semacam itu. Transparansi, atau keterbukaan, adalah ciri utama politik demokrasi. Proses pembuatan kebijakan dibuat dengan proses-proses publik yang melibatkan semua pihak yang nantinya terkena dampak dari kebijakan tersebut. Tujuan dari keterbukaan ini adalah pertanggungjawaban kekuasaan terhadap orang-orang yang telah memberikan kekuasaan tersebut, yakni rakyat itu sendiri. Akuntabilitas dan transparansi politik adalah ciri utama dari kekuasaan demokratis.

Hal ini, sekali lagi, berlaku dari mulai kekuasaan politik di pusat negara, sampai dengan level RT dan RW. Contohnya kas kolektif RT dan RW dibuat transparan, artinya dapat diakses oleh setiap orang yang tinggal di RT dan RW tersebut. Kas itu juga dibuat laporan pertanggungjawaban secara berkala, terutama soal penggunaannya. Proses-proses pemilihan dan pola kerja ketua RT/RW serta jajaran di bawahnya juga dibuat terbuka, dan diberikan pertanggungjawaban yang benar secara berkala. Jika ini tidak ada, maka demokrasi pun juga tidak ada.

Partisipasi yang Bergairah

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai penguasa, rakyat haruslah cerdas dan kritis di dalam menjalankan dan mengawasi gerak roda politik. Rakyat harus secara cerdas, kritis, dan bergairah ambil bagian dari menjalankan dan mengawasi roda kekuasaan di masyarakat demokratis. Hanya dengan begitu, masyarakat akan terhindar dari segala bentuk kekuasaan absolut yang seringkali mengatasnamakan demokrasi, tetapi sebenarnya bermotivasi totaliter dan otoriter.

Semua itu dapat diukur secara kuantitatif dari seberapa banyak rakyat yang aktif di organisasi masyarakatnya, seberapa banyak yang mengikuti pemilu, dan seberapa banyak yang berpartisipasi aktif dalam partai politik. Dasar dari semua itu adalah kepercayaan dasar, bahwa partisipasi aktif di dalam kehidupan bermasyarakat akan memberikan keuntungan yang nyata bagi semua, yakni keadilan dan kemakmuran bagi semua. Jika mayoritas rakyat masih bersikap masa bodoh, dan merasa pesimis dengan kehidupan politik masyarakatnya, maka demokrasi belumlah menjadi mentalitas sekaligus sistem yang nyata di masyarakat tersebut.

Jelas sekali, bahwa empat pilar demokrasi di atas belum secara nyata terwujud di Indonesia. Musuh-musuh demokrasi, seperti kemiskinan, kebodohan, sikap tak peduli, feodalisme, konsumtivisme, fanatisme dan fundamentalisme sempit, serta politik rahasia (persekongkolan) masih memiliki pengaruh dan kekuatan besar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang demokratis, kita perlu untuk melawan musuh-musuh demokrasi tersebut dengan gigih. Hanya dengan begitu, kita bisa sungguh mewujudkan masyarakat demokratis yang mampu memberikan keadilan dan kemakmuran bagi semua.***

Biodata Penulis



Reza A.A Wattimena (Reza Alexander Antonius Wattimena), Pengajar di Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya. Penulis lepas di berbagai media. Kini sedang belajar di *Kreuzberg Sprachinstitut*, Bonn, Jerman dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi Doktoral Filsafat Politik di *Hochschule für Philosophie, Philosophische Fakultät SJ, Muenchen*, Jerman.

Buku yang telah diterbitkan:

1. Melampaui Negara Hukum Klasik (2007)
2. Filsafat dan Sains (2008)
3. Filsafat Kritis Immanuel Kant (2010)
4. Bangsa Pengumbar Hasrat (2010)
5. Filsafat Perselingkuhan sampai Anorexia Kudus (2011)
6. Filsafat Kata (2011)
7. Ruang Publik (artikel dalam buku, 2010)
8. Menebar Garam di atas Pelangi (artikel dalam buku, 2010)
9. Membongkar Rahasia Manusia (editor, 2010)
10. Metodologi Penelitian Filsafat (editor dan penulis, 2011)
11. Filsafat Ilmu Pengetahuan (editor, 2011)
12. Filsafat Politik untuk Indonesia (editor dan penulis, 2011)
13. Penelitian Ilmiah dan Martabat Manusia (2011)
14. Etika Komunikasi Politik (artikel dalam buku, 2011)
15. Filsafat Anti Korupsi (2012)
16. Menjadi Pemimpin Sejati (2012)
17. Menjadi Manusia Otentik (2012)
18. Tuhan dan Uang (artikel dalam buku, 2012)

Juga aktif menulis di majalah Basis, jurnal-jurnal filsafat, harian Kompas, koran Jubileum Surabaya, dan artikel populer di www.rumahfilsafat.com

Buku ini adalah suatu upaya untuk memahami apa yang terjadi dengan Indonesia dewasa ini, terutama dilihat dari sudut filsafat dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam buku ini, saya mengajukan satu argumen, bahwa Indonesia terjebak dalam gelembung-gelembung realitas, sehingga kehilangan pijakan pada realitas yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, gelembung adalah elemen yang menghalangi pandangan kita atas kenyataan yang sebenarnya. Yang terlihat kemudian adalah versi lebih (hiperbolis) dari kenyataan itu.

Tujuan buku ini adalah mengajak bangsa Indonesia untuk berani berpikir kritis, ketika berhadapan dengan dunia sehari-hari. Dengan sikap kritis tersebut, kita bisa mulai memahami, apa masalah sebenarnya, dan bergerak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan bersama kita.

Reza A.A Wattimena

ISBN: 978-602-9097-21-4